



Kajian Fiskal Regional



KANWIL DJPB PROVINSI BENGKULU 2025



UNDUH

KAJIAN FISKAL REGIONAL

TW I TAHUN 2025
PROVINSI BENGKULU
SECARA ONLINE

SCAN DI SINI

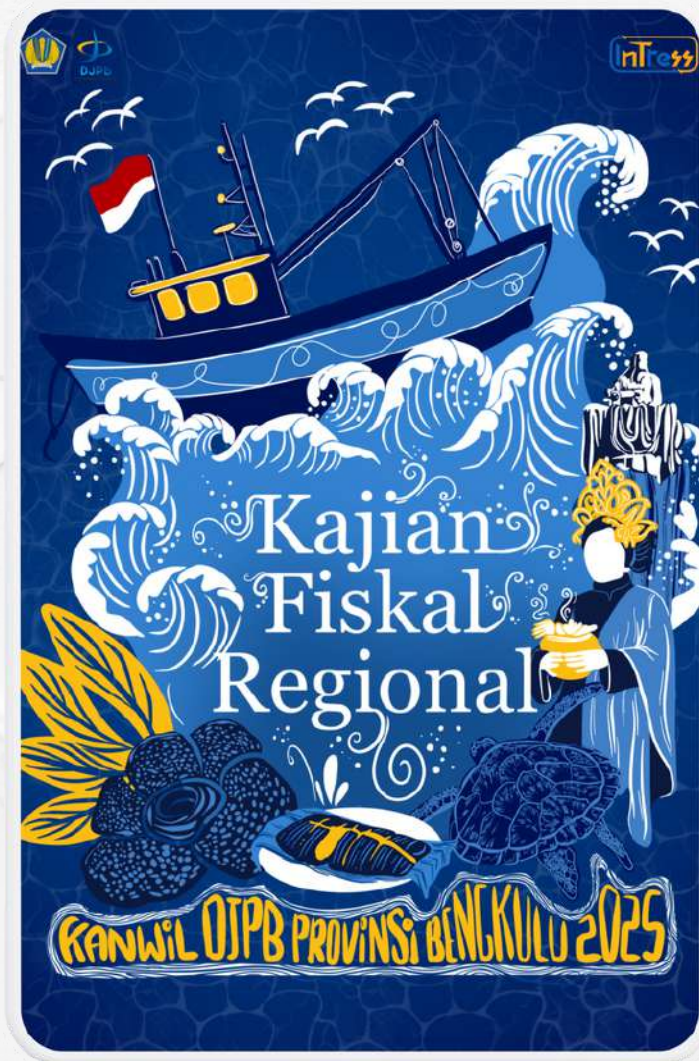
DOWNLOAD KFR

SURVEI KFR



SITUS WEBSITE

<https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/bengkulu/id/d-ata-publikasi/kajian-fiskal-regional.html>





Tim Penyusun

Pengarah

Mohamad Irfan Surya Wardana

(Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu)

Penyusun

Sunaryo

Imam Abdurrahman Mursalin

Sabar Sautomo

Khofipa Oktasya

Nafira Dara

Rahmatiana Yuniar Iman

Puji Sigit Rakhmanto

Martini

Selayang Pandang

PROVINSI BENGKULU



Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, berbatasan dengan Sumatera Barat di utara, Lampung di selatan, Jambi dan Sumatera Selatan di timur, serta Samudera Hindia di barat. Wilayahnya terdiri dari dataran rendah hingga perbukitan, dengan pegunungan Bukit Barisan yang membentang di timur.

Secara budaya, Bengkulu memiliki **keberagaman etnis**, dengan suku asli seperti Rejang, Serawai, Enggano, Lembak, dan Melayu Bengkulu. Selain itu, terdapat komunitas pendatang seperti Minangkabau, Jawa, dan Batak yang memperkaya budaya lokal. **Tradisi khas Bengkulu** mencakup Tari Andun, Tabot, dan bahasa daerah seperti Rejang dan Serawai.

Dengan **keindahan alamnya**, Bengkulu juga terkenal akan Pantai Panjang, Benteng *Fort Marlborough*, dan Pulau Enggano, yang menjadi daya tarik wisata budaya dan alam.



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dapat menyelesaikan RCE *Quarterly Report* (Kajian Fiskal Regional) Triwulan I Tahun 2025 sesuai Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-419/PB.2/2025 tanggal 23 April 2025 hal Penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan KFR Triwulan I Tahun 2025 ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dalam perannya sebagai *Regional Chief Economist (RCE)* dan *Financial Advisor (FA)*. KFR Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi dan memberikan gambaran yang komprehensif dan berkualitas kepada pembaca mengenai kondisi ekonomi dan dinamika fiskal di Provinsi Bengkulu untuk periode yang berakhir hingga triwulan I tahun 2025 dalam mengambil kebijakan ekonomi dan fiskal.

Selain memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi dan fiskal terkini Bengkulu, dalam KFR Triwulan I Tahun 2025 kali ini juga diangkat analisis tematik terkait dengan reviu atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah.

Kolaborasi antar unit instansi sangat membantu kami dalam menyusun dan menyelesaikan KFR Triwulan I Tahun 2025 ini. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, *Local Expert* Provinsi Bengkulu, dan semua pihak baik eksternal maupun internal yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu dalam membantu penyelesaian KFR Triwulan I Tahun 2025 ini. Semoga hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat terus terjaga hingga masa yang akan datang.

Kami berharap KFR Triwulan I Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, pengamat kebijakan publik, dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Rekomendasi dalam KFR Triwulan I Tahun 2025 ini kami harapkan juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik pimpinan di pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang. Tidak ada gading yang tak retak, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak/Ibu agar KFR yang kami susun dapat lebih berkualitas dan memberikan kemanfaatan yang optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing agar bisa bisa terus memberikan kontribusi terbaik bagi Provinsi Bengkulu, serta bangsa dan negara.



Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
Mohamad Irfan Surya Wardana

Bengkulu, 28 Mei 2025

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik
Mohamad Irfan Surya Wardana



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Ringkasan Eksekutif	xv
<i>Dashboard</i>	xviii
Daftar Pustaka	xxi

BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1

1.1	Analisis Indikator Makro Ekonomi	3
1.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.1.2	Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB	7
1.1.3	Inflasi	8
1.1.4	Neraca Perdagangan, Ekspor dan Impor	11
1.2	Analisis Indikator Kesejahteraan/Pembangunan	13
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	13
1.2.2	Tingkat Kemiskinan	15
1.2.3	Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio)	17
1.2.4	Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran	19
1.2.5	Nilai Tukar Petani (NTP)	22
1.2.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	24

BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

26

2.1	Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi	28
2.1.1	Pendapatan Negara	29
2.1.2	Belanja Negara	35
2.1.3	Surplus/Defisit APBN	43
2.1.4	Isu Strategis Pelaksanaan APBN Provinsi Bengkulu	43
2.1.5	Rekomendasi Kebijakan Isu Pelaksanaan APBN Provinsi Bengkulu	44
2.2	Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasian Pemda)	45
2.2.1	Pendapatan Daerah	46
2.2.2	Belanja Daerah	48
2.2.3	Surplus/Defisit APBD	49
2.2.4	Pembiayaan Daerah	50



Daftar Isi

BAB II

ANALISIS FISKAL REGIONAL

26

2.3	Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	50
2.3.1	Pendapatan Konsolidasian	51
2.3.2	Belanja Konsolidasian	51
2.3.3	Surplus/Defisit Konsolidasian	52
2.3.4	Pembiayaan Konsolidasian	51
2.3.5	Isu Strategis Pelaksanaan APBD	52
2.3.6	Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Pelaksanaan APBD	53
2.4	Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)	53
2.4.1	Data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	53
2.4.2	Data Penerima Manfaat MBG	54
2.4.3	Aspek Operasional	54
2.4.4	Dampak Program MBG terhadap Harga Bahan Baku	54
2.4.5	Kendala Pelaksanaan Program MBG Provinsi Bengkulu	55
2.4.6	Rekomendasi Pelaksanaan Program MBG Provinsi Bengkulu	55

BAB III

ANALISIS TEMATIK:

"Analisis atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah"

56

3.1	Pendahuluan	58
3.2	Perkembangan Kondisi Koperasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 s.d. 2023	59
3.3	Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu	60
3.3.1	Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Koperasi	60
3.3.2	Perkembangan Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan Koperasi	61
3.3.3	Perkembangan Dukungan Belanja Transfer ke Daerah	61
3.3.4	Perkembangan Dukungan Belanja APBD	62
3.4	Tantangan dalam Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu	63
3.5	Strategi Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu	64
3.5.1	Penggunaan Analisis SWOT untuk Merumuskan Strategi Pengembangan Koperasi	64
3.5.2	Penyusunan Strategi (SWOT)	65
3.5.3	Penggunaan Matriks Eisenhower untuk Memprioritaskan Strategi Pengembangan Koperasi	66



Daftar Isi

BAB III

ANALISIS TEMATIK:

"Analisis atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah"

56

3.6	Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan	67
3.6.1	Digitalisasi Koperasi	67
3.6.2	Keberadaan dan Jenis Industri sebagai Potensi Pengembangan Usaha Koperasi	68
3.6.3	Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	68
3.7	Isu Strategis dan Rekomendasi	69
3.7.1	Isu Strategis	69
3.7.2	Rekomendasi Strategi Pengembangan Koperasi	69

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

71

4.1	Kesimpulan	73
4.2	Rekomendasi	75



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Maret 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	8
Tabel 1.2	Rincian Andil Inflasi Bulan Maret 2025 per Komoditas 2025 secara <i>y-on-y</i> (Persen)	9
Tabel 1.3	IPM Provinsi Bengkulu Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2022 – 2024	14
Tabel 2.1	Laporan Realisasi APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2025 (Miliar Rupiah)	28
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)	30
Tabel 2.3	Pagu dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)	32
Tabel 2.4	Pagu dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)	33
Tabel 2.5	Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Sektor di Bengkulu Triwulan I 2025 (Miliar Rupiah)	33
Tabel 2.6	Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai per Sektor di Bengkulu Triwulan I 2025	34
Tabel 2.7	Analisis <i>Tax Ratio</i>	34
Tabel 2.8	Prognosis Pendapatan Negara s.d. Triwulan IV 2025 (Miliar Rupiah)	35
Tabel 2.9	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)	36
Tabel 2.10	Pagu dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)	37
Tabel 2.11	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, Triwulan I 2024 – 2025 (Miliar Rupiah)	38
Tabel 2.12	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar Triwulan I Tahun 2025 (Miliar Rupiah)	39
Tabel 2.13	Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita Triwulan I, 2024 – 2025 (Rupiah)	41
Tabel 2.14	Pagu dan Realisasi Program Prioritas Nasional Triwulan I 2025 (Miliar Rupiah)	41
Tabel 2.15	Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2025 (Miliar Rupiah)	42
Tabel 2.16	Perbandingan Defisit APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan I 2024-2025 (Miliar Rupiah)	43
Tabel 2.17	Laporan Realisasi APBD di Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2024-2025 (Miliar Rupiah)	45
Tabel 2.18	<i>Tax Ratio</i> (Rupiah)	47
Tabel 2.19	Rasio Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I 2025	47
Tabel 2.20	Kontribusi Belanja Daerah per Kapita Triwulan I, 2024 – 2025 (Rupiah)	48
Tabel 2.21	Surplus/Defisit Seluruh Pemda Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I 2025 (Rupiah)	49
Tabel 2.22	LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu Triwulan I 2024-2025 (Miliar Rupiah)	50



Daftar

Tabel

Tabel 2.23	Analisis <i>Tax Ratio</i> Pajak Konsolidasian Provinsi Bengkulu Triwulan I 2024-2025 (Triliun Rupiah)	51
Tabel 2.24	Analisis Rasio Belanja Konsolidasian Provinsi Bengkulu s.d triwulan I Tahun 2025 (Triliun Rupiah)	52
Tabel 2.25	Daftar SPPG lingkup Provinsi Bengkulu	53
Tabel 2.26	Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa Penerima Manfaat MBG	54
Tabel 2.27	Harga Bahan Baku Januari-Mei 2025 (Rupiah)	54
Tabel 3.1	Perkembangan Kondisi Koperasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 s.d. 2023	59
Tabel 3.2	Perkembangan Kondisi Koperasi Nasional	60
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Provinsi Bengkulu Terkait Pengembangan	60
Tabel 3.4	Koperasi Perkembangan Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan Koperasi dan UKM Tahun 2021 s.d. 2024	61
Tabel 3.5	Perkembangan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023 s.d. 2024 (Rupiah)	62
Tabel 3.6	Perkembangan Dukungan Belanja APBD Provinsi Bengkulu Terkait Pengembangan Koperasi Tahun 2021 s.d. 2024 (Rupiah)	62
Tabel 3.7	Hasil Analisis SWOT Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu	65
Tabel 3.8	Matriks Eisenhower Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu	67
Tabel 3.9	Kekuatan Sinyal/Telepon Seluler Per Kab./Kota	67
Tabel 3.10	Data Jenis Industri Per Kab./Kota	68
Tabel 3.11	Perkembangan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu	68



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Perbandingan Besaran PDRB Bengkulu Triwulan I 2025	3
Grafik 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Tahun 2022 s.d. Triwulan I 2025 (% <i>y-on-y</i>)	4
Grafik 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu Tahun 2020 s.d. Triwulan I 2025 (% <i>q-to-q</i>)	4
Grafik 1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2025 secara <i>y-on-y</i> (Persen)	4
Grafik 1.5	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran secara <i>q-to-q</i> dan <i>y-on-y</i> (Persen)	5
Grafik 1.6	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha secara <i>q-to-q</i> dan <i>y-on-y</i> (Persen)	6
Grafik 1.7	Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Bengkulu Triwulan I 2025 (Milair Rupiah)	7
Grafik 1.8	Perbandingan Distribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Triwulan I Tahun 2025 secara <i>y-on-y</i> (Persen)	8
Grafik 1.9	Tren Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2025 secara <i>y-on-y</i> (Persen)	9
Grafik 1.10	Tren Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2025 secara <i>m-to-m</i> (Persen)	10
Grafik 1.11	Inflasi pada 10 Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2025 secara <i>y-on-y</i> (Persen)	10
Grafik 1.12	Komoditas Penyumbang Utama Inflasi/Deflasi Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2025 Menurut Kelompok Pengeluaran secara <i>y-on-y</i> (Persen)	10
Grafik 1.13	Perkembangan Neraca Perdagangan (Hanya Ekspor) Provinsi Bengkulu 2023 s.d. Triwulan I 2025 (Juta USD)	11
Grafik 1.14	Perkembangan Ekspor Provinsi Bengkulu 203 s.d. Triwulan I 2025 secara <i>m-to-m</i> (Juta USD)	11
Grafik 1.15	Perkembangan Impor Provinsi Bengkulu 2023–2025 (Juta USD)	12
Grafik 1.16	Kontribusi Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Komoditas Februari 2025 dan Maret 2025 (Juta USD)	12
Grafik 1.17	Perkembangan Impor Provinsi Bengkulu 2023–2025 (Juta USD)	12
Grafik 1.18	Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, Nasional dan Target Tahun 2020 s.d. 2024	13
Grafik 1.19	Perbandingan IPM Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2024	13
Grafik 1.20	Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu per Kategori IPM Tahun 2022 – 2024	13
Grafik 1.21	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Tahun 2020 s.d. 2024	16
Grafik 1.22	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2024	16



Daftar

Grafik

Grafik 1.23	Perkembangan Rasio Gini Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	17
Grafik 1.24	Perbandingan Gini Rasio Provinsi Bengkulu dengan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2024	18
Grafik 1.25	Perkembangan TPT Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2025 (Persen)	19
Grafik 1.26	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan TPT Provinsi Bengkulu dengan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2025 (Persen)	20
Grafik 1.27	Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal Tahun 2020-2025 (Persen)	20
Grafik 1.28	Porsi Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2025 (Persen)	20
Grafik 1.29	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota di Provinsi Bengkulu (Persen)	21
Grafik 1.30	TPT Menurut Pendidikan Februari 2022 s.d Februari 2025 (Persen)	21
Grafik 1.31	Perkembangan NTP Provinsi Bengkulu Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2025	22
Grafik 1.32	Perbandingan NTP dan Persentase Perubahan NTP Provinsi Bengkulu dengan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2025	22
Grafik 1.33	Perkembangan NTN Provinsi Bengkulu Tahun 2022 s.d. Triwulan I 2025	24
Grafik 2.1	Porsi Realisasi Pendapatan Negara Triwulan I 2025	29
Grafik 2.2	Realisasi dan <i>Growth</i> Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)	30
Grafik 2.3	Rincian Porsi Penerimaan Perpajakan Triwulan I Tahun 2025	31
Grafik 2.4	Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan I, 2024-2025 (Miliar Rupiah)	36
Grafik 2.5	Porsi Belanja Negara Triwulan I, 2024-2025	36
Grafik 2.6	Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah per Pemda, Triwulan I 2025 (Miliar Rupiah)	40

Visi Pembangunan Provinsi Bengkulu

*“Mewujudkan Provinsi Bengkulu Maju,
Sejahtera dan Hebat”*





LEMA BENGKULU

Lema adalah sebuah nama makanan khas suku Rejang. Komposisinya terdiri dari rebung yang dicincang-cincang, kemudian dicampur ikan mujair atau sepat. Setelah cincangan rebung yang dicampur dengan ikan tersebut diaduk-aduk, maka adonan tersebut disimpan ke dalam wadah yang dilapisi dengan daun pisang dan ditutup rapat-rapat. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu minimal selama tiga hari. Setelah itu, baru lema siap untuk dimasak sebagai lauk saat makan nasi.

sumber artikel : id.wikipedia.org



Ringkasan Eksekutif

1. Perkembangan Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada triwulan I tahun 2025 tumbuh dari tahun sebelumnya secara *y-on-y* (4,64 persen menjadi 4,84 persen) dan masih dibawah pertumbuhan nasional (4,87 persen). Pertumbuhan ini **didorong oleh** adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN, PPPK dan karyawan swasta, meningkatnya konsumsi listrik rumah tangga dan meningkatnya pengeluaran pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya; perumahan dan peralatan rumah tangga; serta kesehatan dan pendidikan, yang meningkatkan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. **Dari sisi lapangan usaha** perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,67 persen. Sementara dari **sisi pengeluaran**, konsumsi rumah tangga (PK-RT) masih menjadi komponen penyumbang tertinggi sebesar 60,01 persen. Secara spasial **PDRB Bengkulu berkontribusi sebesar 2,11 persen terhadap PDRB regional Sumatera** yang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85 persen (*y-on-y*) terhadap PDB Nasional. **Inflasi di Provinsi Bengkulu menurun drastis** hingga mengalami deflasi -0,22 persen (*yoy*) dibawah angka nasional yang sebesar 1,03 persen. Inflasi Bengkulu pada Maret 2025 *year-on-year* didorong adanya penurunan biaya hidup melalui subsidi tarif listrik dari pemerintah. Sedangkan untuk inflasi *month to month* (*m-to-m*) pada bulan Maret 2025 sebesar 1,28 persen dan tingkat inflasi *year to date* (*y-to-d*) Maret 2025 sebesar 0,10 persen, inflasi tersebut didorong oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil inflasi sebesar 1,26 persen.

Pembangunan manusia terus mengalami kemajuan yang hingga pada triwulan I tahun 2025 IPM mencapai 74,91 meskipun masih terdapat tantangan yaitu beberapa Kabupaten yang masih memiliki IPM dibawah rata-rata IPM Provinsi Bengkulu. Angka IPM ini masih lebih rendah dibandingkan secara nasional sebesar 75,02. **Tingkat kemiskinan** masih tergolong tinggi sebesar 12,52 persen dengan jumlah 261,15 ribu jiwa dan lebih tinggi dibandingkan kemiskinan nasional yang hanya sebesar 8,57 persen, namun angka ini mengalami tren penurunan dibanding tahun sebelumnya. **Gini ratio** juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,343 yang menunjukkan semakin tidak meratanya pendapatan di Provinsi Bengkulu. Namun angka ini masih dibawah nasional yang sebesar 0,381. **Tingkat pengangguran** naik dari periode sebelumnya hingga mencapai 3,24 persen pada februari 2025 dari yang sebelumnya 3,11 persen pada agustus 2024 dan merupakan **provinsi dengan jumlah pengangguran terendah se-sumatera (lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang sebesar 4,76 persen)**, namun penurunan ini tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu yang masih menjadi tertinggi nomor 2 se-sumatera. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat signifikan dibandingkan Maret 2024 mencapai 208,01 dan 106,51. Nilai ini membawa Provinsi Bengkulu menjadi Provinsi Bengkulu dengan nilai NTP dan NTN tertinggi se-Sumatera.

Policy Recommendation:

(a) Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, (b) melakukan upaya pemerataan dan peningkatan IPM, (c) perluasan lapangan kerja, (d) Pemda melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, (e) *refocusing* Belanja APBD untuk kegiatan yang bersifat strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, (f) kemudahan proses perizinan investasi, dan (g) pemanfaatan dana TKD secara optimal melalui pengembangan infrastruktur, (h) penguatan UMKM.

2. Perkembangan dan Pengaruh Fiskal di Daerah (APBN dan APBD)



Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu sampai dengan triwulan I tahun 2025 **menunjukkan capaian yang menurun**. **Realisasi pendapatan APBN** hanya mencapai Rp509,04 miliar atau 14,38 persen dari target yang telah ditetapkan. Kinerja ini mengalami kontraksi sebesar 3,67 persen



dibandingkan periode yang sama pada tahun anggaran 2024. Sebagian besar komponen pendapatan negara mengalami pertumbuhan, kecuali Pajak Penghasilan Non Migas (-34,93 persen yoy) dan Penerimaan Bea dan Cukai (-98,59 persen yoy). Penurunan PPh Non-Migas **disebabkan oleh pelemahan harga komoditas global dan penurunan produktivitas, serta faktor kebijakan nasional seperti pemusatan pajak cabang dan keterlambatan pelaporan SPT oleh WP badan.** Sedangkan penurunan penerimaan bea dan cukai disebabkan oleh masih belum beroperasinya pabrik rokok di Rejang Lebong, menyebabkan nihilnya penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan pendangkalan alur pulau baai menjadi penyebab utama menurunnya bea masuk dan bea keluar di Provinsi Bengkulu. Di sisi lain, **Belanja APBN** hingga akhir triwulan I tahun 2025 sebesar Rp3.349,23 miliar atau 22,54 persen dari pagu, turun sebesar 3,94 persen dibandingkan periode yang sama TA 2024. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp810,73 miliar turun signifikan sebesar 29,29 persen, sementara belanja TKD sebesar Rp2.5328,5 miliar naik sebesar 8,48 persen. Penurunan realisasi belanja negara utamanya disebabkan oleh **menurunnya realisasi pada komponen Belanja Barang dan Belanja Modal, sebagai akibat dari kebijakan efisiensi belanja yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.** Sedangkan pertumbuhan TKD didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN, PPPK, dan PPNPN.

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Bengkulu hingga akhir triwulan I tahun 2025 tercatat Rp1.776,95 miliar, kontraksi 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rendahnya kontribusi PAD, yang hanya mencapai 10,14 persen dari total pendapatan daerah, mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal Bengkulu dan **besarnya ketergantungan terhadap dana TKD. Realisasi belanja APBD** Provinsi Bengkulu mencapai Rp1.286,76 miliar, kontraksi sebesar 10,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya kinerja belanja APBD ini dipengaruhi oleh keterlambatan penetapan APBD Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yang baru disahkan pada 20 Januari 2025, yang merupakan **dampak atas penyesuaian rencana Pemerintah Daerah dalam merespons prioritas belanja nasional serta upaya efisiensi anggaran.**

Policy Recommendation:

Pendapatan Negara: (a) KPP Pratama di Bengkulu perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pertukaran data untuk memantau dan menggali potensi pajak dari sektor perkebunan dan pertambangan, (b) Pemda di Bengkulu mengurangi ketergantungan pada komoditas batu bara yang rentan terhadap isu lingkungan dan fluktuasi harga global serta menggali potensi unggulan lainnya, (c) hilirisasi seperti industri minyak goreng dan produk turunan sawit lainnya serta mendukung program biodiesel B40 dan B50, (d) Bea dan Cukai perlu memperkuat pengawasan dan sosialisasi regulasi registrasi IMEI lebih massif, (e) KSOP Pulau Baai bersama Pemda dan PT Pelindo perlu melakukan akselerasi normalisasi dan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai, dan (f) money dan pembinaan secara berkala pada satker pengelola PNBP.

Belanja Negara: (a) Percepatan realisasi belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, (b) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, harus memprioritaskan belanja barang untuk kegiatan esensial, (c) Satker perlu menghitung dan merencanakan kebutuhan belanja sampai dengan akhir tahun dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.

Transfer Ke Daerah (TKD): (a) memastikan pemenuhan dokumen syarat penyaluran TKD terpenuhi dan disampaikan tepat waktu, (b) segera melakukan kontrak terhadap kegiatan DAK Fisik dan memastikan ketersediaan SDM yang memahami proses PBJ, (c) menginisiasi program pembangunan zona integritas desa, budaya antikorupsi, dan transparansi pengelolaan keuangan desa, dan (d) Pemda melakukan pendampingan terhadap desa yang mengalami kasus hukum.

Badan Layanan Umum: (a) Satker BLU memahami pengukuran kinerja pengelolaan BLU melalui *maturity rating*, (b) pemenuhan SDM yang memahami pengelolaan BLU, (c) Satker BLU mengembangkan informasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan, (d) mengoptimalkan aset sebagai sumber pendapatan BLU, dan (e) kolaborasi antar BLU untuk meningkatkan kinerja BLU.

APBD: (a) mengembangkan potensi wisata, ekonomi kreatif, dan optimalisasi aset daerah, (b) mempercepat penerbitan Perda PDRD melalui koordinasi intensif antara eksekutif dan legislatif, (c) memperluas basis wajib pajak kendaraan bermotor melalui integrasi data kepemilikan, dengan supervisi dari Korlantas Polri.



meningkatkan koordinasi terkait penyusunan formasi ASN, sehingga alokasi Belanja Modal tidak terganggu oleh realokasi Belanja Pegawai, dan (e) meninjau ulang dan menyesuaikan prioritas program agar lebih banyak anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang.

BLUD: (a) Pemda perlu bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kemenkeu Satu, BPKP, BLU Pusat serta pihak terkait lainnya untuk melakukan *sharing knowledge* dan asistensi pengelolaan keuangan BLUD, dan (b) Kemenkeu perlu mendorong dan melakukan pendampingan bagi Pemda dalam melengkapi regulasi terkait pengelolaan BLUD sesuai amanat Permendagri No.79 Tahun 2018 dan best practices pengelolaan BLU Pusat.

3. Analisis Tematik



Reviu Atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah.

Pada tahun 2023, jumlah koperasi di Provinsi Bengkulu yang telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) tercatat sebanyak 2.033 unit, atau mengalami **pertumbuhan sebesar 0,35 persen dibandingkan dengan tahun 2022**. Dari jumlah tersebut, sebanyak **583 koperasi atau sekitar 28,67 persen tergolong aktif**, sedangkan sisanya merupakan koperasi nonaktif. Meskipun secara jumlah mengalami peningkatan, namun berbagai indikator kinerja koperasi seperti jumlah anggota, tenaga kerja, modal, aset, volume usaha, serta Sisa Hasil Usaha (SHU) justru **mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya**. Dukungan anggaran untuk pengembangan koperasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **menunjukkan pola yang tidak konsisten (berfluktuasi) dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun**. Melalui analisis yang telah dilakukan diperoleh beberapa **tantangan yang signifikan dalam upaya pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu** seperti rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan anggota koperasi, permasalahan tata kelola koperasi termasuk lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, terbatasnya jumlah petugas pendamping koperasi di daerah yang saat ini tidak lagi didanai oleh APBN, rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi, serta keterbatasan jaringan distribusi dan pemasaran produk koperasi. **Dalam konteks pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu**, masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya kapasitas dan kompetensi calon pengelola koperasi, pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi yang tidak melibatkan pengelola koperasi yang telah ada sebelumnya, potensi konflik kepentingan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait aspek persaingan usaha dan penyertaan modal, serta belum jelasnya ketentuan teknis mengenai sumber pembiayaan modal awal bagi koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Policy Recommendation:

(a) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terkait kemitraan pembentukan koperasi desa merah putih, kemitraan dengan BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan dengan BLU serta kemitraan penyaluran pupuk bersubsidi Swasta terkait kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar dan Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya dengan BULOG terkait kemitraan penyaluran barang dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG; (b) melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah; (c) Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM; (d) pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih dibutuhkan juknis yang jelas terkait persyaratan rekrutmen pengelola koperasi, diperlukan pengawalan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kota/Kab. dalam pembentukan koperasi, DPMD Prov./Kota/Kab. dan Perangkat Desa mengatur pembagian tugas yang jelas antara koperasi desa merah putih dengan bumdes, BUMDes dan kejelasan dari Pemerintah Pusat dalam ketentuan modal awal koperasi.

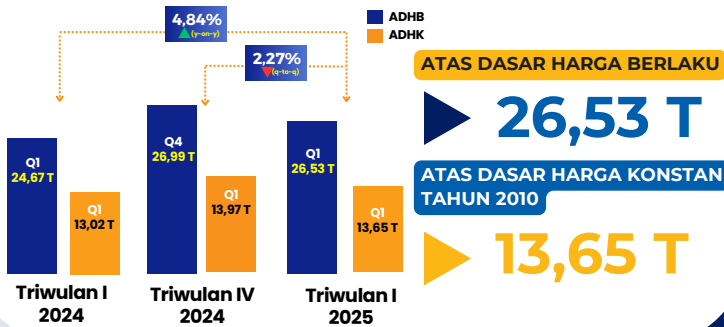


DASHBOARD EKONOMI - KESRA

INDIKATOR MAKRO EKONOMI TRIWULAN I TAHUN 2025

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (diolah)

PDRB BENGKULU TW I TAHUN 2025



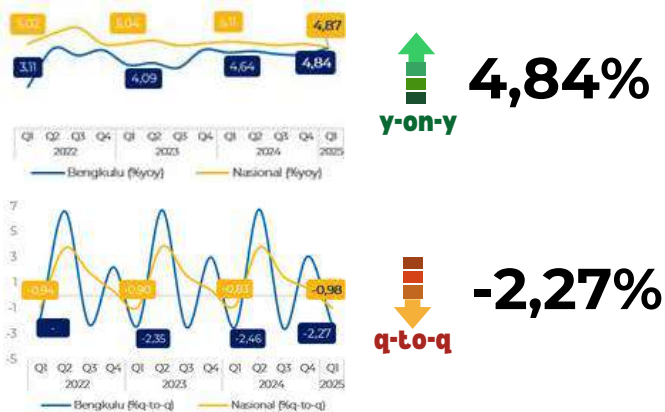
KONTRIBUSI PDRB PROVINSI BENGKULU TERHADAP PULAU SUMATERA PADA TW I-2025 (y-on-y)

Provinsi Bengkulu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Sumatera hanya sebesar **2,11 persen**, dengan pertumbuhan Sumatera sebesar **4,85 persen**



KONTRIBUSI	2,11%
BENGKULU	4,82%
SUMATERA	4,85%

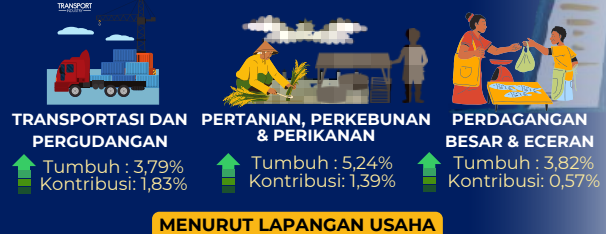
PERTUMBUHAN EKONOMI BENGKULU



TINGKAT INFLASI PROVINSI BENGKULU



LAJU DAN DISTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB (y-on-y)



INFLASI DAN ANDIL BERDASARKAN KELOMPOK (m-to-m)



DASHBOARD EKONOMI - KESRA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu (diolah)

TINGKAT KEMISKINAN

*per September 2024

12,52%

TURUN 1,04
PERSEN (yoy)



JUMLAH
PENDUDUK MISKIN
261,15 RIBU JIWA

PEDESAAN
174,44 RIBU JIWA

PERKOTAAN
86,71 RIBU JIWA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

*per Desember 2024

74,91

NAIK 0,62
POIN (yoy)

UMUR HARAPAN
HIDUP SAAT LAHIR
73,31 TAHUN

RATA-RATA
LAMA SEKOLAH
9,04 TAHUN

HARAPAN LAMA
SEKOLAH
13,75 TAHUN



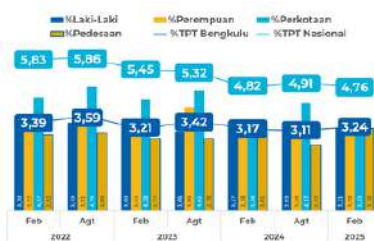
PENGELUARAN RIIL PER KAPITA PER TAHUN YANG
DISESUAIKAN Rp11.733.000

TINGKAT PENGANGGURAN

*per Februari 2025

3,24%

NAIK 0,07
POIN (yoy)



PENDUDUK USIA
KERJA
1.597.188 JIWA

ANGKATAN
KERJA
1.142.038 JIWA

BUKAN ANGKATAN
KERJA
455.150 JIWA

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

*per Maret 2025

208,01

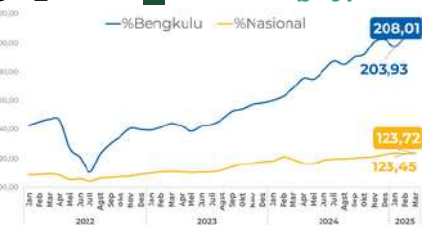
NAIK 2,00
PERSEN (yoy)

INDEKS YANG DITERIMA
PETANI (IT)

261,52
NAIK 2,78 PERSEN,
DENGAN
KOMODITAS
PENYUMBANG: KOPI,
KELAPA SAWIT,
GABAH, KARET

INDEKS YANG DIBAYAR
PETANI (IB)

125,73
TURUN 0,77 PERSEN,
DENGAN
KOMODITAS
PENYUMBANG:
CABAI MERAH,
BAWANG MERAH,
TONGKOL DAN
KUBIS/KOL



NTUP*
207,68
NAIK 2,44 PERSEN,
DIBANDINGKAN FEBRUARI
2025: 202,73
*NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN
(DILUAR KEBUTUHAN SEHARI-HARI)

TINGKAT KETIMPANGAN (GINI RASIO)

*per September 2024

0,343

NAIK 0,001 POIN
DIBANDING MARET
2024 (0,333)



MENINGKATNYA GINI RASIO
MENUNJUKKAN SEMAKIN TIDAK
MERATANYA PENDAPATAN DI
PROVINSI BENGKULU.

PEDESAAN
0,278

PERKOTAAN
0,409

*NILAI GINI RATIO BERKISAR ANTARA 0 DAN 1
0 : BERARTI BAHWA PENDAPATAN MERATA SEMPURNA
1 : BERARTI BAHWA PENDAPATAN TIMPANG SEMPURNA

NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)

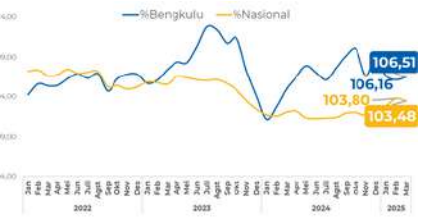
*per Maret 2025

106,51

NAIK 0,33
PERSEN (yoy)

INDEKS YANG DITERIMA NELA
(IT)
133,51
NAIK 0,94 PERSEN,
DISEBABKAN OLEH
NAIKNYA IT PADA
PENANGKAPAN

INDEKS YANG DIBAYAR NELA
(IB)
125,35
NAIK 0,61 PERSEN,
DISEBABKAN OLEH
NAIKNYA IB PADA
PENANGKAPAN



INTERPRETASI

NTN/NTP > 100: Menunjukkan bahwa daya beli nelayan/petani lebih tinggi, atau harga hasil tangkapan nelayan/hasil pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang mereka beli. Ini mengindikasikan kondisi yang menguntungkan bagi nelayan/petani.

DASHBOARD FISKAL REGIONAL

KINERJA APBN S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (MILIAR RUPIAH)

Sumber: OMSPAN (diolah)

REALISASI PENDAPATAN Rp509,04 M

(14,38% dari target)

GROWTH
-3,67% ▼
(y-o-y)

PENDAPATAN PERPAJAKAN

Penerimaan Dalam Negeri
Rp359,14 M

Pajak Perdagangan
Internasional
Rp24,40 Juta

TOTAL: Rp359,16 M 11,32%

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

PNBP Lainnya
Rp51,16 M

Pendapatan BLU
Rp98,72 M

TOTAL: Rp149,88 M 41,00%



Growth
-6,26% ▼
(y-o-y)

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Belanja Pegawai
Rp570,54 M

Belanja Barang
Rp185,11 M

TOTAL: Rp810,73 M 16,82%

TRANSFER KE DAERAH (TKD)

DTU
Rp1.763,89 M

DTK
Rp390,8 M

TOTAL: Rp2.538,5 M 25,28%

GROWTH
-3,94% ▼
(y-o-y)

Growth
-29,29% ▼
(y-o-y)

Belanja Modal
Rp43,79 M

Belanja Sosial
Rp11,29 M

Growth
8,48% ▲
(y-o-y)

Dana Bagi Hasil
Rp127,47 M

Dana Desa
Rp256,34 M

REALISASI BELANJA Rp3.349,23 M

(22,54% dari pagu)

▼ **DEFISIT**
Rp2.840,19 M
3,99% (yoy)



KINERJA APBD S.D. TRIWULAN I TAHUN 2025 (MILIAR RUPIAH)

Sumber: SIKRI (diolah)

REALISASI PENDAPATAN Rp1.776,95 M

(13,35% dari target)

GROWTH
-2,84% ▼
(y-o-y)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pajak Daerah
Rp1.125,26 M

Pengelolaan PAD
Rp25,72 M

Retribusi Daerah
Rp179,14 M

TOTAL: Rp180,24 M 9,67%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah
Rp1,31 M

TOTAL: Rp32,63 M 28,12%

▲ **SURPLUS**
Rp490,19 M
22,86% (yoy)

Growth
-13,39% ▼
(y-o-y)

Lain-Lain PAD
yang SAH
Rp10,37 M

Growth
N/A
(y-o-y)

Lain-Lain
Rp9,05 M

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai
Rp882,54 M

Belanja Barang dan Jasa
Rp202,14 M

Belanja Hibah
Rp68,39 M

Belanja Sosial
Rp0,3 M

TOTAL: Rp1.153,37 M

Growth
27,49% ▲
(y-o-y)

TOTAL: Rp28,6 M 1,49%

Growth
N/A
(y-o-y)

TOTAL: Rp0,2 M 0,57%

GROWTH
-10,01% ▼
(y-o-y)

Growth
-10,03% ▼
(y-o-y)

11,64%

Growth
27,49% ▲
(y-o-y)

1,49%

Growth
N/A
(y-o-y)

0,57%

REALISASI BELANJA Rp1.286,76 M

(9,34% dari pagu)



Growth
-16,64% ▼
(y-o-y)

DBH
Rp6,81 M

Bantuan Keuangan
Rp97,77 M

TOTAL: Rp104,58 M 5,44%

PENDAPATAN TRANSFER

Dari Pemerintah
Pusat Rp10.101,65 M

Antar Daerah
Rp287,58 M

TOTAL: Rp1.596,71 M 14,09%

Growth
-1,48% ▼
(y-o-y)

14,09%

BAB I

Analisis Ekonomi Regional





Pinterest: creative ranting

LEMPUK DURIAN

Lempuk Durian, sering disebut juga Dodol Durian atau Lempuk Durian, serta dalam bahasa Tionghoa disebut dengan (*Hanzi: 榴槤粿; Hakka: Liu-lian-pan*), adalah salah satu jenis lempuk yang dibuat dengan bahan daging durian. Lempuk Durian populer sebagai jajanan khas dari beberapa daerah di Indonesia, terutama di Sumatera salah satunya Bengkulu.

Lempuk Durian juga dikenal di Malaysia dan Brunei Darussalam. Sebagian masyarakat seperti di daerah Sunda menganggap lempuk durian sama dengan dodol, atau galamai di Ranah Minang. Namun, ada sedikit perbedaannya, Lempuk Durian tidak memakai tepung (kecuali lempuk dari Pekanbaru yang berasa ada campuran tepung), bahannya hanya durian dicampur gula (gula merah) saja. Sedangkan Dodol Durian diolah dengan mencampurkan durian, ketan dan kelapa.

sumber artikel : id.wikipedia.org



BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Dalam menyusun suatu kebijakan dan arah Pembangunan suatu daerah, Pemerintah membutuhkan informasi terkait perkembangan indikator ekonomi makro sebagai gambaran dinamika perekonomian yang terjadi dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Analisis terhadap Indikator ini setidaknya mampu memberikan gambaran tentang kinerja perekonomian suatu daerah serta memberikan petunjuk tren jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, indikator makro ekonomi juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan Masyarakat secara luas sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan produk dan sumber daya.

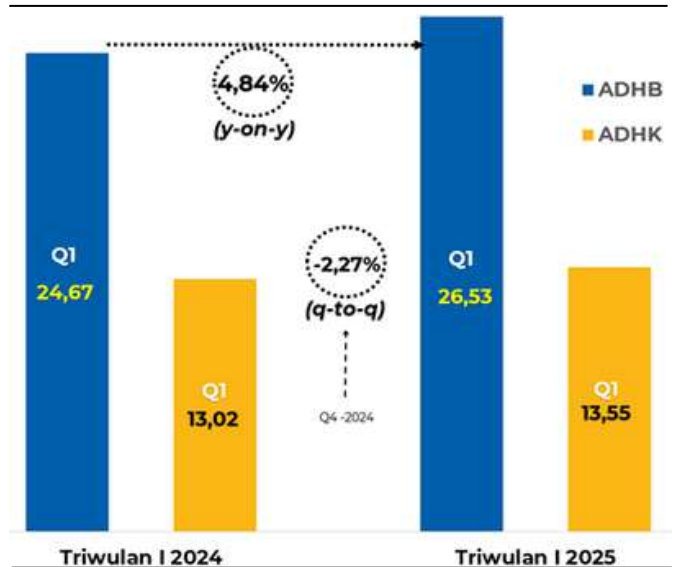
1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dan sasaran utama pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataupun milik penduduk wilayah lain (Sukirno 1994:105).

1.1.1.1 Besaran PDRB Bengkulu

Pada Triwulan I Tahun 2025, nilai Perekonomian Provinsi Bengkulu yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp26,53 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 mencapai Rp13,55 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun sebelumnya (Triwulan I 2024), PDRB Provinsi Bengkulu sebesar Rp24,67 triliun untuk ADHB dan Rp13,02 triliun untuk ADHK, yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Grafik 1.1 Perbandingan Besaran PDRB Bengkulu Triwulan I 2025



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 (diolah)

1.1.1.2 Pertumbuhan PDRB Bengkulu

Hingga Triwulan I 2025, perekonomian global menghadapi tantangan signifikan, termasuk ketegangan perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan perlambatan pertumbuhan di berbagai kawasan. Meskipun ada beberapa indikator positif, seperti ketahanan sektor manufaktur di Jerman dan langkah-langkah stimulus di Tiongkok, risiko resesi tetap tinggi, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% pada tahun 2025, sedikit di bawah rata-rata historis 3,7% (2000–2019). Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, Perekonomian Provinsi Bengkulu masih cukup tangguh dengan pertumbuhan yang stabil dan laju inflasi yang melambat. Hal ini tercermin dari nilai pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang mengalami pertumbuhan secara y-on-y, meskipun menurun secara q-to-q.

"Kami akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat."

— Sri Mulyani Indrawati, Konferensi Pers Kinerja APBN, Maret 2025 —





Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu 2022 s.d. Triwulan I 2025 (%y-o-y)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 (diolah)

Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2020 s.d. 2024 (%q-to-q)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 (diolah)

Berdasarkan pendekatan y-on-y, Kinerja Perekonomian Provinsi Bengkulu pada Triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,84 persen (y-on-y). Pertumbuhan ini didorong dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tertinggi sebesar 9,53 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,78 persen. Namun angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Perekonomian Nasional yang tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy) terpaut sebesar 0,03 persen poin di bawah pertumbuhan secara nasional.

Berdasarkan pendekatan q-to-q, Kinerja Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan I 2025 terhadap triwulan sebelumnya juga mengalami kontraksi sebesar 2,27 persen (q-to-q). Kontraksi ini disumbang dari sisi produksi, lapangan usaha Konstruksi yang mengalami kontraksi terdalam tertinggi sebesar minus 10,55 persen hal ini diindikasikan karena di awal triwulan I 2025 masih sedikit pekerjaan proyek pemerintah, karena adanya efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan

penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi tertinggi sebesar minus 25,92 persen akibat perlambatan belanja pemerintah pada sejumlah Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan lainnya. Hal ini tidak lepas dari adanya beberapa penyesuaian anggaran karena adanya kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran.

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan I 2025 didominasi oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,51 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yakni sebesar 5,59 persen. Pertumbuhan di triwulan I 2025 disebabkan oleh Meningkatnya sektor perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat di Bengkulu, hal ini dalam rangka untuk modal usaha masyarakat dalam menggerakkan perekonomian.

Grafik 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi- Provinsi Regional Sumatera Triwulan I Tahun 2025 secara y-on-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 (diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera pada Triwulan I 2025 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,85 persen. Secara spasial, Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan (y-on-y) tertinggi di Pulau Sumatera, yakni sebesar 5,47 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu menempati posisi ke 4 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 4,84 persen.

Secara spasial, struktur perekonomian di Pulau Sumatera pada Triwulan I 2025 masih didominasi oleh provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi

terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,57 persen; diikuti Provinsi Riau sebesar 23,33 persen; dan Sumatera Selatan sebesar 13,58 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu hanya memiliki kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 2,11 persen (terendah se-Sumatera).

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada Triwulan I 2025 tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu investasi (pengaruh terbesar), belanja pemerintah, serta ekspor nonmigas. Pada beberapa provinsi di Sumatera, sektor pertanian dan industri pengolahan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama karena penguatan investasi di sektor-sektor tersebut. Di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, sektor jasa, terutama akomodasi dan makanan-minuman, tumbuh cukup kuat berkat meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi lokal.

Di Provinsi Bengkulu sendiri pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya konsumsi Masyarakat pada Ramadhan 1446 H dan HKBN serta peningkatan panen padi dan holtikultura selama bulan April 2024 s.d. bulan Maret 2025.

1.1.1.3 PDRB Berdasarkan Pengeluaran

Menurut pengeluaran seluruh komponen PDRB mengalami pertumbuhan positif pada triwulan I 2025 (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada PK-RT sebesar 5,59 persen; diikuti komponen PK-LNPRT sebesar 3,26 persen; komponen PMTB sebesar 1,39 persen; Ekspor Barang dan Jasa berkontraksi sebesar 0,25 persen; dan PK-P berkontraksi sebesar 0,68 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 1,86 persen.

Grafik 1. 5 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran secara q-to-q dan y-on-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 (diolah)

Dari sisi Pengeluaran, PDRB Provinsi Bengkulu triwulan I 2025 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan distribusi terhadap PDRB sebesar 60,01 persen dari total PDRB dan tumbuh 5,59 persen (yoy).

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Kontribusi dan pertumbuhan PK-RT di triwulan I 2025 didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga di seluruh komponen, utamanya Makanan dan Minuman, Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Kesehatan dan Pendidikan, Transportasi dan Komunikasi serta Restoran dan Hotel. Pertumbuhan ini sejalan dengan Peningkatan aktivitas organisasi kebudayaan dan pariwisata di Bengkulu.

Impor Barang dan Jasa

Komponen Impor barang dan Jasa menjadi pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran, pada Triwulan I 2025 berkontribusi sebesar 47,24 persen dari total PDRB Provinsi Bengkulu dan tumbuh 1,86 persen (yoy). Meskipun sedikit mulai ada aktivitas impor barang dari luar negeri, namun kebutuhan konsumsi dipenuhi dari aktivitas impor dari wilayah lain seperti kebutuhan konsumsi rumah tangga, bahan-bahan konstruksi, dan kendaraan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB pada Triwulan I 2025 berkontribusi sebesar 35,19 persen dari total PDRB dan tumbuh 1,39 persen (yoy). Meskipun ada beberapa anggaran yang terkena efisiensi namun Pertumbuhan PMTB ini masih didukung oleh beberapa proyek yang belum selesai di akhir tahun 2024, seperti Masih terus berjalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Trans Enggano dan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Benteng Kobema; Proyek pembangunan rumah sakit, pelabuhan perikanan dan jalan/jembatan/irigasi di kabupaten/kota.

Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa pada Triwulan I 2025 berkontribusi sebesar 33,91 persen dari total PDRB dan berkontraksi 0,25 persen (yoy). Penurunan aktivitas ekspor ini tidak lepas dari beberapa permasalahan yang ada di Bengkulu yaitu pendangkalan alur di pelabuhan pulau Bai sehingga proses pengiriman hasil-hasil produksi yang akan diekspor terganggu.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

Komponen Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2025 berkontribusi sebesar 15,7 persen dari total PDRB Bengkulu dan berkontraksi 0,68 persen (yoy). penurunan PK-P ini tidak lepas dari adanya kebijakan



efisiensi anggaran di awal tahun, sehingga beberapa unit di pemerintah harus melakukan penyesuaian kegiatannya, hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya.

Pengeluaran Konsumsi LNPR

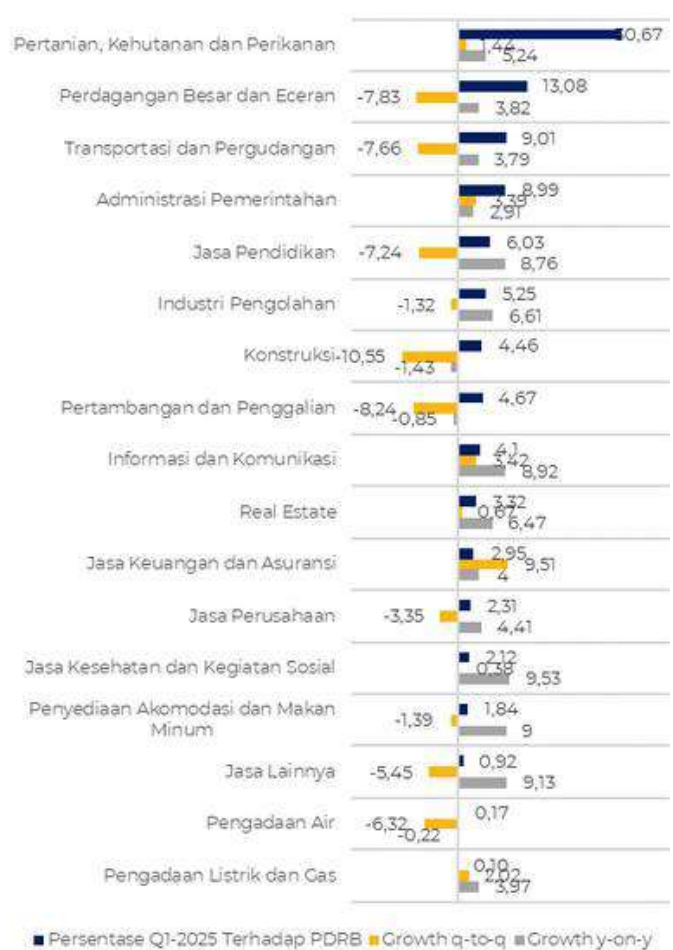
Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR pada triwulan I 2025 berkontribusi sebesar 2,47 persen dari PDRB dan tumbuh cukup signifikan dibanding komponen pembentuk PDRB lainnya yaitu sebesar 3,26 persen (yoy). Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi LNPR tersebut tumbuh sejalan dengan Meningkatnya volume dan nilai listrik yang disalurkan pada kategori pelanggan sosial; dan Pelaksanaan berbagai event di Bengkulu seperti kegiatan musyawarah wilayah (muswil), musyawarah cabang (muscab) dan rapat konsolidasi mendorong peningkatan aktivitas organisasi kebudayaan, organisasi sosial.

1.1.1.4 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

struktur perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan lapangan usaha **masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang sebesar 30,67 persen terhadap total PDRB**, dengan pertumbuhan tahunan (year-on-year) sebesar 5,24 persen. Sektor ini diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi 13,08 persen, serta sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Secara keseluruhan, ketiga sektor utama tersebut memberikan kontribusi sebesar 52,76 persen terhadap total perekonomian daerah, menunjukkan peran sentralnya dalam mendukung aktivitas ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan I-2025 dibanding Triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,84 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha (14 lapangan usaha). **Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan y-o-y terdalam adalah Konstruksi sebesar minus 1,43 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 0,85 persen; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar minus 0,22 persen.** Sementara itu, tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan y-o-y tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,53 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 9,13 persen, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9 persen. Adapun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen.

Grafik 1. 6 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha secara q-to-q dan y-on-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 (diolah)

Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada Triwulan I Tahun 2025, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi sektor dominan dalam struktur ekonomi Provinsi Bengkulu, dengan kontribusi sebesar 30,67 persen terhadap PDRB dan mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan, antara lain: jagung dan ubi kayu; komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat yang mengalami panen raya berkat kondisi cuaca yang mendukung dan minim serangan hama; dimulainya musim panen kopi; serta peningkatan produksi peternakan berupa telur dan daging ayam. Selain itu, panen raya ikan air tawar seperti lele, nila, dan mas, serta hasil tangkapan ikan laut seperti tamban (sejenis sarden) turut memberikan kontribusi positif. Namun demikian, laju pertumbuhan sektor ini sedikit tertahan oleh penurunan produksi padi akibat serangan hama dan terbatasnya produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dipengaruhi oleh musim kemarau.





Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada Triwulan I Tahun 2025, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sebesar 9,00 persen secara tahunan (year-on-year), meskipun kontribusinya terhadap total PDRB masih terbatas, yaitu sebesar 1,84 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel, serta bertambahnya aktivitas konsumsi dan permintaan jasa akomodasi yang dipicu oleh penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti musyawarah wilayah (muswil), musyawarah cabang (muscab), dan rapat konsolidasi di berbagai daerah.

Jasa Lainnya

Lapangan Usaha Jasa Lainnya menempati posisi kedua sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 9,13 persen (year-on-year), meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil, yaitu sebesar 0,92 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas organisasi sosial dan profesi, seiring dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti musyawarah wilayah (muswil), musyawarah cabang (muscab), serta rapat konsolidasi yang berlangsung selama periode tersebut.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi pada Triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4 persen (yoy) dan berkontribusi sebesar 2,95 persen terhadap PDRB, pertumbuhan ini didukung oleh: Meningkatnya output perbankan yang meliputi pendapatan utama, pendapatan sekunder dan provisi/komisi; Meningkatnya pembiayaan dari bank maupun nonbank; dan Meningkatnya jumlah investor pada perusahaan efek dan nilai transaksi saham.

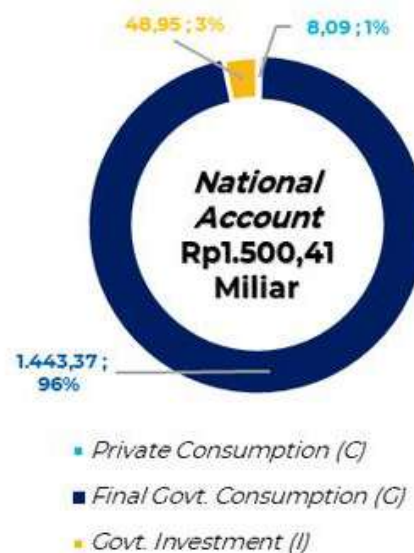
Industri Konstruksi

Berbeda dengan seluruh lapangan usaha lainnya, Lapangan Usaha Konstruksi pada Triwulan I 2025 justru mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 1,43 persen (yoy) yang disebabkan oleh: adanya perlambatan pelaksanaan beberapa proyek-proyek pemerintah karena adanya efisiensi anggaran, sehingga beberapa instansi pemerintah yang mempunyai rencana kegiatan konstruksi diawal tahun menunda atau membatalkannya karena harus menyesuaikan alokasi anggaran yang dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas. Lapangan usaha Konstruksi berkontribusi cukup signifikan terhadap total PDRB yaitu sebesar 4,46 persen.

1.1.2 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB

Kontribusi Fiskal atau pengeluaran pemerintah terhadap PDRB adalah bagian dari komponen pengeluaran yang menunjukkan peran belanja publik dalam membangun dan mengembangkan perekonomian suatu daerah. Dalam perhitungan PDRB dari sisi pengeluaran, kontribusi fiskal mencakup anggaran yang digunakan pemerintah untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, serta program kesejahteraan sosial.

Grafik 1. 7 Kontribusi Belanja APBN dan APBD Terhadap Sektor Riil Ekonomi Bengkulu Triwulan I 2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: Laporan ALCo Realisasi s.d. 31 Maret 2025, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu (diolah)

Perhitungan PDRB dirumuskan dengan $Y = C + I + G + NX$. Belanja fiskal Pemerintah yang berkontribusi terhadap PDRB setidaknya berasal dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) yang diproyeksikan oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) dan belanja investasi (I) yang diproyeksikan oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Peran pemerintah dalam hal ini tercermin melalui APBN dan APBD, yang berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pembentukan PDRB.

1. Hingga 31 Maret 2025, operasi pemerintah di regional memberikan kontribusi sebesar Rp1.500,41 miliar pada sektor riil, dengan belanja pemerintah sebesar Rp1.443,37 miliar sebagai komponen terbesar. Ekspansi moneter mencapai Rp65,15 miliar, diikuti dengan peningkatan jumlah uang beredar. Pada sektor eksternal, neraca pembayaran mencatat kontribusi sebesar Rp0,0244 miliar.



2. Pendapatan pemerintah mencapai Rp359,16 miliar pada Maret, terutama dari pajak korporasi sebesar 70,33% dari total penerimaan perpajakan. Sementara itu, belanja pemerintah meningkat menjadi Rp1.611,00 miliar, dengan defisit yang juga naik menjadi Rp1.008,01 miliar.

Grafik 1.8 Perbandingan Distribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Triwulan I Tahun 2025 secara y-on-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 (diolah)

Berdasarkan pendekatan di atas, belanja pemerintah di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2025 berkontribusi terhadap pembentukan PDRB (ADHB) paling sedikit sebesar Rp1.500,41 miliar yang berasal dari penjumlahan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (P-KP) sebesar Rp1.443,37 miliar dan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp57,04 miliar.

Jika dibandingkan triwulan I 2025 dengan triwulan I 2024 (y-on-y), kontribusi pemerintah pada komponen PK-P mengalami kenaikan 0,08 persen poin. Namun mengalami penurunan pada komponen PMTB sebesar 0,95 persen poin. Dari dua komponen kontribusi pengeluaran Pemerintah dalam pembentukan PDRB Bengkulu di triwulan I 2025, komponen PMTB memiliki kontribusi lebih besar daripada komponen P-KP. Hal ini didorong oleh Masih berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai proyek konstruksi kontrak tahun jamak (multiyears) seperti Trans Enggano dan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Benteng Kobema; Proyek pembangunan rumah sakit, pelabuhan perikanan dan jalan/jembatan/irigasi di kabupaten/kota; Meningkatnya realisasi belanja modal (APBN) untuk Jalan, Jaringan, dan Irigasi, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (P-KP) di atas meliputi belanja pegawai ditambah belanja penyusutan sebesar 20 persen dari belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja konsumsi rumah tangga berasal dari belanja pemerintah total sampai dengan periode triwulan I 2025 dikurangi belanja P-KP dan belanja modal pemerintah pembentuk PMTB. Sementara PMTB merupakan realisasi belanja pemerintah untuk belanja modal.

1.1.3 Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Analisis inflasi dibutuhkan untuk memahami keseimbangan ekonomi dan melihat kemampuan daya beli serta kesejahteraan Masyarakat di suatu regional. Pada tahun 2024, BPS Provinsi Bengkulu menambah daerah yang menjadi wilayah pemantauan inflasi, yang pada awalnya hanya Kota Bengkulu bertambah 1 Kabupaten lain yaitu Kabupaten Mukomuko.

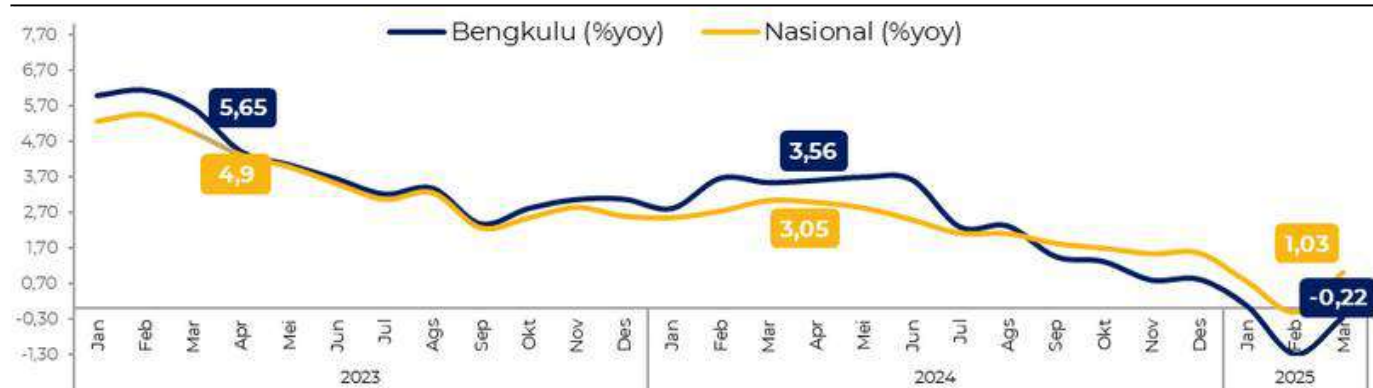
Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Maret 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Daerah Perhitungan Inflasi	Apr-25		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
Kabupaten Muko Muko	105,61	-0,83	1,27
Kota Bengkulu	106,23	-0,01	1,29
Provinsi	106,07	-0,22	1,28

Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor19/04/17/Th. XXVII, 8 April 2025 (diolah)



Grafik 1. 9 Tren Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2025 secara y-o-y (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 24/05/17/Th. XXVII, 2 Mei 2025 (diolah)

Pada bulan Maret 2025, Provinsi Bengkulu mengalami deflasi dari tahun ke tahun (y-o-y) sebesar 0,22 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 106,07 Diwakili oleh tingkat

deflasi y-on-y Kota Bengkulu sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 106,23 dan di Kabupaten Mukomuko Tingkat deflasi sebesar 0,83 persen dengan IHK sebesar 105,61.

Tabel 1. 2 Rincian Andil Inflasi Bulan Maret 2025 per Komoditas 2025 secara y-o-y (Persen)

No	Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
Inflasi Umum		-0,22	-0,22
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,73 ▼	-0,24
2	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,53 ▲	0,34
3	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,98 ▲	0,19
4	Transportasi	0,91 ▲	0,12
5	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-5,34 ▼	-0,81
6	Pendidikan	1,91 ▲	0,10
7	Kesehatan	3,35 ▲	0,07
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,12 ▲	-0
9	Pakaian dan Alas Kaki	1,19 ▲	0,06
10	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,73 ▼	-0,03
11	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,41 ▼	-0,02

Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor19/04/17/Th. XXVII, 8 April 2025 (diolah)

Penyumbang utama inflasi deflasi Maret 2025 secara y-on-y adalah:

1. Kelompok Makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi 0,24 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah sebesar 0,53, daging ayam ras
2. Kelompok Perumahan, Air dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil deflasi 0,81 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif Listrik sebesar 0,81 persen.

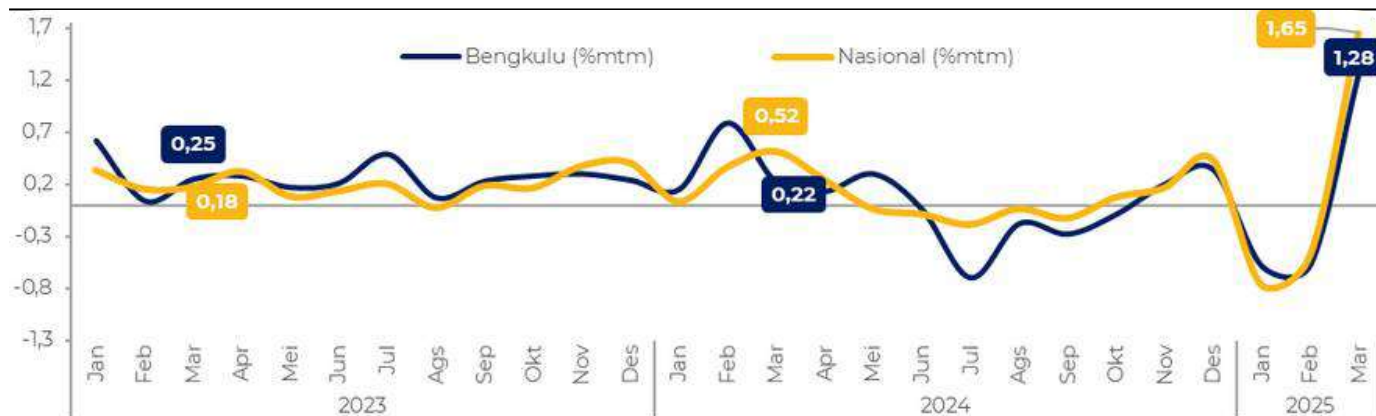
“APBN 2025 merupakan instrumen demokrasi yang penting, disusun dengan menghormati hak budget DPR dan konsultasi dengan DPD. APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian secara efektif dan berkeadilan.”

— Pidato Menteri Keuangan Sri Mulayni Indrawati, Pengesahan RUU APBN 2025 di DPR RI, September 2024 —





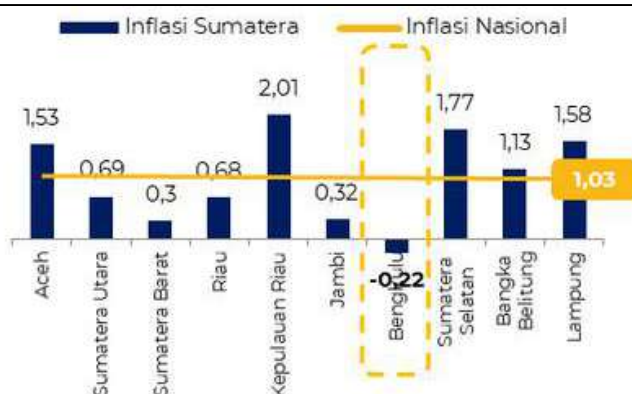
Grafik 1.10 Tren Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2025 secara *m-to-m* (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor19/04/17/Th. XXVII, 8 April 2025 (diolah)

Pada bulan Maret 2025 Tingkat inflasi m-to-m Provinsi Bengkulu sebesar 1,28 persen, deflasi terjadi penurunan IHK dari 106,30 pada Maret 2024 menjadi 106,07 pada Maret 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 1,28 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,10 persen. **Deflasi pada Maret 2025 didorong oleh** menurunnya harga komoditas makanan, minuman dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,730 persen, adapun komoditas penyumbang deflasi antara lain cabai merah, tomat, cabai rawit, telur ayam ras dan wortel yang sedang musim panen di sejumlah daerah sehingga mendorong ketersediaan stok, dan menyebabkan penurunan harga.

Grafik 1.11 Inflasi pada 10 Provinsi di Regional Sumatera per Maret 2025 secara *y-on-y* (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 (diolah)

Inflasi di Provinsi Bengkulu pada bulan Maret 2025 berada pada peringkat terakhir di Regional Sumatera. Tiga kelompok terbesar yang menjadi penyumbang terbesar deflasi pada bulan Maret 2025 adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 0,07 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya naik sebesar 0,36 persen; serta kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran naik sebesar 0,19 persen.

Grafik 1.12 Komoditas Penyumbang Utama Inflasi/Deflasi Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2025 Menurut Kelompok Pengeluaran secara *y-on-y* (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 19/04/17/Th. XXVII, 8 April 2025 (diolah)

Selanjutnya, jika dilihat dari rincian komoditas dengan andil deflasi terbesar bulan Maret 2025 (yoy) didominasi oleh cabai merah (0,53 persen), Daging ayam ras (0,23) dan Beras (0,17). **Hal tersebut dipengaruhi oleh panen raya padi dan hortikultura di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu.**

Salah satu upaya dalam menekan laju inflasi di Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan 9 (Sembilan) Langkah strategis dalam mengendalikan inflasi, diantaranya adalah:

1. Melaksanakan monitoring serta antisipasi risiko perubahan cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi komoditas pangan strategis;
2. TPID diwajibkan melaksanakan pemantauan stok pangan menjelang momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri 2025;



- Memantau hasil TPID beberapa triwulan terakhir untuk dijadikan acuan dalam menjaga stabilitas inflasi;
- Mempersiapkan program unggulan untuk dilaporkan dalam laporan tahunan TPID;
- Perlunya penyusunan peta jalan TPID 2025-2027 Provinsi Bengkulu dan kabupaten kota;
- Mendorong setiap kabupaten kota untuk melaksanakan kerja sama antar daerah (KAD);
- Mendorong setiap kabupaten kota untuk membentuk kios pangan bekerja sama dengan pedagang yang berlokasi di pasar utama dalam rangka pengendalian inflasi;
- Mendorong optimalisasi penggunaan BTT untuk pengendalian inflasi; dan

- Mendorong identifikasi, pencatatan dan implementasi penggunaan APBD untuk program pengendalian inflasi pada setiap organisasi perangkat daerah.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan inflasi di Provinsi Bengkulu dapat terkendali melalui sinergi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh pihak sehingga dapat memperkuat stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Perhatian penuh terus dilakukan guna menjaga angka inflasi yang sudah baik tersebut tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun, khususnya pada beberapa hal yakni dalam hal produksi pangan, faktor cuaca, distribusi dan hal penting lainnya terkait pengawasan pasar agar tidak ada gejala.

1.1.4 Neraca Perdagangan, Ekspor dan Impor

Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu pada bulan Maret 2025 **surplus** sebesar USD 9,16 juta, turun sebesar 35,27 persen (mtm) dibandingkan Februari 2025 yang sebesar USD14,15 juta (secara bulanan turun). Sedangkan neraca perdagangan pada bulan Maret 2025 mengalami surplus sebesar USD 9,16 juta (yoy), angka ini menunjukkan penurunan sebesar 59,98 persen (yoy) bila dibandingkan Maret 2024 yang sebesar USD22,89 juta (secara tahunan turun). Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu ditopang oleh nilai ekspor, hal ini dikarenakan sejak Maret 2023 hingga Maret 2025 impor barang ke Provinsi Bengkulu masih minim. **Secara kumulatif Selama bulan Januari 2023 - Maret 2025, neraca perdagangan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2023 yaitu surplus sebesar US\$34,88 juta.** Selanjutnya bulan April 2023 yang tercatat surplus US\$32,60juta dan bulan Desember 2023 yang tercatat surplus US\$26,95 juta.

Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Provinsi Bengkulu 2023 s.d Triwulan I 2025 secara m-to-m (Juta USD)



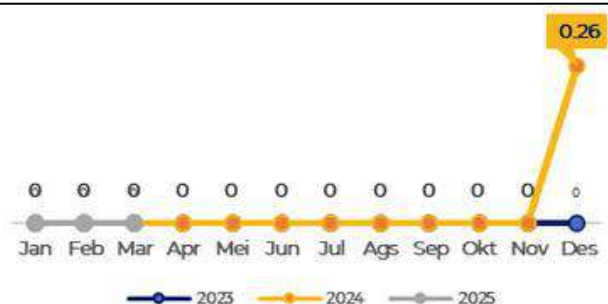
Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 24/05/17/Th. XXVII, 2 Mei 2025 (diolah)

Sedangkan neraca perdagangan terendah terjadi pada bulan Januari 2023 yang tercatat mengalami surplus mencapai US\$6,75 juta.

Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu pada Maret 2025 mengalami penurunan sebesar 59,98 persen dibandingkan Maret 2024, dan turun 63,74 persen dibandingkan Maret 2023.

Total nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2025 senilai USD42,5. Pada bulan Maret 2025, Nilai total ekspor Maret 2025 mengalami penurunan sebesar 35,25 persen jika dibandingkan dengan bulan Februari 2025 yang tercatat sebesar US\$14,15 juta. Penurunan ekspor pada Maret 2025 dibandingkan bulan sebelumnya 2025 (mtm) dikarenakan Ekspor Provinsi Bengkulu pada Maret 2025 mengalami penurunan sebesar 35,25 persen jika dibandingkan dengan ekspor pada Februari 2025. Penurunan ekspor ini dikarenakan ekspor komoditas batubara turun hingga 41,06 persen, dan ekspor lintah turun sebesar 17,86 persen.

Grafik 1.15 Perkembangan Impor Provinsi Bengkulu 2023–2025 (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 24/05/17/Th. XXVII, 2 Mei 2025 (diolah)

Nilai impor Provinsi Bengkulu bulan Desember 2024 mencapai US\$ 0,26 juta, nilai ini tidak dapat dibandingkan dengan bulan lalu ataupun tahun lalu, karena sejak September 2021 tidak ada impor ke Provinsi Bengkulu. Komoditas yang diimpor Provinsi Bengkulu adalah mesin dan peralatan mekanis. Komoditas tersebut diimpor dari Negara Malaysia melalui pelabuhan Pulau Baai dengan nilai impor sebesar US\$0,19 juta (73,01 persen) dan melalui pelabuhan Bengkulu dengan nilai impor sebesar US\$0,07 juta (26,99 persen).

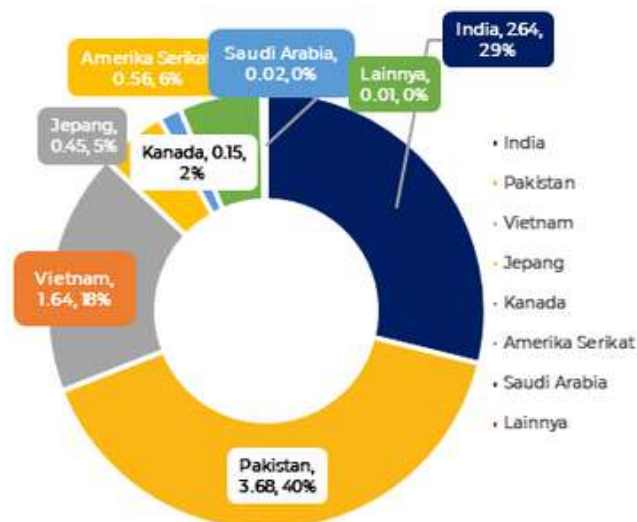
Grafik 1.16 Kontribusi Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Komoditas Februari 2025 dan Maret 2025 (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 24/05/17/Th. XXVII, 2 Mei 2025 (diolah)

Komoditas yang diekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Maret 2025 yaitu batubara sebesar US\$7,96 juta (86,91 persen), karet sebesar US\$1,16 juta (12,69 persen), lintah sebesar US\$2,21 ribu (0,02 persen) dan komoditas lainnya sebesar US\$0,03 juta (0,38 persen). Komoditas yang diekspor provinsi Bengkulu di bulan Maret tahun 2025 adalah batubara, gaharu, karet, serangga, lintah, batu kerikil alam, kerupuk gurita, pakaian dan aksesorisnya, dan paket pos lainnya. Pada bulan Maret 2025 tidak ada ekspor cangkang sawit dari Provinsi Bengkulu.

Grafik 1.17 Perkembangan Impor Provinsi Bengkulu 2023–2025 (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 24/05/17/Th. XXVII, 2 Mei 2025 (diolah)

Nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada Bulan Maret 2025 menurut asal negara didominasi oleh Pakistan sebesar US\$3,68 juta (40,22 persen), India sebesar US\$2,64 juta (28,79 persen), Vietnam sebesar US\$1,64 juta (17,93 persen), Amerika Serikat sebesar US\$0,56 juta (6,08 persen), Jepang sebesar US\$0,45 juta (4,96 persen), Kanada sebesar US\$0,15 juta (1,68 persen), Saudi Arabia sebesar US\$0,02 juta (0,24 persen), dan negara lainnya sebesar US\$ 0,01 juta (0,11 persen).

“Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah tiga persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga. Dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintahan baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya.”

— Menteri Keuangan pada Rapat Terbatas Kabinet, Mei 2025

1.2 Analisis Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan Masyarakat, mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Dalam mengukur keberhasilan dan menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan Pembangunan suatu daerah, diperlukan indikator sebagai parameter seperti **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, **Tingkat Kemiskinan**, **Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)**, **Tingkat Pengangguran**, **Nilai Tukar Petani (NTP)**, dan **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**. Kondisi kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bengkulu sepanjang triwulan IV tahun 2024 terus mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, IPM < 60 (rendah), $60 \leq \text{IPM} < 70$ (sedang), $70 \leq \text{IPM} < 80$ (tinggi), $\text{IPM} \geq 80$ (sangat tinggi). IPM mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM Bengkulu telah berada pada kategori “tinggi” sejak 2020, dengan rata-rata peningkatan 0,67 persen per tahun, dari 72,93 pada 2020 menjadi 74,91 pada 2024.

Grafik 1. 18 Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, Nasional, dan Target Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/17/Th. XVI, 2 Desember 2024 (diolah)

Pertumbuhan IPM Bengkulu pada tahun 2024 tumbuh sebesar 0,82 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0,84 persen. Namun angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode 2020-2023 yang sebesar 0,62 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional yang mencapai 75,02 di tahun 2024. Meski demikian, IPM Bengkulu pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Bengkulu 2021-2026 yaitu sebesar 71,80.

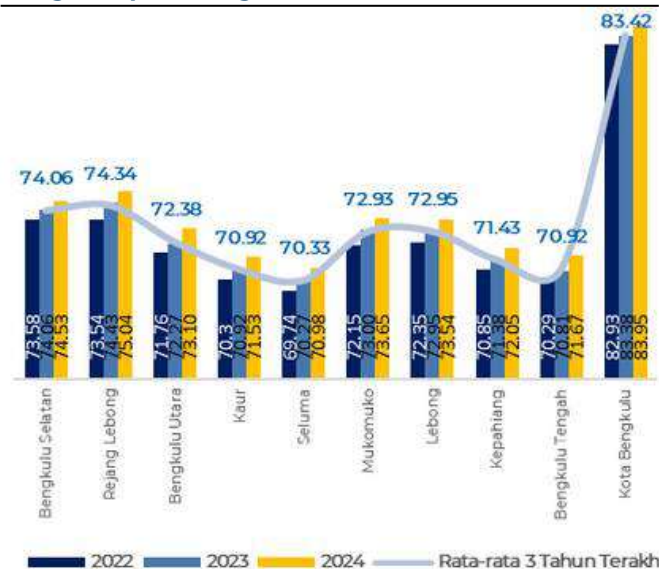
Grafik 1. 19 Perbandingan IPM Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/17/Th. XVI, 2 Desember 2024 (diolah)

Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, IPM Bengkulu berada pada peringkat ke-6 ditahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun IPM Bengkulu terus mengalami peningkatan, posisinya masih relatif lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain di regional Sumatera. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan dimensi pengetahuan dan standar hidup layak.

Grafik 1. 20 Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu per Kategori IPM Tahun 2022 – 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/17/Th. XVI, 2 Desember 2024 (diolah)

Analisis Pencapaian Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Selama 2020–2024, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori IPM “Tinggi” dan “Sangat Tinggi”. Kota Bengkulu menjadi satu-satunya daerah dengan status “Sangat Tinggi” (≥ 80) dengan rata-rata IPM 83,42, sedangkan Kabupaten Seluma tercatat sebagai yang terendah dengan rata-rata IPM 70,33. Pada 2024, pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 1,21 persen, dan terendah di Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 0,63 persen. Secara umum, pertumbuhan IPM 2024 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020–2023.

Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Bengkulu 2020-2024

Peningkatan IPM tahun 2024 didorong oleh peningkatan semua dimensi penyusunnya, terutama dimensi pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan (ribu rupiah), mengalami peningkatan 561 ribu rupiah tumbuh 5,02 persen dibandingkan tahun 2023 dan Umur Harapan Hidup saat Lahir/UHH (tahun) mengalami peningkatan sebesar 0,20 tahun tumbuh 0,27 persen dibandingkan tahun 2023.

Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,44 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,07 persen dan Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 1,35 persen dibanding tahun sebelumnya 0,45 persen.

Tabel 1. 3 IPM Provinsi Bengkulu Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2022 – 2024

Dimensi/ Indikator	Satuan	2022	2023	2024	Nasional 2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	72,90	73,11	73,31	74,15
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,68	13,77	13,75	13,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,91	9,03	9,04	8,85
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	10.840	11.172	11.733	12.341
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,68	74,30	74,91	75,02

Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 72/12/17/Th. XVI, 2 Desember 2024 (diolah)

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2022 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,72 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pada tahun 2024 mencapai 73,31 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,20 tahun atau 0,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 73,31 tahun.

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan dalam IPM diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang keduanya terus meningkat. Selama 2022–2024, HLS Bengkulu tumbuh rata-rata 0,26 persen per tahun, dan RLS sebesar 0,56 persen per tahun. Pada 2024, HLS mencapai 13,75 tahun dan RLS sebesar 9,04 tahun, mencerminkan meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita per tahun (d disesuaikan), yang pada 2024 di Provinsi Bengkulu mencapai Rp11,73 juta, meningkat 5,02 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta dampak positif dari berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.

Upaya Pemerintah dalam Peningkatan IPM Bidang Kesehatan dan Pendidikan di Provinsi Bengkulu

Pemerintah melalui APBN dan APBD mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mendukung peningkatan IPM di Provinsi Bengkulu, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Hingga Triwulan IV 2024, realisasi belanja fungsi kesehatan mencapai 98,41 persen dari pagu Rp158,87 miliar, difokuskan pada layanan kesehatan masyarakat, SDM kesehatan, dan pengendalian penyakit. Sementara itu, belanja fungsi pendidikan terealisasi sebesar 97,58 persen dari pagu Rp1.310 miliar, diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Selain itu, melalui TKD, DAK Non Fisik untuk BOS terealisasi 99,88 persen dari Rp426,24 miliar, BOP PAUD 99,40 persen dari Rp30,49 miliar, dan BOP Kesetaraan 93,74 persen dari Rp15,37 miliar.





Berikut beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan IPM di Provinsi Bengkulu, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan:

a. Bidang Kesehatan

1. Peningkatan Akses dan Fasilitas Kesehatan. Seperti Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, pembangunan dan revitalisasi rumah sakit serta puskesmas di berbagai daerah, termasuk di wilayah terpencil dan penyediaan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan anggaran yang berasal dari APBD tahun 2024 sebesar Rp1,301 miliar.
2. Program Gizi dan Pencegahan Stunting. Seperti Program Bengkulu Bebas Stunting, yang fokus pada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dengan anggaran yang berasal dari APBD tahun 2024 sebesar Rp991,08 juta. Dan Penyuluhan gizi di posyandu dan puskesmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Tenaga Kesehatan. Seperti Penempatan dokter dan tenaga medis di daerah terpencil melalui program dokter internship dan Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan.
4. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan anggaran yang berasal dari APBD tahun 2024 sebesar Rp38.750 miliar.

b. Bidang Pendidikan

1. Peningkatan Akses dan Infrastruktur Pendidikan. Seperti renovasi dan pembangunan sekolah, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk meningkatkan fasilitas belajar.
2. Beasiswa dan Bantuan Pendidikan. Seperti Program Beasiswa Bengkulu Cerdas untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dengan anggaran sebesar dan Bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP.
3. Peningkatan Kualitas Guru dan Kurikulum. Seperti Pelatihan berkala bagi guru dalam pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran inovatif.

Dan Penguatan kurikulum berbasis keterampilan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan sekolah menengah.

4. Digitalisasi Pendidikan. Seperti Penyediaan akses internet gratis di sekolah-sekolah untuk mendukung pembelajaran digital. Dan Program Sekolah Digital untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-mengajar.

Upaya pemerintah Bengkulu dalam meningkatkan IPM di bidang kesehatan dan pendidikan menunjukkan progres yang positif. Namun, tantangan seperti akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil, kualitas tenaga pengajar, serta ketimpangan fasilitas pendidikan masih perlu terus diatasi. Program-program yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat harus terus ditingkatkan guna mencapai IPM yang lebih tinggi di masa depan.

1.2.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting dalam mengukur kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara atau daerah. Penentuan tingkat kemiskinan melibatkan identifikasi garis kemiskinan, yang merupakan ambang batas pendapatan atau pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

Pada September 2024, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan Rp672.816,00/kapita/bulan) di Provinsi Bengkulu mencapai 12,52 persen (261,15 ribu orang), berkurang sebesar 1,04 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 13,56 persen (281,36 ribu orang).

“APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dari sisi makro.”

— Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan pada Sarasehan Ekonomi Perang Dagang, April 2025





Grafik 1. 21 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/17/Th. XII, 15 Januari 2025 (diolah)

Analisis Tingkat Kemiskinan Provinsi Bengkulu dalam 3 Tahun Terakhir

Selama lima tahun terakhir periode Maret 2020–September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada Maret 2020–Maret 2021 sempat mengalami kenaikan setelah cukup lama melandai meskipun secara persentase di Maret 2021 mengalami penurunan namun secara jumlah stagnan. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode ini disebabkan oleh adanya pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19. Sementara itu pada September 2021–September 2024 kembali turun sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian, kecuali pada Maret 2022.

Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan namun angka masih berada di atas angka kemiskinan Nasional sebesar 8,57 persen. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Bengkulu yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2024 berkisar 13,5–14 persen, persentase penduduk miskin di Bengkulu (12,52 persen), berhasil menurunkan kemiskinan dibawah target yang tertuang pada RPJMD Tahun 2021–2026.

Analisis Perkembangan tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Bengkulu terhadap Nasional

Menurut BPS, Perkembangan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada September 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 8,57 persen, menurun sebesar 0,46 persen poin dibandingkan Maret 2024. Jumlah penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 24,06 juta orang, berkurang sekitar 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024. Data spesifik mengenai persentase kemiskinan ekstrem (penduduk dengan pengeluaran di bawah USD 1,9 PPP per hari) per September 2024 belum tersedia secara publik. Bila mengacu pada data Tingkat Kemiskinan Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 0,83 persen.

Secara khusus di Provinsi Bengkulu, terjadi penurunan yang konsisten dalam tingkat kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2017, angka kemiskinan ekstrem berada di 9,19 persen, dan berhasil diturunkan menjadi 2,08 persen pada tahun 2023 turun sebesar 1,39 persen. Penurunan ini menjadi prestasi luar biasa bagi Provinsi Bengkulu sebagai Provinsi dengan Penurunan Angka Kemiskinan Se-Indonesia. Dilihat dari kondisi wilayah, Kabupaten Seluma menjadi Kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi di Provinsi Bengkulu, yakni mencapai 3,71 persen.

Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai sinergi dan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem, seperti pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Grafik 1. 22 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/17/Th. XII, 15 Januari 2025 (diolah)



Bila dibandingkan dengan 10 provinsi di Regional Sumatera, Tingkat Kemiskinan Bengkulu pada bulan September 2024 menempati posisi tertinggi ke-2 setelah Provinsi Aceh (12,64 persen). Kemudian, bila dilihat secara Nasional, Tingkat Kemiskinan Bengkulu masih berada diatas nasional 8,57 persen.

Langkah Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial, penyelenggaraan pasar murah, dan penyediaan pangan dengan harga terjangkau. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur seperti program bedah rumah, perbaikan jalan desa, serta menjaga stabilitas harga hasil perkebunan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu menekankan pentingnya peran aktif berbagai pihak dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui optimalisasi peran puskesmas dan posyandu untuk mendeteksi dini indikasi stunting pada anak-anak. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil, di mana angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada September 2024 mengalami penurunan sebesar 1,04 persen dibandingkan dengan Maret 2024, sehingga mencapai 12,52 persen.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga terus berupaya meningkatkan efektivitas program penurunan angka kemiskinan dan stunting dengan melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan perencanaan serta penganggaran. Hal ini bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Secara keseluruhan, melalui berbagai program dan kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait, Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut beberapa program yang telah dilakukan Pemerintah dalam mendukung penurunan Tingkat Kemiskinan Tahun 2024:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp901,365,400.
2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp38,353,181,716.

3. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, DLL) dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp96,660,000.
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp124,975,322.
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp49,284,000.
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp2,429,731,661.
7. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp480,182,895.
8. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp397,698,000.
9. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp1,313,533,900.

1.2.3 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

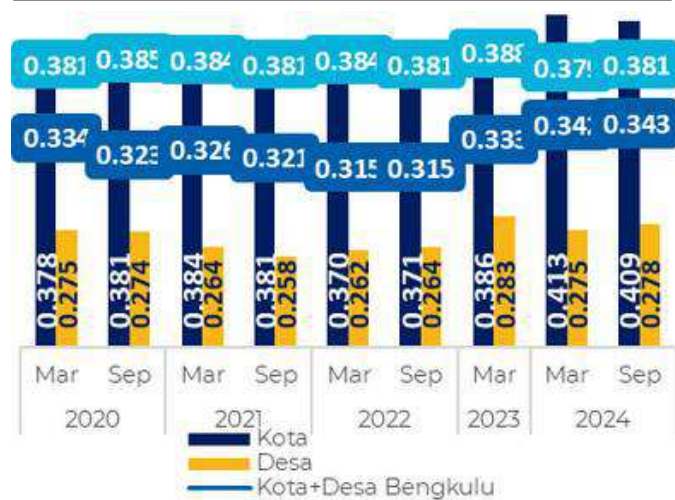
Menurut BPS, Rasio Gini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi, dengan kategori:

< 0,3 → Ketimpangan rendah (relatif merata)

0,3 – 0,39 → Ketimpangan sedang

≥ 0,4 → Ketimpangan tinggi

Grafik 1. 23 Perkembangan Rasio Gini Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/17/Th. XII, 15 Januari 2025 (diolah)

Pada bulan September 2024, Gini Ratio Provinsi Bengkulu sebesar 0,343, berada dibawah angka Rasio Gini Nasional yang pada September 2024 berada di angka 0,381 (Pengeluaran di Provinsi Bengkulu Lebih Merata Sempurna dibandingkan Nasional). Namun bila dibandingkan dengan target Rasio Gini yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, Rasio Gini Provinsi Bengkulu September 2024 lebih tinggi dari target tahun 2024 sebesar 0,328. Nilai ini juga tercatat naik sebesar 0,001 poin, jika dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang artinya ketimpangan pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bengkulu cenderung meningkat.

Bila membandingkan Rasio Gini antara Perkotaan dan Pedesaan, Ratio di daerah perkotaan Bengkulu pada September 2024 tercatat sebesar 0,409, turun 0,004 poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,413. Sementara itu, di daerah pedesaan tercatat sebesar 0,278, naik 0,003 poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,275. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di perkotaan sedikit menurun, sedangkan di pedesaan mengalami sedikit peningkatan.

Grafik 1. 24 Perbandingan Gini Rasio Provinsi Bengkulu dengan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/17/Th. XII, 15 Januari 2025 (diolah)

Gini Rasio Provinsi Bengkulu pada September 2024 menjadi gini rasio yang tertinggi ke-2 di Regional Sumatera setelah Kepulauan Riau yang memiliki nilai Rasio Gini 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Provinsi Bengkulu kurang merata dibandingkan dengan sebagian besar provinsi lain di Sumatera. Ekonomi yang tumbuh tidak secara otomatis mengurangi ketimpangan sosial di suatu wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat dari

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu pada periode September 2024 belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, kelompok berpenghasilan rendah mengalami keterlambatan dalam memperoleh manfaat dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Banyak faktor yang mungkin mempengaruhi, seperti:

1. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti pertanian di pedesaan dan jasa di perkotaan, dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Perbedaan akses dan kualitas layanan dasar
2. antara perkotaan dan pedesaan yang masih timpang. Kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur
3. antara perkotaan dengan pedesaan, sangat memengaruhi peluang ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Langkah Pemerintah Dalam Menurunkan Ketimpangan Pendapatan/ Rasio Gini

Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan ketimpangan ekonomi yang diukur melalui Rasio Gini. Meskipun terjadi peningkatan Rasio Gini pada September 2024 menjadi 0,343 dari 0,342 pada Maret 2024 dan dari 0,333 pada Maret 2023, Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan alokasi subsidi energi oleh pemerintah pusat menjadi Rp551 triliun, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan menahan kenaikan angka kemiskinan.

Selain itu, pemerintah Provinsi Bengkulu juga fokus pada program-program yang mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan infrastruktur di daerah pedesaan, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan menurunkan ketimpangan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Berikut beberapa program yang dilakukan Pemerintah dalam mendukung penurunan Gini Rasio Tahun 2024:

1. Pemberdayaan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp145,620,000.



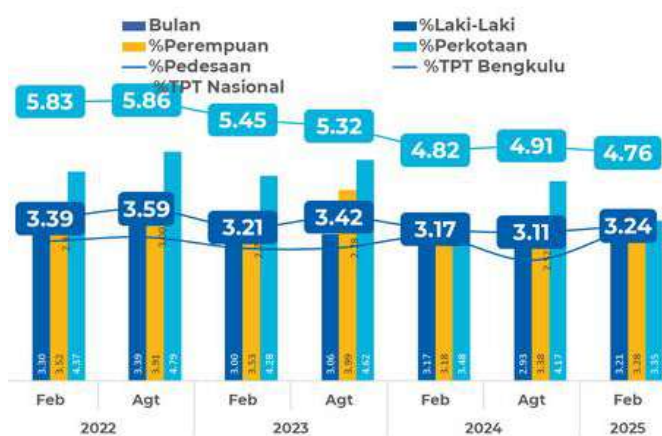


2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp1,723,856,615.
3. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp2,666,493,192.
4. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp2,432,108,852.
5. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Menengah dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp629,675,500.
6. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi anggaran APBD tahun 2024 senilai Rp4,648,364,165.

1.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. **Pengangguran** ialah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 1. 25 Perkembangan TPT Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2025 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 30/05/17/Th. XIX, 5 Mei 2025 (diolah)

Jumlah penduduk usia kerja di Bengkulu pada Februari 2025 mencapai 1.587.188 orang, terdiri dari angkatan kerja sejumlah 1.142.038 orang dan sisanya sebanyak 445.150 orang merupakan bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut terdiri dari 1.105.046 orang yang bekerja dan 36.992 orang (naik 24.302 orang secara yoy) merupakan pengangguran (turun 1.598 orang secara yoy).

TPT Provinsi Bengkulu pada Februari 2025 tercatat sebesar 3,24 persen naik 0,07 persen poin (yoy) dibandingkan Februari 2024 sebesar 3,17 persen.

Dan naik 0,13 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Kenaikan tingkat pengangguran menunjukkan Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tidak terserap ke lapangan pekerjaan.

Indikator Pembangunan TPT dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,3-3,4 persen, sehingga TPT Provinsi Bengkulu Februari 2025 lebih kecil dari target tahun 2025, yang artinya kondisi ketenagakerjaan di Bengkulu mengalami perbaikan, dengan lebih banyak penduduk yang memperoleh pekerjaan dibandingkan proyeksi awal. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, efektivitas program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

TPT Provinsi Bengkulu Februari 2025 ini bila **dibandingkan dengan TPT Nasional Februari 2025 yang berada pada angka 4,76 persen, maka nilai TPT Provinsi Bengkulu berada lebih baik sebesar 1,52 persen poin** (Nilai TPT yang kecil menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja yang baik, di mana sebagian besar angkatan kerja memiliki pekerjaan). Sementara jumlah pengangguran nasional menembus angka 7,28 juta orang pada Februari 2025. Berdasarkan angka pengangguran tersebut maka Provinsi Bengkulu hanya menyumbang 0,5 persen dari total pengangguran tingkat nasional.

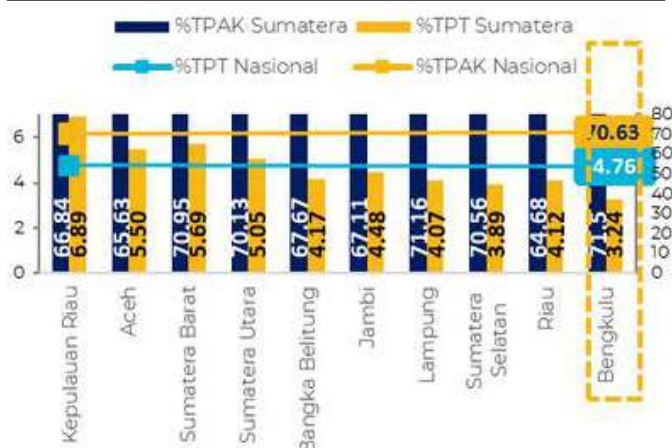
Pada Februari 2025 TPT Provinsi Bengkulu perempuan adalah sebesar 3,28 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki dengan jumlah 3,21 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,05 persen poin dan 0,10 persen poin (yoy). Nilai TPT laki-laki yang lebih rendah tidak hanya diindikasikan bahwa perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan laki-laki dalam populasi angkatan kerja namun bisa dikarenakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki lebih banyak yaitu 84,45 persen dan Perempuan diangka 58,00 persen.





Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah perkotaan Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 3,35 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan yang sebesar 3,18 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penduduk di kota relatif lebih banyak yang belum memperoleh pekerjaan meskipun aktif mencari, dibandingkan dengan penduduk di desa. Jika dibandingkan dengan Februari 2024 (*year-on-year*), TPT di wilayah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,13 persen, sedangkan di wilayah pedesaan justru mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen, yang mengindikasikan adanya pergeseran tantangan ketenagakerjaan antara wilayah urban dan rural.

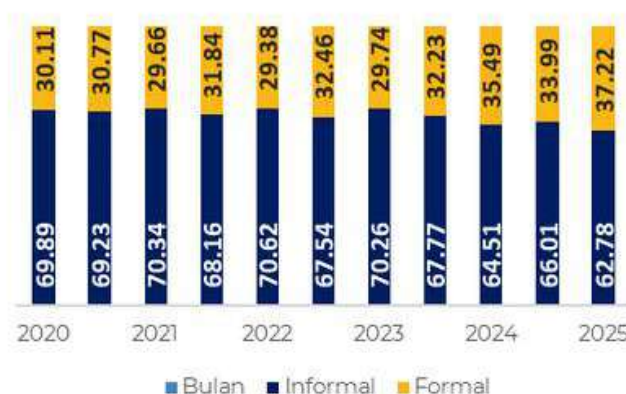
Grafik 1. 26 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan TPT Provinsi Bengkulu dengan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2025 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 30/05/17/Th. XIX, 5 Mei 2025 (diolah)

Hingga periode Februari 2025, Provinsi Bengkulu berhasil mempertahankan posisinya **sebagai daerah dengan TPT terendah di kawasan Sumatera selama lima tahun terakhir**. Capaian ini mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil dan kondusif di tengah dinamika ekonomi regional. Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 71,5 persen, merupakan yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Sumatera, sekaligus melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 70,63 persen. Peningkatan TPAP yang konsisten ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta bahwa ketersediaan lapangan kerja di Bengkulu mampu mengimbangi jumlah pencari kerja, atau setidaknya mendekati titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Grafik 1. 27 Perkembangan Struktur Pekerja Formal dan Informal Tahun 2020-2025 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 30/05/17/Th. XIX, 5 Mei 2025 (diolah)

Komposisi penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama dikelompokkan menjadi kegiatan formal dan informal. Pada Februari 2025, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 411.263 orang (37,22 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 693.783 orang (62,78 persen). Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami penurunan sebesar 1,73 persen poin. Penurunan ini utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

Grafik 1. 28 Porsi Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2025 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 30/05/17/Th. XIX, 5 Mei 2025 (diolah)



Selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, sektor Pendidikan menyerap tenaga kerja sebesar 10,66 ribu orang, jasa lainnya menyerap tenaga kerja sebesar 5,65 ribu orang, dan pertanian (terutama dari perkebunan kopi dan kelapa sawit) menyerap tenaga kerja sebesar 5,29 ribu orang. Ketiga sektor tersebut masih menjadi tiga sektor tertinggi dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Bengkulu. Sedangkan sektor dengan penyerapan terkecil dipegang oleh sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja terbesar dengan pertumbuhan negatif sebesar 3,95 persen (yoy).

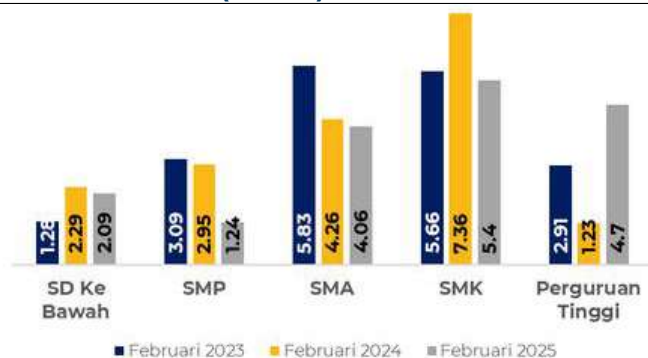
Grafik 1. 29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota di Provinsi Bengkulu (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 30/05/17/Th. XIX, 5 Mei 2025 (diolah)

Pada Agustus 2024, TPT seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2023. TPT tertinggi tercatat di Kota Bengkulu sebesar 5,00 persen dan TPT terendah di Kabupaten Kepahiang sebesar 2,37 persen.

Grafik 1. 30 TPT Menurut Pendidikan Februari 2022 s.d Februari 2025 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 30/05/17/Th. XIX, 5 Mei 2025 (diolah)

Menurut data tiga tahun terakhir, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tren positif secara umum terlihat pada penurunan pengangguran di sebagian besar kelompok pendidikan, terutama SMK, SMA, dan SD ke bawah.
2. Lulusan Diploma menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga perlu ada strategi peningkatan kompetensi dan perluasan lapangan kerja.
3. Tantangan terbesar tetap pada lulusan pendidikan menengah dan tinggi, karena angka pengangguran di tingkat SMA, SMK, dan Diploma masih cukup tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Hal ini dapat juga mengindikasikan penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 33,13 persen atau 366,15 orang. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2024 hampir separuh penduduk bekerja (49 persen) berpendidikan SMP & SD ke bawah.

Langkah Pemerintah Dalam Menurunkan Ketimpangan Pengangguran

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran di daerah. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK): Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengadakan pelatihan berbasis kompetensi di BLK. Program ini bertujuan a. meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif di pasar kerja. Pelatihan mencakup berbagai bidang, termasuk keahlian teknis dan manajerial.
2. Program Magang ke Jepang: Sebagai upaya mengurangi angka pengangguran, pemerintah memfasilitasi pencari kerja untuk mengikuti program magang ke Jepang. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja internasional dan meningkatkan keterampilan peserta.
3. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pelatihan Kerja: Pemerintah mendorong pemanfaatan dana desa untuk program pelatihan kerja melalui BLK. Langkah ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengatasi pengangguran di tingkat desa dengan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.

4. Penyelenggaraan *Job Fair*: Pemerintah Provinsi Bengkulu secara rutin menggelar acara *Job Fair* untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
5. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD): Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, menyusun RTKD untuk memetakan kondisi tenaga kerja dan merencanakan strategi penanggulangan pengangguran selama lima tahun ke depan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.
6. Kursus Bahasa Jepang: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah menyelenggarakan pelatihan kursus bahasa Jepang. Tujuannya adalah memberikan keterampilan bahasa kepada pencari kerja, sehingga mereka memiliki peluang untuk bekerja di Jepang dan mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.

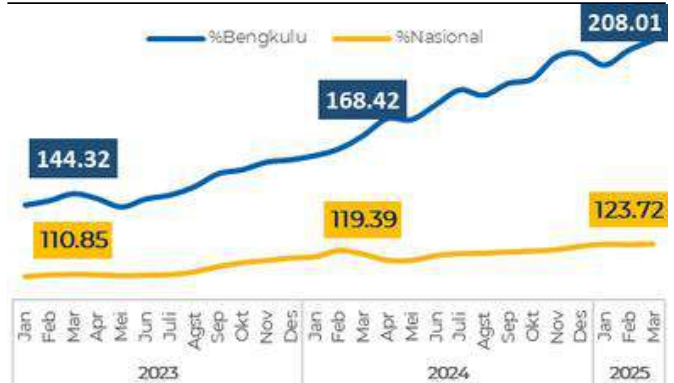
1.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kesejahteraan dan daya beli petani di suatu wilayah, NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi guna merumuskan kebijakan pembangunan di sektor pertanian. Nilai ini didapatkan dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai tersebut dipengaruhi oleh produktivitas, permintaan, harga komoditas, harga barang konsumsi, hargapupuk, serta biaya operasi/produksi lain seperti upah dan modal kerja.

NTP Provinsi Bengkulu Maret 2025 berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan sebesar 208,01 atau naik 2,00 persen dibanding NTP bulan sebelumnya Februari 2025 yang senilai 203,93 persen. Peningkatan NTP pada Maret 2025 disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 2,78 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik lebih rendah sebesar 0,77 persen. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan kemampuan tukar komoditas hasil pertanian dengan barang dan jasa konsumsi petani

yang diperlukan untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan dalam proses produksi semakin kuat. Semakin tinggi angka NTP maka semakin kuat kemampuan daya beli yang dimiliki oleh petani.

Grafik 1. 31 Perkembangan NTP Provinsi Bengkulu Tahun 2023 s.d. Triwulan I 2025

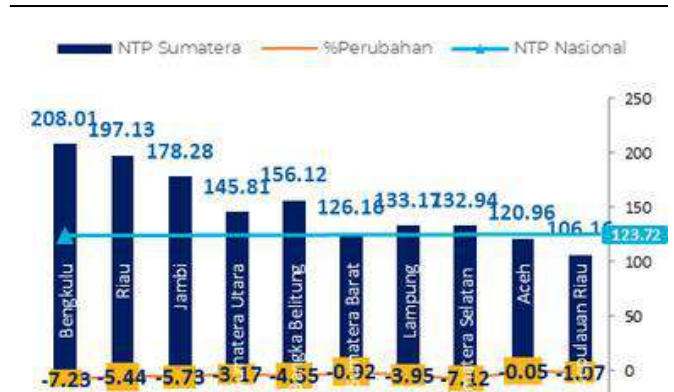


Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 20/04/17/Th. XIX, 8 April 2025 (diolah)

Jika dibandingkan dengan nilai NTP nasional pada bulan Maret 2025 yang berada di angka 123,72, maka NTP Provinsi Bengkulu berada di atas nilai NTP nasional lebih tinggi sebesar 84,29 persen poin. Angka ini menempatkan Bengkulu sebagai provinsi dengan NTP tertinggi di Indonesia pada periode tersebut. NTP Bengkulu yang berada jauh lebih tinggi ini, menunjukkan bahwa petani di Bengkulu menikmati kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Peningkatan NTP Maret 2025 dipengaruhi oleh peningkatan NTP yang terjadi pada tiga subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,57 persen; subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 2,26 persen; dan subsektor Perikanan sebesar 0,53 persen. Sementara dua subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor Hortikultura sebesar 4,13 persen dan subsektor Peternakan sebesar 0,18 persen.

Grafik 1. 32 Perbandingan NTP dan Persentase Perubahan NTP Provinsi Bengkulu dengan Regional Sumatera dan Nasional Tahun 2025



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 20/04/17/Th. XIX, 8 April 2025 (diolah)





Berdasarkan data NTP Maret 2025, Provinsi Bengkulu memiliki NTP tertinggi di Sumatera. Peningkatan ini mencerminkan kesejahteraan petani di Provinsi Bengkulu yang lebih baik di Regional Sumatera maupun Nasional. NTP yang tinggi ini juga didorong oleh letak geografis yang strategis yang subur, strategis untuk ekspor, serta memiliki ekosistem yang mendukung berbagai komoditas pertanian menjadi faktor utama dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani.

Peningkatan NTP pada Maret 2025 ditopang oleh meningkatnya harga komoditas kopi, kelapa sawit, karet dan kol/kubis. Kenaikan harga kopi akibat Penurunan Produksi di Berbagai Negara dan sebagai dampak positif dari program pemerintah daerah yang mendukung peningkatan konsumsi domestik dan ekspor, terutama melalui kegiatan seperti Festival Kopi dan UMKM yang meningkatkan daya tarik kopi Bengkulu dilihat dari meningkatnya permintaan internasional terhadap kopi lokal. Sementara untuk harga komoditas kelapa sawit yang fluktuatif, bergantung pada perubahan harga minyak sawit mentah (CPO) global dan tingkat permintaan internasional, serta kendala dalam distribusi dan infrastruktur, yang turut mempengaruhi harga di pasar lokal.

Beberapa tantangan terkait pengembangan sektor pertanian di Provinsi Bengkulu antara lain:

1. **Infrastruktur yang kurang memadai kegiatan pertanian** terutama di daerah pedalaman (jalan usaha tani, irigasi, bangunan pengolahan hasil pertanian) yang menyebabkan sulitnya akses ke pasar sehingga menyebabkan tingginya biaya distribusi dan mengurangi keuntungan petani;
2. **Ketergantungan pada komoditas tertentu, seperti kopi, karet, dan kelapa sawit**, sehingga membuat sektor pertanian rentan terhadap fluktuasi harga global, yang bisa berdampak negatif pada pendapatan petani ketika harga komoditas tersebut turun;
3. **Keterbatasan Teknologi dan Pendampingan**, masih banyak ditemukan petani di Bengkulu menggunakan metode tradisional dalam bertani. Keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan minimnya pelatihan meningkatkan produktivitas menghambat kemampuan petani untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan memenuhi permintaan pasar yang berkembang;
4. **Permodalan dan Akses Pembiayaan yang Terbatas**, seperti sulitnya mencari tambahan modal untuk meningkatkan produksi. Keterbatasan ini membatasi investasi pada peralatan, bibit unggul, dan sarana lain yang

diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian.

5. **Dampak Perubahan Iklim**, seperti curah hujan yang tidak menentu dan suhu yang ekstrem, mengancam hasil panen dan kualitas produk pertanian. Dampak iklim ini semakin dirasakan di Bengkulu, terutama pada tanaman yang sensitif terhadap perubahan cuaca seperti kopi dan karet.

Langkah Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani antara lain:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan kegiatan : Pengawasan Peredaran sarana Pertanian, Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman.
2. Penyerahan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan): Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan bantuan alsintan kepada kelompok tani di Kabupaten Kaur. Bantuan ini meliputi mesin traktor dan alat penyemprot hama tanaman, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen petani.
3. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR): Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, melalui Dinas Pertanian, menyalurkan bantuan PSR kepada kelompok tani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit yang mengalami penurunan, dengan memberikan bantuan berupa bibit sawit, herbisida, dan peralatan pendukung lainnya.
4. *Farmer Field Day* Pertanian Organik: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan acara "Farmer Field Day" sebagai bagian dari sekolah lapang tematik pertanian organik. Kegiatan ini mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui praktik pertanian organik yang ramah lingkungan.
5. Pengajuan Bantuan Benih Padi: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mengajukan permohonan bantuan hampir 15 ton benih padi varietas Inpari 32 kepada Kementerian Pertanian. Langkah ini bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Bengkulu.
6. Optimalisasi Program Perluasan Areal Tanam (PAT): Pemerintah Provinsi Bengkulu mengoptimalkan program PAT dan menambah





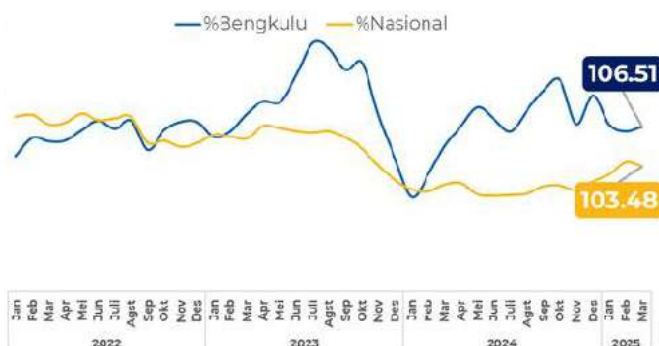
alokasi pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produksi pertanian. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

1.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan nelayan dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan (yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menghasilkan produksi perikananannya). Data NTN Provinsi Bengkulu diperoleh dari data NTP Subsektor Perikanan Nelayan (NTN).

Letak geografis Bengkulu yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, memberikan Bengkulu akses garis pantai yang panjang dan potensi sumber daya laut yang kaya, terutama di Samudra Hindia. Kondisi ini memberikan beberapa keuntungan terhadap Nilai Tukar Nelayan (NTN) Bengkulu dalam meningkatkan perekonomian di bidang Kelautan dan Perikanan.

Grafik 1. 33 Perkembangan NTN Provinsi Bengkulu Tahun 2022 s.d. Triwulan I 2025



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 20/04/17/Th. XIX, 8 April 2025 (diolah)

Pada Maret 2025 NTN Provinsi Bengkulu berada diangka 106,51, mengalami peningkatan sebesar 0,33 poin (mtm) dan tumbuh signifikan sebesar 1,47 poin (yoy). Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,94 persen, sedangkan Ib naik lebih rendah sebesar 0,61 persen. Kenaikan pada It disebabkan oleh naiknya It pada kelompok penangkapan perairan umum dan kelompok penangkapan laut yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,36 persen dan 0,95 persen. Kenaikan Ib disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar 0,71 persen dan indeks kelompok BPPBM sebesar 0,46 persen.

Angka NTN Provinsi berada diatas NTN nasional yang berada diangka 103,48. Tingginya NTN Bengkulu ini didorong oleh letak geografis yang strategis, yang memungkinkan nelayan memperoleh hasil tangkapan berkualitas tinggi dan memiliki akses pasar yang lebih luas.

Terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan sektor perikanan di Bengkulu, khususnya tantangan dari segi ekonomi dan industri. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur, Fasilitas dasar yang mendukung aktivitas perikanan, seperti pelabuhan perikanan, dermaga sandar, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), serta pasar ikan yang representatif, masih sangat terbatas di Bengkulu. Ketiadaan infrastruktur yang memadai menyebabkan proses pascapanen, termasuk penyimpanan dan distribusi hasil tangkapan, menjadi kurang efisien. Akibatnya, nelayan kesulitan mempertahankan kualitas ikan, sehingga harga jual produk perikanan menjadi tidak maksimal;
2. Dampak Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem, Perubahan iklim menyebabkan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, yang menghambat aktivitas penangkapan ikan. Gelombang laut yang tinggi dan cuaca buruk mengurangi frekuensi melaut nelayan, terutama bagi mereka yang menggunakan perahu kecil;
3. *Overfishing* dan Degradasi Lingkungan, Aktivitas penangkapan yang berlebihan serta pencemaran laut mengancam kelestarian sumber daya laut di perairan Bengkulu. Hal ini tidak hanya mengurangi populasi ikan tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor perikanan jangka Panjang;
4. Peralatan Penangkapan yang Kurang Modern, Banyak nelayan di Bengkulu yang masih menggunakan peralatan penangkapan tradisional. Minimnya akses terhadap teknologi modern menyebabkan rendahnya produktivitas dan efisiensi penangkapan, yang memengaruhi jumlah dan kualitas hasil tangkapan; dan
5. Minimnya Program Pelatihan dan Pendampingan, Nelayan lokal sering kali kurang mendapatkan pelatihan dalam aspek manajemen perikanan dan keterampilan modern, seperti budidaya perikanan atau penggunaan alat-alat teknologi. Kurangnya pendampingan ini membatasi perkembangan mereka dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan.



Langkah Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah tersebut. Beberapa program dan inisiatif yang telah dilakukan antara lain:

1. Dengan memberikan bantuan kapal nelayan, jilnet, benih dan pakan ikan.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.
3. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan.
4. Modernisasi Peralatan Tangkap: Pada tahun 2023, pemerintah mendistribusikan 41 mesin tempel kapal, 14 ketinting, GPS, rompi pengaman, dan peralatan lainnya kepada kelompok-kelompok nelayan. Bantuan ini bertujuan meningkatkan produktivitas hasil tangkapan dan kesejahteraan keluarga nelayan.
5. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kabupaten Kaur: Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kaur, pemerintah provinsi memulainya pembangunan PPN pada Maret 2025. Fasilitas ini diharapkan dapat mengoptimalkan sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di pesisir Bengkulu.

Dorongan Adopsi Teknologi dan Hilirisasi Sektor Perikanan: Pemerintah mendorong nelayan untuk mengadopsi teknologi modern dalam penangkapan ikan dan beralih ke hilirisasi sektor perikanan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas hasil tangkapan, dan memberikan alternatif sumber pendapatan bagi nelayan.

Isu Strategis Ekonomi Bengkulu Triwulan I 2025

1. Pertumbuhan Ekonomi Positif namun Ada Kontraksi Kuartalan

Ekonomi Bengkulu tumbuh 4,84% secara year-on-year (y-on-y) dibandingkan Triwulan I 2024, menempati posisi keempat tertinggi di Sumatera. Namun, secara kuartalan (q-to-q), terjadi kontraksi sebesar -2,27% dibandingkan Triwulan IV 2024. Kontribusi PDRB Bengkulu terhadap PDRB Sumatera masih menjadi yang terendah dengan andil 2,11 persen.

2. Sektor Unggulan dan Kontraksi

Pertumbuhan didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh 9,53%. Namun, sektor konstruksi mengalami kontraksi terdalam

sebesar -10,55%, diikuti oleh pertambangan dan penggalian, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

3. Konsumsi Rumah Tangga sebagai Penopang Utama

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,59% dan menyumbang 60,01% terhadap PDRB, menunjukkan peran penting konsumsi domestik dalam perekonomian daerah.

4. Penurunan Investasi

Realisasi investasi pada Triwulan I 2025 mencapai Rp830 miliar, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,3 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor politik, bulan suci Ramadhan, dan kurangnya pelaporan dari sektor usaha menengah dan kecil.

5. Ketergantungan pada Konsumsi Rumah Tangga

Bank Indonesia mencatat bahwa perekonomian Bengkulu masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, sehingga perlu diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi Kebijakan

1. Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Mendorong sektor industri pengolahan dan pariwisata untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi rumah tangga.
2. Percepatan Realisasi Belanja Pemerintah
Mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan meningkatkan permintaan domestik.
3. Peningkatan Investasi
Meningkatkan promosi investasi dan memberikan insentif kepada investor, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi terbarukan, dan infrastruktur.
4. Penguatan UMKM
Memberikan pelatihan dan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
5. Pengembangan Infrastruktur
Meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung distribusi barang dan jasa.
6. Peningkatan Kualitas Data dan Pelaporan
Mendorong pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan investasinya secara tepat waktu dan akurat guna mendukung perencanaan ekonomi yang lebih baik.





BAB II

Analisis Fiskal Regional



KUE LEPEK BINITI

Kue Lepek Binititi adalah kue tradisional khas Bengkulu yang memiliki nilai budaya dan kuliner yang tinggi. Kelezatannya yang unik dan perannya dalam budaya lokal membuatnya tak tergantikan.

Kue Lepek Binititi memiliki daya tarik tersendiri karena perpaduan rasa antara ketan yang kenyal dan manisnya gula merah. Selain itu, aroma khas dari daun pisang juga turut menyempurnakan cita rasa kue ini. Bentuknya yang bundar dengan sentuhan daun pisang sebagai pembungkus membuatnya tampak menarik dan lezat.

Kue Lepek Binititi tak hanya sekadar camilan lezat, tapi juga menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Bengkulu. Kue ini sering dihidangkan dalam acara-acara spesial seperti pernikahan, khitanan, dan perayaan hari besar.

sumber artikel : www.kompasiana.com



BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

APBN merupakan instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Selain menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi, APBN juga menyesuaikan kebutuhan daerah.

Pada tingkat regional, seperti di Provinsi Bengkulu, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,84 persen yang masih di bawah pertumbuhan nasional dan jumlah penduduk miskin per September 2024 mencapai mencapai 12,52 persen (BPS Provinsi Bengkulu),

APBN tidak hanya berfungsi untuk mendanai program-program nasional tetapi juga disesuaikan agar dapat menjawab kebutuhan spesifik daerah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menanggulangi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh daerah. Dengan melihat perkembangan realisasi APBN hingga Triwulan I 2025, kita dapat memahami bagaimana APBN berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian berbagai target pembangunan di Bengkulu.

Tabel 2.1 Laporan Realisasi APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2025 (Miliar Rupiah)

i-Account	Tahun 2024			Tahun 2025			Growth (%)
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
PENDAPATAN NEGARA	3.349,23	528,44	15,78	3.539,24	509,04	14,38	▼3,67
Pendapatan Perpajakan	3.001,82	381,44	12,76	3.173,65	359,16	11,32	▼6,26
Pendapatan Negara Bukan Pajak	347,41	145,27	41,82	365,59	149,88	41,00	▲3,17
Hibah	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
B. BELANJA NEGARA	17.118,97	3.486,59	20,37	14.860,42	3.349,23	22,54	▼3,94
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	5.964,5	1.146,55	19,22	4,820	810,73	16,82	▼29,29
Belanja Pegawai	2.078,27	522,15	25,12	2.008,37	570,54	28,41	▲9,27
Belanja Barang	2.932,95	523,34	17,84	1.744,17	185,11	10,61	▼64,63
Belanja Modal	931,25	96,85	10,40	1.043,36	43,79	4,20	▼54,78
Belanja Bantuan Sosial	22,03	4,21	19,11	24,11	11,29	46,84	▲168,27
Belanja Hibah	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Belanja Lain-Lain	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Belanja Pembayaran Bunga Utang	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
Belanja Subsidi	0,00	0,00	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A
TRANSFER KE DAERAH	11.154,47	2.340,04	20,98	10.040,42	2.538,5	25,28	▲8,48
Dana Transfer Umum (DTU)	7.449,27	1.782,57	23,93	7.040,55	1.891,36	26,86	▲6,10
Dana Alokasi Umum (DAU)	6.669,55	1.678,13	25,16	6.349,96	1.763,89	27,78	▲5,11
Dana Bagi Hasil (DBH)	779,72	104,44	13,39	690,59	127,47	18,46	▲22,05
Dana Transfer Khusus (DTK)	2.519,89	262,64	10,42	1.942,19	390,8	20,12	▲48,80
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.089,24	0,00	0,00	397,94	0,00	0,00	N/A
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	1.430,65	262,64	18,36	1.544,25	390,8	25,31	▲48,80
Dana Insentif Fiskal	98,62	0,00	26,30	20,83	0,00	0,00	N/A
Dana Desa	1.086,69	294,83	27,13	1.036,86	256,34	24,72	▼13,06
SURPLUS/DEFISIT		(2.958,15)			(2.840,19)		▼3,99

Sumber: DJP, DJBC, SINTESA dan OMSPAN (diolah)



Target Pendapatan Negara tahun 2025 untuk Provinsi Bengkulu ditetapkan sebesar Rp3.539,24 miliar, meningkat 5,67 persen dibandingkan target tahun sebelumnya. Sampai akhir Triwulan I 2025, realisasi pendapatan telah mencapai Rp509,04 miliar atau sebesar 14,38 persen dari total target. Capaian ini terutama didukung oleh Pendapatan Perpajakan yang mencapai Rp359,16 miliar atau 11,32 persen dari target, meskipun mengalami kontraksi sebesar 6,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp149,88 miliar atau setara 41,00 persen dari target, menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, hingga akhir Triwulan I 2025, belum terdapat target maupun realisasi penerimaan hibah di wilayah Bengkulu.

Dari sisi belanja, pagu anggaran tahun 2025 untuk Provinsi Bengkulu ditetapkan sebesar Rp14.860,42 miliar, mengalami penyesuaian sebesar 13,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi kebijakan efisiensi belanja negara yang digariskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hingga akhir Triwulan I 2025, realisasi belanja telah mencapai Rp3.349,23 miliar atau 22,54 persen dari total pagu, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total realisasi belanja tersebut, sebesar 24,21 persen merupakan Belanja Pemerintah Pusat, sedangkan 75,79 persen berasal dari komponen Transfer ke Daerah.

Meskipun masih terdapat kontraksi pada beberapa komponen pendapatan dan belanja hingga akhir Triwulan I 2025, secara umum pelaksanaan APBN di Provinsi Bengkulu tetap berjalan dalam kerangka kebijakan fiskal yang terarah dan adaptif, guna mendukung pemulihan ekonomi serta menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar lebih efisien, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.1.1 Analisis Perkembangan Pendapatan Negara

Hingga Triwulan I tahun 2025, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah di Provinsi Bengkulu mencapai Rp509,04 miliar atau 14,38 persen dari target sebesar Rp3.539,24 miliar. Capaian ini menunjukkan penurunan kinerja jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yang mampu mencapai Rp528,44 miliar atau 15,78 persen dari target saat itu. Dengan demikian, secara tahunan (year-on-year),

realisasi Pendapatan Negara mengalami kontraksi sebesar 3,67 persen.

Pendapatan Perpajakan masih menjadi kontributor utama dalam struktur Pendapatan Negara, dengan realisasi sebesar Rp359,16 miliar atau 11,32 persen dari pagu tahun 2025. Namun demikian, angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp381,44 miliar atau 12,76 persen, menunjukkan penurunan kinerja sebesar 6,26 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi pemungutan pajak, meskipun berbagai upaya penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan.

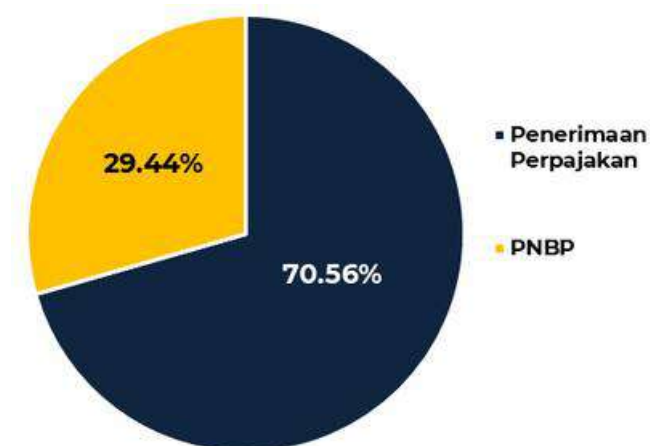
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatatkan kinerja yang lebih baik. Hingga akhir Maret 2025, realisasi PNBP mencapai Rp149,88 miliar atau 41,00 persen dari target sebesar Rp365,59 miliar. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), yang mencerminkan pengelolaan layanan publik yang semakin efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak terdapat penerimaan hibah pada Triwulan I, baik pada tahun 2024 maupun 2025.

Secara umum, meskipun terjadi perlambatan pada sisi pendapatan perpajakan, kinerja Pendapatan Negara di Provinsi Bengkulu masih menunjukkan arah yang positif. Hal ini terutama ditopang oleh pertumbuhan PNBP yang signifikan, serta penguatan koordinasi antarlembaga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan penerimaan negara.

Analisis Realisasi dan Growth Pendapatan Negara



Grafik 2.1 Porsi Realisasi Pendapatan Negara Triwulan I 2025



Sumber: DJP, DJBC, OMSPAN (diolah)



Struktur Pendapatan Negara di Provinsi Bengkulu pada Triwulan I 2025 masih didominasi oleh penerimaan dari sektor perpajakan. Dari total realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp509,04 miliar, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp359,16 miliar (70,56 persen), sedangkan penerimaan negara bukan pajak.

(PNBP) menyumbang Rp149,88 miliar atau 29,44 persen dari total pendapatan.

Dominasi penerimaan perpajakan menegaskan bahwa instrumen fiskal utama dalam Pendapatan Negara di Bengkulu masih bergantung pada kinerja perpajakan.

Analisis Realisasi dan Growth Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri

Tabel 2. 2 Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)

Uraian	2024			2025			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1. Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri	3.000,27	381,44	12,71	3.172,22	359,14	11,32	▼ 5,85
Pajak Penghasilan Non Migas	1.368,24	186,04	13,60	1.067,82	121,05	11,34	▼ 34,93
Pajak Pertambahan Nilai	1.505,7	193,43	12,85	2.070,69	207,1	10,00	▲ 7,07
Pajak Bumi dan Bangunan	73,91	0,35	0,48	25,24	0,98	3,88	▲ 176,05
Pajak Lainnya	52,43	1,62	3,09	8,47	30,01	354,22	▲ 1753,96

Sumber: DJP, DJBC, OMSPAN (diolah)

Pada Triwulan I tahun 2025, realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp359,14 miliar atau setara dengan 11,32 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp3.172,22 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama

tahun sebelumnya, capaian ini mengalami penurunan sebesar 5,85 persen (yoy), dari realisasi sebesar Rp381,44 miliar atau 12,71 persen terhadap pagu tahun 2024.

Grafik 2. 2 Realisasi dan Growth Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: KPP Bengkulu Dua (diolah)

Secara rinci, kinerja masing-masing komponen utama penerimaan perpajakan dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu sebesar 34,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PPh pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp121,05 miliar, turun dari Rp186,04 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan akibat dari beberapa hal berikut:

- a. Kebijakan pemusatan atas Wajib Pacak Cabang sesuai PMK Nomor: 136/PMK.03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- b. Kebijakan efisiensi anggaran belanja tahun 2025.
- c. Penurunan angsuran PPh Pasal 25 Masa hingga Maret 2025 disebabkan karena belum disampaikannya SPT Tahunan oleh sebagian





2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencatatkan pertumbuhan positif secara nominal, yaitu sebesar 7,07 persen, dari Rp193,43 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp207,10 miliar pada tahun 2025. Meskipun demikian, persentase capaian terhadap pagu mengalami penurunan dari 12,85 persen menjadi 10,00 persen, seiring dengan adanya peningkatan target penerimaan tahun berjalan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan perbaikan kinerja dengan capaian realisasi sebesar Rp0,98 miliar atau 3,88 persen dari target, meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,35 miliar atau 0,48 persen. Pertumbuhan tahunan pada komponen ini tercatat mencapai 176,05 persen, walaupun kontribusinya terhadap total masih relatif kecil.
4. Pajak Lainnya, mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 1.753,96 persen (yoy), dari Rp1,62 miliar menjadi Rp30,01 miliar. Peningkatan signifikan ini merupakan hasil dari implementasi Kebijakan Deposit Pajak (Pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu, Pasal 1 Angka 112 PMK 81/2024).

Grafik 2.3 Rincian Porsi Penerimaan Perpajakan Triwulan I Tahun 2025



Sumber: KPP Bengkulu Dua (diolah)

Struktur penerimaan perpajakan dalam negeri Provinsi Bengkulu pada Triwulan I 2025 masih didominasi oleh dua komponen utama, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas. Secara proporsional, kontribusi masing-masing komponen terhadap total realisasi penerimaan sebesar Rp359,14 miliar adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar, yaitu 57,67 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa aktivitas konsumsi, baik oleh rumah tangga maupun pemerintah, masih

menjadi pendorong utama penerimaan.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas menyumbang 33,71 persen dari total penerimaan. Komponen ini sebagian besar bersumber dari sektor unggulan Bengkulu, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Meskipun kontribusinya tetap signifikan, realisasi PPh Non-Migas mengalami kontraksi pada awal tahun akibat faktor eksternal seperti pelemahan harga komoditas global dan penurunan produktivitas, serta faktor kebijakan nasional seperti pemusatan pajak cabang dan keterlambatan pelaporan SPT oleh WP badan.
3. Pajak Lainnya memberikan kontribusi sebesar 8,36 persen, meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan deposit pajak sebagaimana diatur dalam PMK 81/2024. Lonjakan ini membuka potensi optimalisasi penerimaan dari jenis pajak non-konvensional yang sebelumnya kurang dimanfaatkan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang kontribusi terkecil yaitu 0,27 persen. Meskipun mengalami pertumbuhan nominal yang tinggi, kontribusinya terhadap keseluruhan penerimaan masih relatif kecil, menandakan perlunya peningkatan basis data objek pajak dan intensifikasi pemungutan PBB secara lebih sistematis.

Komposisi kontribusi ini mengindikasikan bahwa struktur perpajakan daerah masih sangat bergantung pada sektor konsumsi dan komoditas utama daerah. Optimalisasi potensi pajak lainnya dan perluasan basis pajak menjadi kunci untuk meningkatkan keberlanjutan penerimaan perpajakan di masa mendatang.

Analisis Realisasi dan Growth Penerimaan Bea dan Cukai



Hingga akhir Triwulan I 2025, penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp24,39 juta atau hanya 1,70 persen dari target tahunan sebesar Rp1,44 miliar, dengan penurunan sebesar 98,59 persen (yoy) dari capaian Triwulan I 2024 yang mencapai Rp1,73 miliar. Secara rinci, kinerja masing-masing komponennya adalah sebagai berikut:

1. Cukai mencatatkan realisasi sebesar Rp22,48 juta, atau turun 85,74 persen (yoy). Tidak seperti tahun sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan



- akibat penyelesaian pelanggaran cukai melalui mekanisme ultimum remedium (prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana harus dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, setelah upaya-upaya lain seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, atau negosiasi dianggap tidak memadai), pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah pelanggaran yang diproses, sehingga berdampak langsung terhadap menurunnya penerimaan dari denda administrasi cukai. Selain itu, pabrik rokok di Rejang Lebong masih belum beroperasi, menyebabkan nihilnya penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).
2. Bea Masuk terealisasi sebesar Rp2 juta atau 14,93 persen dari target, turun 48,03 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan jumlah registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk perangkat elektronik (HKT) yang sebelumnya menjadi kontributor utama Bea Masuk di wilayah Bengkulu. Tidak adanya arus barang impor melalui pelabuhan di Bengkulu juga memperkuat tren penurunan ini.

3. Bea Keluar tidak mencatatkan realisasi sama sekali pada Triwulan I 2025, atau mengalami kontraksi 100 persen (yoy). Hal ini terjadi karena tertundanya rencana ekspor cangkang kernel sawit, salah satu komoditas ekspor utama Bengkulu, akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi ini menyebabkan biaya pemuatan naik signifikan karena harus menggunakan skema ship-to-ship, sehingga eksportir menunda ekspor. Per 31 Maret 2025, diinformasikan bahwa Pelindo akan melakukan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai pada bulan Mei 2025 dengan total alokasi anggaran sekitar Rp1 triliun, namun kegiatan ekspor diperkirakan masih akan tertahan dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, performa penerimaan Bea dan Cukai pada Triwulan I 2025 menunjukkan tekanan cukup berat. Optimalisasi penerimaan pada triwulan berikutnya sangat bergantung pada pemulihan arus perdagangan serta percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan.

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d 2025 (Miliar Rupiah)

URAIAN	2024			2025			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Penerimaan Bea & Cukai	1,5494	1,7287	111,57	1,4364	0,0244	1,70	▼ 98,59
Cukai	0,05	0,1575	315,08	0,00	0,0225	N/A	▼ 85,74
Bea Masuk	0,0034	0,0038	111,53	0,0131	0,002	14,93	▼ 48,03
Bea Keluar	1,496	1,5674	104,77	1,4233	0,00	0,00	▼ 100,00

Sumber: KPPBC Bengkulu (diolah)

Analisis Realisasi dan Growth Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hingga Triwulan I 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Bengkulu mencapai Rp149,88 miliar, atau sebesar 41,00 persen dari target tahunannya sebesar Rp365,59 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,17 persen (yoy), yang mencerminkan stabilitas dan kesinambungan dalam kontribusi sektor non-pajak terhadap pendapatan negara di wilayah ini. Kinerja PNBP secara keseluruhan ditopang oleh dua komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tercatat sebesar Rp98,72 miliar, atau 35,01 persen dari target tahunan Rp281,99 miliar. Komponen ini mengalami pertumbuhan sebesar 10,29 persen (yoy). Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh

pendapatan dari layanan pendidikan dan kesehatan oleh satker-satker BLU di Bengkulu, seperti Universitas Bengkulu, Poltekes Kemenkes Bengkulu, dan UIN Fatmawati Soekarno. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas layanan publik serta penerimaan musiman awal tahun yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan administrasi pendidikan.

2. PNBP Lainnya terealisasi sebesar Rp51,16 miliar atau 61,20 persen dari target Rp83,6 miliar. Meskipun realisasi persentase target tergolong tinggi, namun secara tahunan komponen ini mengalami penurunan sebesar 8,25 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya penerimaan dari satker Ditlantas Polda Bengkulu, yang selama ini merupakan





kontributor terbesar dalam kelompok PNBP Lainnya. Penurunan tersebut terkait dengan turunnya volume pengurusan dokumen kendaraan seperti BPKB, STNK, dan TNKB, seiring dengan menurunnya penjualan kendaraan baru. Selain itu, shifting status UIN Fatmawati Soekarno menjadi satker BLU juga turut menyebabkan pengurangan kontribusi pada PNBP Lainnya.

Selain itu, shifting status UIN Fatmawati Soekarno menjadi satker BLU juga turut menyebabkan pengurangan kontribusi pada PNBP Lainnya.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tekanan pada komponen PNBP Lainnya, capaian PNBP Triwulan I 2025 di Bengkulu tetap menunjukkan tren positif.

Tabel 2. 4 Pagu dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)

URAIAN	2024			2025			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	347,41	145,27	41,82	365,59	149,88	41,00	▲ 3,17
PNBP Lainnya	117,8	55,76	47,34	83,6	51,16	61,20	▼ 8,25
Pendapatan BLU	229,6	89,51	38,98	281,99	98,72	35,01	▲ 10,29

Sumber: OMSPAN (diolah)

Analisis Kinerja Penerimaan Perpajakan Negara Sektoral



Analisis Kinerja Pendapatan Negara Sektoral merupakan bagian penting dalam kajian ini yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi dan sosial. Pendapatan negara sektoral mencakup penerimaan dari berbagai sektor ekonomi yang berperan dalam menyediakan sumber daya bagi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian, mengurangi ketimpangan, dan

mendorong pemerataan pembangunan di provinsi Bengkulu. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan serta mengungkap tantangan yang dihadapi, sehingga pemerintah dapat merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk optimalisasi pendapatan negara di Bengkulu.

Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Dalam Negeri Sektoral



Tabel 2. 5 Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Sektor di Bengkulu Triwulan I 2025 (Miliar Rupiah)

Sektor	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (yoy) (%)
Industri Pengolahan	28,08	▲ 17,13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	34,50	▲ 33,01
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	28,52	▼ 2,33
Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	10,48	▲ 76,32
Pertambangan dan Penggalian	(11,11)	▼ 343,42
Sektor Lainnya	9,53	▼ 42,56

Sumber: KPP Bengkulu Dua (diolah)

Pada Triwulan I 2025, penerimaan pajak sektoral di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu:

1. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak dengan 34,50 persen, dan mencatat pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy) tertinggi sebesar 33,01 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan semakin

- kuatnya aktivitas perdagangan, yang turut didorong oleh membaiknya daya beli masyarakat dan peningkatan konsumsi domestik awal tahun. Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang 28,52 persen, meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,33 persen (yoy). Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian kebijakan anggaran serta efisiensi belanja rutin sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai pengendalian belanja pemerintah.





3. Sektor Industri Pengolahan berkontribusi 28,08 persen, dengan pertumbuhan positif sebesar 17,13 persen (yoy). Capaian ini menunjukkan pemulihan aktivitas industri yang cukup solid di tengah tantangan rantai pasok global.
4. Sementara itu, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat lonjakan pertumbuhan tertinggi sebesar 76,32 persen (yoy) dengan kontribusi 10,48 persen. Kinerja ini didukung oleh peningkatan produksi dan harga beberapa komoditas pertanian lokal serta membaiknya permintaan dalam negeri.
5. Di sisi lain, Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sangat tajam, yaitu turun 343,42 persen (yoy) dan bahkan memberikan kontribusi negatif terhadap total penerimaan (-11,11 persen). Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor batu bara yang salah satunya diakibatkan karena pendangkalan alur yang terjadi pada Pelabuhan Pulau Baai.
6. Sektor lainnya menyumbang 9,53 persen dan juga mengalami penurunan sebesar 42,56 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar sektor di luar lima utama masih menghadapi tantangan.

Analisis Kinerja Penerimaan Bea dan Cukai Sektoral



Tabel 2. 6 Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai per Sektor di Bengkulu Triwulan I 2025

Sektor	Kontribusi (%)
Informasi dan Komunikasi	91,00
Administrasi Pemerintahan	9,00

Sumber: KPPBC TMP C Bengkulu (diolah)

Pada Triwulan I 2025, struktur penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Bengkulu didominasi oleh dua sektor utama, yaitu:

1. Sektor Informasi dan Komunikasi, dengan kontribusi sebesar 91,00 persen. Penerimaan dari sektor ini sebagian besar berasal dari bea masuk atas perangkat Handphone, Komputer, dan Tablet (HKT) melalui skema identifikasi IMEI. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas impor barang elektronik berteknologi tinggi merupakan komponen utama dalam struktur penerimaan Bea dan Cukai di Bengkulu pada awal tahun ini.
2. Sektor Administrasi Pemerintahan, yang berkontribusi sebesar 9,00 persen. Sumber utama penerimaan dalam sektor ini berasal dari penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Penerimaan ini mencerminkan efektivitas koordinasi antarinstansi dalam penegakan aturan cukai.

Kedua sektor ini secara kolektif mencerminkan karakteristik penerimaan Bea dan Cukai yang, pada periode ini, lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas impor perangkat elektronik dan hasil penegakan hukum, dibandingkan kontribusi dari sektor produksi atau distribusi domestik lainnya.

Analisis Perkembangan Tax Ratio (APBN)



Tabel 2. 7 Analisis Tax Ratio (Rupiah)

Uraian	Realisasi s.d Triwulan I 2024	Realisasi s.d Triwulan I 2025	Growth (%)
Penerimaan Perpajakan	0,381 T	0,359 T	▼ 6,26
PDRB	24,67 T	26,53 T	▲ 7,54
Tax Ratio	1,54%	1,35%	▼ 12,34

Sumber: KPP Bengkulu Dua, KPPBC Bengkulu, BPS Prov. Bengkulu (diolah)

Tax ratio di Provinsi Bengkulu pada Triwulan I 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. *Tax ratio* tercatat sebesar 1,35 persen, turun dari 1,54 persen pada Triwulan I 2024 atau mengalami kontraksi sebesar 12,34 persen. Penurunan ini terjadi meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tumbuh sebesar 7,54 persen dari Rp24,67 triliun menjadi Rp26,53 triliun. Kondisi ini mencerminkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Ketidakseimbangan ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada awal tahun 2025 ditopang oleh sektor-sektor yang kontribusi pajaknya relatif kecil atau tidak langsung menghasilkan penerimaan pajak signifikan, seperti sektor pertanian, konsumsi rumah tangga, serta belanja pemerintah yang masih didominasi belanja pegawai dan bantuan sosial. Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak—seperti pertambangan dan industri pengolahan—mengalami perlambatan karena penurunan harga komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batu bara.

Dari sisi penerimaan perpajakan, terjadi penurunan sebesar 6,26 persen secara tahunan, dari Rp381 miliar menjadi Rp359 miliar. Salah satu penyebab utama kontraksi ini adalah turunnya penerimaan PPh Non-Migas. Permintaan global yang belum pulih sepenuhnya, serta tekanan harga komoditas, berdampak pada menurunnya basis perpajakan dari sektor korporasi.

Kondisi ini menandakan perlunya diversifikasi basis pajak agar tidak terlalu bergantung pada sektor berbasis komoditas. Selain itu, penguatan sinergi





antara instansi vertikal dan pemda dalam ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Dengan arah pemulihan ekonomi yang tetap

positif dan potensi perbaikan harga komoditas pada semester berikutnya, prospek pertumbuhan penerimaan pajak di Bengkulu masih terbuka untuk didorong lebih baik.

Prognosis Pendapatan Negara s.d. Triwulan IV 2025



Tabel 2. 8 Prognosis Pendapatan Negara s.d. Triwulan IV 2025 (Miliar Rupiah)

Uraian	Pajak		Bea Cukai		PNBP	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
Hingga Triwulan I	369,25	359,14	0,003	0,0219	241,62	149,88
April	114,03	0,00	0,0755	0,00	10,83	0,00
Mei	97,87	0,00	0,1318	0,00	10,98	0,00
Juni	102,06	0,00	0,0011	0,00	12,67	0,00
Juli	126,74	0,00	0,0011	0,00	21,92	0,00
Agustus	110,95	0,00	0,0011	0,00	112,36	0,00
September	100,11	0,00	1,1346	0,00	16,26	0,00
Oktober	112,49	0,00	0,0011	0,00	12,53	0,00
November	98,63	0,00	0,0011	0,00	12,29	0,00
Desember	211,85	0,00	0,0863	0,00	10,71	0,00

Sumber: KPP Bengkulu Dua, KPPBC Bengkulu, Sintesa (diolah)

Proyeksi penerimaan pajak hingga Triwulan I 2025 sebesar Rp369,25 miliar. Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp359,14 miliar atau setara dengan 97,26 persen dari target triwulanan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, deviasi yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak masih berjalan cukup stabil, terutama pada awal tahun anggaran yang umumnya memiliki kecenderungan ritme penerimaan lebih rendah. Optimalisasi penerimaan melalui ekstensifikasi dan pengawasan terhadap wajib pajak strategis tetap menjadi prioritas untuk mengejar ketertinggalan realisasi di bulan-bulan berikutnya.

Pada sisi bea cukai, prognosis hingga Triwulan I 2025 sebesar Rp3 juta, sementara realisasi justru mencapai Rp21,9 juta atau 730 persen di atas target. Lonjakan ini menunjukkan capaian signifikan, meskipun dalam nominal yang relatif kecil. Capaian tersebut mencerminkan hasil dari kegiatan operasional dan pengawasan terbatas yang masih berjalan di Bengkulu, termasuk potensi dari kegiatan ekspor maupun cukai hasil tembakau skala kecil. Namun demikian, mengingat minimnya aktivitas kepabeanan di wilayah ini secara umum, kontribusinya terhadap total pendapatan negara masih tergolong terbatas.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Triwulan I 2025 mencapai Rp149,88 miliar dari proyeksi sebesar Rp241,62 miliar, atau sekitar 62,04 persen.

Capaian ini menunjukkan adanya kontraksi signifikan jika dibandingkan dengan target triwulanan, menandakan perlunya percepatan dalam pemanfaatan aset negara, percepatan realisasi layanan pada satuan kerja, serta penagihan piutang. Rendahnya realisasi juga dapat disebabkan oleh keterlambatan dalam proses administrasi dan pelaporan, terutama dari satuan kerja yang menjadi kontributor utama PNBP.

Secara umum, kinerja pendapatan negara di Bengkulu pada Triwulan I 2025 menunjukkan tantangan yang cukup nyata, terutama dari sisi PNBP. Meski capaian bea cukai mencatatkan surplus terhadap target, kontribusinya masih kecil secara nominal. Sementara itu, pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara tetap menjadi perhatian dengan realisasi yang nyaris mencapai target. Untuk mendorong optimalisasi hingga akhir tahun, diperlukan penguatan koordinasi antar-instansi, pemantauan penerimaan secara berkala, dan percepatan langkah-langkah intensifikasi pendapatan negara di seluruh lini.

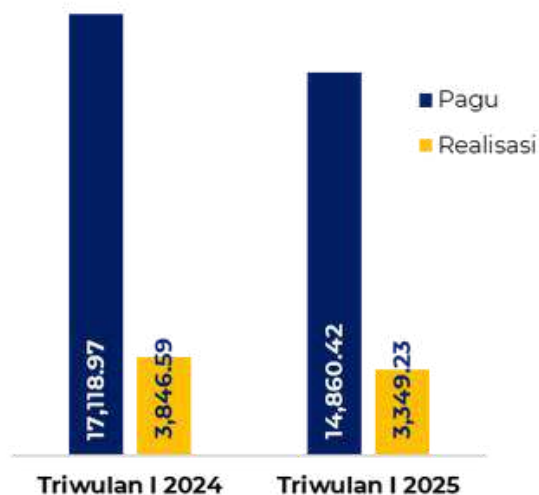
2.1.2 Analisis Perkembangan Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara di Bengkulu pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp3.349,23 miliar, sebagaimana terlihat dalam Grafik 2.3, yang setara dengan 22,54 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Secara persentase, capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2024,



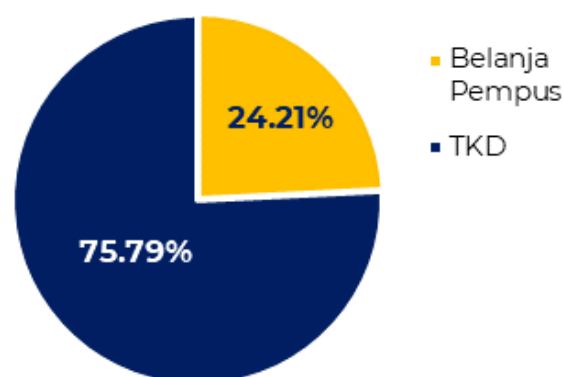
yang mencerminkan kinerja belanja negara yang lebih optimal pada awal tahun 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja positif pada transfer ke daerah yang tumbuh sebesar 8,48 persen, meskipun belanja pemerintah pusat mengalami penurunan. Capaian ini menandakan adanya perbaikan dalam penyaluran anggaran yang lebih cepat dan tepat sasaran di awal tahun anggaran.

Grafik 2. 4 Pagu dan Realisasi Belanja Triwulan I, 2024-2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN (diolah)

Grafik 2. 5 Porsi Belanja Negara Triwulan I, 2024-2025



Sumber: OMSPAN (diolah)

Apabila dirinci lebih lanjut sebagaimana terlihat pada Grafik 2.4, komposisi Belanja Negara pada triwulan I 2025 masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD). Dari total realisasi belanja sebesar Rp3.349,23 miliar, sebesar Rp2.538,50 miliar atau 75,79 persen merupakan realisasi TKD, sedangkan Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp810,73 miliar atau hanya 24,21 persen. Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja negara pada awal tahun masih diarahkan untuk mendukung belanja daerah melalui penyaluran TKD.

Analisis Realisasi dan Growth Belanja Pemerintah Pusat

Tabel 2. 9 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)

URAIAN	2024			2025			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
I. Belanja Pemerintah Pusat	5.964,5	1.146,55	19,22	4.820	810,73	16,82	▼ 29,29
Belanja Pegawai	2.078,27	522,15	25,12	2.008,37	570,54	28,41	▲ 9,27
Belanja Barang	2.932,95	523,34	17,84	1.744,17	185,11	10,61	▼ 64,63
Belanja Modal	931,25	96,85	10,40	1.043,36	43,79	4,20	▼ 54,78
Bantuan Sosial	22,03	4,21	19,11	24,11	11,29	46,84	▲ 168,27

Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada triwulan I 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp810,73 miliar, atau sebesar 16,82 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi kontraksi sebesar 29,29 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi pada komponen Belanja Barang dan Belanja Modal.

Belanja Barang mengalami kontraksi paling signifikan, yakni sebesar 64,63 persen (yoy). Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi belanja yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi tersebut ditujukan untuk menjaga kualitas belanja agar lebih fokus pada program prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Belanja Modal juga menunjukkan kontraksi sebesar 54,78 persen, yang sebagian besar disebabkan





oleh proses pengadaan barang/jasa yang masih ditahan oleh satuan kerja. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas identifikasi belanja yang dapat dioptimalkan ulang guna mendukung efisiensi anggaran.

Meskipun secara agregat terjadi penurunan, Belanja Pegawai justru mencatatkan kenaikan sebesar 9,27 persen, dengan realisasi mencapai Rp570,54 miliar atau 28,41 persen dari pagu.

Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak pegawai. Sementara itu, realisasi Belanja Bantuan Sosial juga menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 168,27 persen (year-on-year), sebagai wujud upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan kepada kelompok rentan melalui program-program perlindungan sosial.

Analisis Realisasi dan Growth Transfer ke Daerah



Tabel 2. 10 Pagu dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah di Bengkulu Triwulan I 2024 s.d. 2025 (Miliar Rupiah)

URAIAN	2024			2025			Growth (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
II. Transfer Ke Daerah	11.154,47	2.340,04	20,98	10.040,42	2.538,5	25,28	▲ 8,48
1. Transfer Ke Daerah	10.067,77	2.045,21	20,31	9.003,56	2.282,16	25,35	▲ 11,59
a. Dana Perimbangan	9.969,15	2.045,21	20,52	8.982,73	2.282,16	25,41	▲ 11,59
DAU	6.669,55	1.678,13	25,16	6.349,96	1.763,89	27,78	▲ 5,11
DAK Fisik	1.089,24	0,00	0,00	397,94	0,00	0,00	N/A
DAK Non Fisik	1.430,65	262,64	18,36	1.544,25	390,8	25,31	▲ 48,80
DBH	779,72	104,44	13,39	690,59	127,47	18,46	▲ 22,05
b. Dana Insentif Fiskal	98,62	0,00	0,00	20,83	0,00	0,00	N/A
2 Dana Desa	1.086,69	294,83	27,13	1.036,86	256,34	24,72	▼ 13,06

Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada triwulan I 2025, realisasi Belanja Transfer ke Daerah di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp2.538,50 miliar atau 25,28 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp10.040,42 miliar. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara umum, kinerja Belanja TKDD pada awal tahun 2025 mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan.

Sebagian besar komponen mengalami pertumbuhan, terutama pada DAK Non Fisik yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 48,80 persen (yoy). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kecepatan dan efektivitas dalam penyaluran dana. Selain itu, DAU dan DBH juga menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 5,11 persen dan 22,05 persen, yang turut mendorong peningkatan total realisasi.

Namun demikian, Dana Desa mengalami kontraksi sebesar 13,06 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain perlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran, di mana hingga Maret 2025, baru 723 desa yang menerima penyaluran, jauh menurun dibandingkan 1.340 desa pada Maret 2024 (kontraksi 46,04 persen).

Selain itu, terdapat permasalahan hukum di tiga desa, yaitu Desa Suro Bali (Kab. Kepahiang), Desa Gunung Kaya (Kab. Kaur), dan Desa Sebelat (Kab. Lebong) yang berdampak langsung terhadap penyaluran Dana Desa tahun ini.

Sementara itu, hingga akhir Maret 2025, belum terdapat penyaluran DAK Fisik, namun beberapa pemerintah daerah telah memulai proses pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran. Adapun untuk penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, telah disalurkan kepada 9.670 guru ASN dengan total nilai sebesar Rp110,24 miliar (netto). Namun, terdapat retur pada enam rekening penerima dengan nilai sebesar Rp69.951.810, yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu hak penerima manfaat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 secara responsif dan tepat waktu, seiring dengan adanya perubahan atau rekonstruksi alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini menjadi penting untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal, tidak mengalami hambatan administratif, serta mendukung kelancaran realisasi anggaran dan pencapaian target pembangunan di tahun berjalan.



Analisis Belanja Negara Berdasarkan Fungsi Pemerintahan



Tabel 2. 11 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah per Fungsi, Triwulan I 2024 – 2025 (Miliar Rupiah)

Fungsi	Triwulan I 2024			Triwulan I 2025			Growth
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pelayanan Umum	11.416,43	2.616,12	22,92	11.069,93	2.601,07	23,50	▼ 0,58
Pertahanan	203,64	58,81	28,88	209,18	58,51	27,97	▼ 0,51
Ketertiban Dan Keamanan	1.172,3	310,46	26,48	1.224,33	310,71	25,38	▲ 0,08
Ekonomi	940,94	130,09	13,83	975,2	82,73	8,48	▼ 36,41
Perlindungan Lingkungan Hidup	125	24,8	19,84	74,67	19,26	25,80	▼ 22,34
Perumahan Dan Fasilitas Umum	435,33	78,62	18,06	8	1,11	13,86	▼ 98,59
Kesehatan	149,05	38,34	25,72	117,08	28,37	24,23	▼ 26,00
Agama	160,03	42,7	26,68	156,63	41,48	26,48	▼ 2,86
Pendidikan	1.149,2	182,97	15,92	974,45	199,61	20,48	▲ 9,09
Perlindungan Sosial	19,47	3,7	19,00	14,96	6,37	42,59	▲ 72,16
Pariwisata	1,52	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	N/A
Jumlah	15.771,4	3.486,59	22,92%	14.824,43	3.349,23	22,59	▼ 3,94

Sumber: Sintesa (diolah dari data tarikan 22 Mei 2025)

Pada Triwulan I 2025, belanja pemerintah di Provinsi Bengkulu dialokasikan ke dalam berbagai fungsi pemerintahan yang mencerminkan prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi ini mencakup sektor-sektor strategis seperti pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial. Masing-masing fungsi diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara umum, belanja pemerintah pada Triwulan I 2025 mengalami penurunan sebesar 3,94 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp15.771,40 miliar pada 2024 menjadi Rp14.824,43 miliar pada 2025, dengan realisasi sebesar Rp3.349,23 miliar atau 22,59 persen.

Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi ini kembali menjadi alokasi terbesar, yakni Rp11.069,93 miliar dengan realisasi sebesar Rp2.601,07 miliar (23,50 persen). Meskipun terjadi sedikit penurunan realisasi sebesar 0,58 persen dibandingkan tahun lalu, fungsi ini tetap menjadi pilar utama penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penguatan layanan publik, serta sektor keamanan dan ketertiban.

Fungsi Ekonomi

Alokasi untuk sektor ekonomi meningkat menjadi Rp975,20 miliar, namun realisasi mengalami penurunan signifikan dari 13,83 persen menjadi hanya 8,48 persen di 2025. Ini mencerminkan penurunan realisasi sebesar 36,41 persen yang dapat disebabkan

karena terdapat penyesuaian sebagai bentuk tindak lanjut atas identifikasi belanja yang dapat dioptimalkan ulang guna mendukung efisiensi anggaran.

Fungsi Agama

Dengan pagu sebesar Rp156,63 miliar dan realisasi sebesar Rp41,48 miliar (26,48 persen), fungsi agama mengalami sedikit penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya (26,68 persen). Namun, realisasi ini tetap mencerminkan performa yang relatif stabil dalam pembinaan umat dan pengelolaan kegiatan keagamaan.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Fungsi ini mengalami penurunan yang sangat tajam, baik dari sisi alokasi maupun realisasi. Pagu turun dari Rp435,33 miliar menjadi hanya Rp8 miliar, dan realisasi hanya mencapai Rp1,11 miliar atau 13,86 persen. Ini menunjukkan penurunan drastis sebesar 98,59 persen secara nominal, sejalan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Fungsi Kesehatan

Anggaran fungsi kesehatan mengalami penurunan dari Rp149,05 miliar menjadi Rp117,08 miliar, dengan realisasi sebesar Rp28,37 miliar (24,23 persen). Persentase ini menurun 1,49 poin dibandingkan tahun lalu.

Fungsi Pendidikan

Sektor pendidikan mendapatkan alokasi Rp974,45 miliar dengan realisasi sebesar Rp199,61 miliar (20,48 persen), meningkat 9,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini mencerminkan



perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi perlindungan sosial menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup signifikan pada awal tahun 2025, dengan capaian realisasi mencapai 42,59 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 19,00 persen. Meskipun terjadi penurunan pagu anggaran dari semula Rp19,47 miliar menjadi Rp14,96 miliar, peningkatan persentase realisasi tersebut mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran lebih rendah, pelaksanaan program tetap berjalan secara optimal dan mampu menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat dan efisien.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan, Pertahanan, dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Realisasi fungsi ketertiban dan keamanan relatif stabil (25,38 persen), begitu pula pertahanan (27,97 persen) yang sedikit menurun. Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup mencatat realisasi 25,80 persen, naik dari 19,84 persen tahun sebelumnya, meskipun mengalami penurunan pagu.

Belanja pemerintah Provinsi Bengkulu pada Triwulan I 2025 menunjukkan pola yang beragam antar fungsi. Beberapa sektor seperti pendidikan dan perlindungan sosial mencatatkan kinerja positif, sementara sektor ekonomi dan perumahan menunjukkan penurunan signifikan. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan, perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi penyaluran anggaran di sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih optimal.

Analisis Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Unit Organisasi



Tabel 2.12 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah 10 K/L Realisasi Terbesar Triwulan I Tahun 2025 (Miliar Rupiah)

Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi	%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	837,88	209,83	25,04
Kementerian Agama	785,64	193,03	24,57
Kementerian Pekerjaan Umum	718,87	41,65	5,79
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi	271,59	39,39	14,50
Kementerian Pertahanan	209,18	58,51	27,97
Kejaksaan Republik Indonesia	147,89	36,14	24,44
Mahkamah Agung	129,51	36,8	28,41
Kementerian Pertanian	108,8	2,35	2,16
Komisi Pemilihan Umum	84,22	21,64	25,69
Kementerian Perhubungan	82,3	22,49	27,33

Sumber: Sintesa (diolah dari data tarikan 22 Mei 2025)

Berdasarkan data 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan realisasi belanja terbesar di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I 2025, realisasi nominal tertinggi tercatat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp209,83 miliar, diikuti oleh Kementerian Agama sebesar Rp193,03 miliar dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp58,51 miliar.

Dari sisi capaian realisasi, Mahkamah Agung mencatat realisasi tertinggi sebesar 28,41 persen, diikuti oleh Kementerian Pertahanan (27,97 persen), dan Kementerian Perhubungan (27,33 persen). Sementara itu, realisasi terendah tercatat pada Kementerian Pertanian sebesar 2,16 persen dan Kementerian PUPR

5,79 persen, meskipun kedua K/L ini memiliki pagu anggaran yang cukup besar.

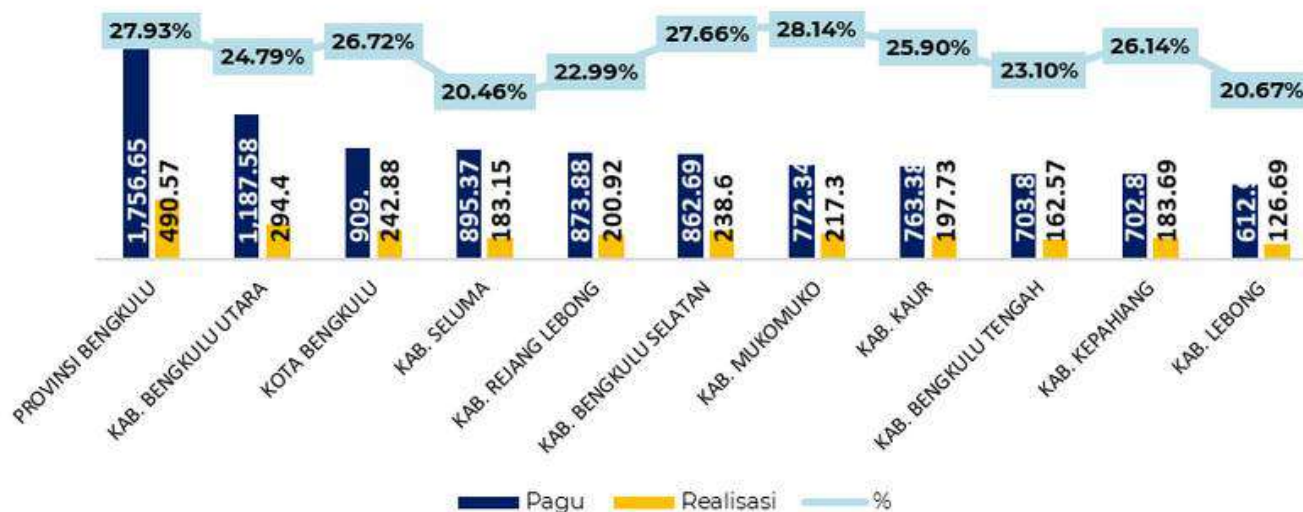
Secara umum, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang bervariasi. Beberapa K/L mencatatkan penyerapan anggaran yang cukup baik di awal tahun, sementara sebagian lainnya masih berada di bawah 25 persen. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Diharapkan pada triwulan berikutnya, realisasi belanja akan meningkat seiring dengan percepatan pelaksanaan kegiatan dan perbaikan tata kelola anggaran.



Analisis Belanja Transfer ke Daerah Berdasarkan Pemerintah Daerah



Grafik 2. 6 Pagu dan Realisasi Transfer ke Daerah per Pemda, Triwulan I 2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN-TKD (diolah)

Hingga Maret 2025, realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Bengkulu menunjukkan variasi capaian antarpemerintah daerah. Dari sisi nominal, alokasi pagu tertinggi tercatat pada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp1,756 triliun, dengan realisasi sebesar Rp490,57 miliar atau 27,93 persen. Kabupaten Bengkulu Utara menempati urutan kedua dalam hal alokasi pagu, yaitu sebesar Rp1,187 triliun, dengan realisasi sebesar Rp294,4 miliar atau 24,79 persen.

Jika dilihat dari persentase realisasi terhadap pagu, capaian tertinggi dicatat oleh Kab. Mukomuko sebesar 28,14 persen (Rp217,93 miliar dari pagu Rp772,34 miliar), diikuti oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 27,66 persen dan Provinsi Bengkulu sebesar 27,93 persen. Sementara itu, tingkat realisasi terendah tercatat pada Kabupaten Seluma sebesar 20,46 persen dan Kabupaten Lebong sebesar 20,67 persen.

Secara umum, hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, mayoritas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu masih mencatatkan tingkat realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang berada di bawah 30 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses penyaluran dan pemanfaatan dana TKD oleh pemerintah daerah masih berjalan lambat dan belum optimal.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek administratif seperti keterlambatan dalam proses penganggaran dan verifikasi dokumen, maupun dari sisi teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, masih terdapat ruang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan, baik dalam hal penyelesaian prosedur administrasi maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan, agar pemanfaatan TKD dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Analisis Belanja Negara per Kapita



Hingga Triwulan I Tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp26,53 triliun, meningkat 7,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp24,67 triliun. Kenaikan ini turut mendorong peningkatan PDRB per kapita dari Rp11,68 juta menjadi Rp12,56 juta atau tumbuh 7,54 persen secara tahunan (year-on-year).

Namun demikian, realisasi Belanja Negara per kapita justru mengalami penurunan. Total Belanja Negara—

yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)—mencapai Rp3,09 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,19 triliun. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.112.235 jiwa (Data terakhir BPS Tahun 2024), nilai belanja negara per kapita menurun dari Rp1,51 juta pada Triwulan I 2024 menjadi Rp1,46 juta pada Triwulan I 2025, atau berkontraksi sebesar 3,10 persen.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi tajam pada Belanja Pemerintah Pusat yang turun sebesar 29,29 persen, dari Rp1,15 triliun menjadi Rp810,73 miliar.



Tabel 2. 13 Kontribusi Belanja Pemerintah per Kapita Triwulan I, 2024 – 2025 (Rupiah)

Uraian	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2024	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Growth (%)
PDRB	24.669.440.160.000	26.530.060.000.000	▲ 7,54
Belanja Pemerintah Pusat	1.146.552.332.090	810.727.103.110	▼ 29,29
Belanja TKDD	2.045.205.885.254	2.282.164.290.893	▲ 11,59
Penduduk (jiwa)	2.112.235	2.112.235	0,00
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	11.679.306,59	12.560.183,88	▲ 7,54
Belanja Per Kapita (Rp/jiwa)	1.511.081,02	1.464.274,28	▼ 3,10

Sumber: BPS, OMSPAN (diolah)

Sementara itu, belanja TKDD justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 11,59 persen, dari Rp2,05 triliun menjadi Rp2,28 triliun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran fiskal daerah.

Penurunan belanja negara per kapita turut mencerminkan adanya penyesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa yang masih ditunda oleh sejumlah satuan kerja. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi belanja negara sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Efektivitas Belanja Pemerintah. Instruksi tersebut mendorong kementerian dan lembaga untuk meninjau kembali prioritas belanja serta menunda kegiatan yang belum bersifat mendesak.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa indikator makroekonomi, seperti PDRB per kapita, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, penurunan pada belanja pemerintah per kapita menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan output ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan belanja yang proporsional untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi dalam penggunaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program, agar belanja publik dapat memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan sosial ekonomi di Provinsi Bengkulu.

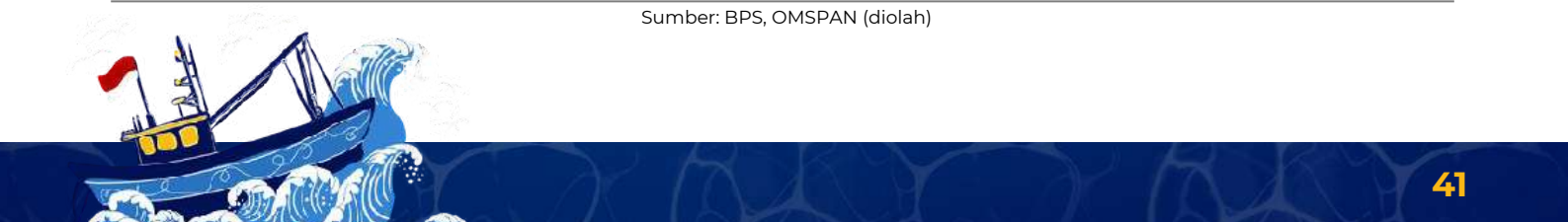
Analisis Capaian Program Prioritas Nasional



Tabel 2. 14 Pagu dan Realisasi Program Prioritas Nasional Triwulan I 2025 (Miliar Rupiah)

No	Uraian Program Prioritas	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	24,06	10,85	45,09
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	28,38	8,97	31,60
3	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	394,9	26,02	6,59
4	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	0,7	0,01	1,02
5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	2,53	0,41	16,38
6	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	209,66	20,7	9,87
7	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	33,43	2,84	8,49
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	21,49	1,12	5,19
Jumlah		715,14	70,91	9,92

Sumber: BPS, OMSPAN (diolah)



Hingga Triwulan I Tahun 2025, capaian realisasi belanja terhadap Program Prioritas Nasional (PN) di Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang masih relatif rendah, dengan total realisasi sebesar Rp70,91 miliar dari total pagu sebesar Rp715,14 miliar, atau baru mencapai 9,92 persen dari keseluruhan anggaran.

Dari sisi persentase realisasi, program “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” mencatat persentase tertinggi, yakni sebesar 45,09 persen dari pagu sebesar Rp24,06 miliar.

Program dengan pagu terbesar adalah “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” dengan alokasi sebesar Rp209,66 miliar. Namun, hingga Maret 2025, realisasi baru mencapai Rp20,70 miliar atau 9,87 persen.

Sementara itu, program dengan realisasi terendah secara persentase adalah “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” yang baru mencapai 1,02 persen dari pagu sebesar Rp0,7 miliar. Rendahnya serapan ini dapat dikaitkan dengan masih terbatasnya aktivitas program pembangunan desa serta sejumlah kendala administratif, termasuk penyaluran Dana Desa yang juga mengalami kontraksi.

Secara umum, seluruh prioritas nasional masih menunjukkan realisasi yang belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelesaian hambatan administratif di tingkat pelaksana. Pemerintah daerah bersama satuan kerja perlu memperkuat koordinasi untuk memastikan bahwa belanja yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan di daerah.

Prognosis Belanja Negara s.d. Triwulan IV 2025



Tabel 2. 15 Prognosis Belanja s.d. Akhir Tahun 2025 (Miliar Rupiah)

Uraian	Belanja K/L		Belanja TKD	
	Prog.	Real	Prog.	Real
Hingga Triwulan I	923,06	810,73	2.418,54	2.538,50
April	400,09	0,00	658,36	0,00
Mei	344,77	0,00	730,31	0,00
Juni	400,67	0,00	841,37	0,00
Juli	432,68	0,00	1.164,49	0,00
Agustus	397,9	0,00	677,74	0,00
September	403,94	0,00	934,22	0,00
Oktober	398,69	0,00	961,88	0,00
November	431,27	0,00	843,45	0,00
Desember	674,16	0,00	810,07	0,00

Sumber: Sintesa (diolah)

Berdasarkan prognosis belanja hingga akhir tahun 2025, total proyeksi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diperkirakan mencapai Rp4.707,32 miliar. Hingga Triwulan I 2025, realisasi belanja K/L telah mencapai Rp810,73 miliar atau sekitar 87,85 persen dari prognosis Triwulan I sebesar Rp923,06 miliar. Hal ini merupakan dampak terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di seluruh lini.

Sementara itu, pada Belanja Transfer ke Daerah (TKD), prognosis belanja hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp9.040,43 miliar. Hingga akhir Maret 2025, realisasi TKD telah mencapai Rp2.538,50 miliar, yang mana melampaui prognosis awal Triwulan I sebesar Rp2.418,54 miliar atau mengalami deviasi positif sebesar Rp119,96 miliar (4,96%). Capaian ini menunjukkan penyaluran TKD yang relatif progresif di awal tahun.





Dengan masih tersisa waktu tiga triwulan ke depan, terdapat ruang yang cukup besar untuk mempercepat realisasi belanja, baik pada Belanja K/L maupun Belanja TKD.

2.1.3 Surplus/Defisit APBN

Tabel 2.16 Perbandingan Defisit APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan I 2024-2025 (Miliar Rupiah)

Uraian	2024	2025	Growth (%)
Pendapatan Negara	528,44	509,04	▼3,67
Belanja Negara	3.486,59	3.349,23	▼3,94
Surplus/Defisit	(2.958,15)	(2.840,19)	▼3,99

Sumber: OMSPAN (diolah)

Pada Triwulan I Tahun 2025, defisit APBN di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp2.840,19 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.958,15 miliar. Penurunan defisit ini sejalan dengan penurunan belanja negara sebesar 3,94 persen, dari Rp3.486,59 miliar pada 2024 menjadi Rp3.349,23 miliar pada 2025. Di sisi lain, pendapatan negara juga mengalami penurunan sebesar 3,67 persen, dari Rp528,44 miliar menjadi Rp509,04 miliar.

Meskipun terdapat penurunan defisit hal ini belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan pendapatan melainkan karena turunnya realisasi belanja negara akibat adanya kebijakan efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

2.1.4 Isu Pelaksanaan APBN Provinsi Bengkulu

1. Terdapat kontraksi pada salah satu komponen Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri yaitu PPH Non Migas sebesar 34,93% yang disebabkan oleh beberapa hal:
 - a. Kebijakan pemusatan atas Wajib Pacak Cabang sesuai PMK Nomor: 136/PMK.03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah Kebijakan efisiensi belanja tahun anggaran 2025
 - b. Penurunan angsuran PPh Pasal 25 Masa hingga Maret 2025 disebabkan karena belum disampaikannya SPT Tahunan oleh sebagian besar Wajib Pajak Badan yang merupakan kontributor utama penerimaan PPh Pasal 25, sementara besaran angsuran PPh Pasal 25 baru dapat ditentukan setelah SPT Tahunan disampaikan (tenggat pelaporan 30 April).
2. Terdapat kontraksi penerimaan cukai sebesar 98,59% (yoy) disebabkan oleh berkurangnya pelanggaran di bidang cukai yang penyelesaiannya menggunakan metode ultimum remedium (prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi pidana harus dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, setelah upaya-upaya lain (seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, atau negosiasi) dianggap tidak memadai.
3. Terdapat kontraksi penerimaan bea masuk sebesar 48,03% (yoy) terjadi karena jumlah pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Kontraksi penerimaan bea keluar sebesar 100% (yoy) disebabkan oleh tertundanya rencana ekspor cangkang kernel sawit akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Kondisi ini menyebabkan biaya pemuatan meningkat karena harus menggunakan mekanisme ship to ship. Situasi terkini per 31 Maret 2025, diketahui bahwa Pelindo sedang melaksanakan pengerukan dan pengerukan alur Pulau Baai, dengan alokasi total dana sekitar Rp1 triliun.
5. Terdapat penurunan PNPB Lainnya sebesar 8,25% (yoy) disebabkan karena penurunan penerimaan pada satuan kerja Ditlantas Polda Bengkulu yang merupakan kontributor terbesar dalam Penerimaan PNPB Lainnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan terkait pengurusan BPKB, pendapatan STNK, pendapatan TNKB (penjualan kendaraan baru turun) dan adanya shifting PNPB pada satker UIN FaS yang menjadi satker Badan layanan Umum.
6. Terdapat kontraksi pada Belanja Pemerintah Pusat sebesar 29,29%. Hal ini disebabkan karena terdapat kontraksi signifikan pada Belanja Barang dan Belanja Modal.
 - a. Kontraksi pada Belanja Barang sebesar 64,63% terjadi sebagai bentuk efisiensi belanja yang dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Kontraksi pada Belanja Modal sebesar 54,78% disebabkan oleh penyesuaian dalam proses pengadaan barang/jasa yang masih ditahan
 - b. oleh satuan kerja, sejalan dengan hasil identifikasi efisiensi belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.





7. Terdapat kontraksi realisasi Dana Desa dengan persentase sebesar 13,06% dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa pada tahun 2025 mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga Maret 2025, tercatat sebanyak 723 desa telah menerima penyaluran, sementara pada Maret 2024 jumlahnya mencapai 1.340 desa, menunjukkan kontraksi sebesar 46,04%.
 - b. Permasalahan hukum di 3 desa pada Provinsi Bengkulu Bengkulu (Desa Suro Bali di Kab. Kepahiang, Desa Gunung Kaya di Kab. Kaur, dan Desa Sebelat di Kab. Lebong) tahun 2024, yang berdampak pada penyaluran Dana Desa tahun ini.
8. Dengan adanya rekonstruksi alokasi TKD, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih cepat dalam menyesuaikan kembali APBD Tahun 2025, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
9. Hingga bulan Maret 2025, belum terdapat penyaluran DAK Fisik. Namun, beberapa pemda sudah mulai melengkapi dokumen persyaratan penyaluran.
10. Hingga 31 Maret 2025, TPG ASN Daerah Regional Bengkulu telah disalurkan kepada 9.670 guru ASN dengan total penyaluran sebesar Rp110,24 miliar (netto), dengan jumlah retur 6 (enam) rekening penerima dengan nilai retur sebesar Rp 69.951.810,-

2.1.5 Rekomendasi Kebijakan Isu Pelaksanaan APBN Provinsi Bengkulu

1. Kontraksi PPh Non Migas

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kanwil DJP Bengkulu-Lampung dapat meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada Wajib Pajak untuk menguatkan komunikasi dan edukasi tentang pentingnya penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu untuk menjaga kesinambungan pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Pemerintah Daerah melalui Bapenda juga dapat berperan aktif dengan menjalin koordinasi lintas instansi untuk mengidentifikasi potensi WP Badan strategis yang bisa dioptimalisasi penerimaannya.

2. Kontraksi penerimaan cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat memperkuat patroli kawasan industri berisiko tinggi dan membina kerja sama dengan Satpol

PP dan Pemda dalam pengawasan barang kena cukai ilegal, agar potensi penerimaan tetap terjaga meski pelanggaran berkurang.

3. Kontraksi penerimaan bea masuk

DJBC Bersama Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mendukung perluasan kanal edukasi mengenai prosedur impor yang sah kepada pelaku usaha.

4. Kontraksi penerimaan bea keluar

Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo harus mempercepat proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai secara terencana dan transparan. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu turut mendukung perbaikan baik dukungan fiskal maupun dukungan teknis. Koordinasi lintas K/L/Pemda perlu diperkuat agar hambatan logistik tidak kembali terjadi.

5. Penurunan PNBP Lainnya

Polda Bengkulu melalui Ditlantas dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengidentifikasi solusi peningkatan layanan registrasi kendaraan bermotor secara digital guna memudahkan akses masyarakat dan meningkatkan kepatuhan.

6. Kontraksi Belanja Pemerintah Pusat

Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dapat memperkuat monitoring atas proses pengadaan dan mempercepat asistensi penyusunan dokumen pengadaan oleh satuan kerja. Hal ini sejalan dengan arah efisiensi belanja pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Satuan kerja pusat dan daerah diimbau segera menetapkan rencana kerja detail agar belanja tidak terkonsentrasi di akhir tahun.

7. Kontraksi Dana Desa

Kementerian Desa PDTT bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan pendampingan teknis kepada desa dalam pemenuhan persyaratan penyaluran dana. Inspektorat Daerah juga perlu mempercepat penyelesaian kasus hukum desa yang berimbas pada keterlambatan penyaluran. Kolaborasi antara Dinas PMD kabupaten/kota dan kejaksan setempat dapat memperkuat aspek preventif dan penyelesaian sengketa desa.

8. Rekonstruksi Alokasi TKD

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah diharapkan melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada pemda dalam



menyesuaikan dokumen APBD berdasarkan alokasi baru TKD. Pemda perlu mengoptimalkan SIPD untuk mempercepat penyesuaian dan memastikan penyerapan anggaran tidak terhambat.

9. Belum terdapat penyaluran DAK Fisik

Kanwil DJPb Bengkulu bersama Bappeda Provinsi dapat mendorong pemda agar proaktif mengunggah dokumen tahap I tepat waktu.

10. Penyaluran TPG ASN Daerah

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan perlu mengoptimalkan pemutakhiran data guru penerima dan melakukan validasi rekening secara berkala untuk mencegah retur. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia juga diharapkan memperkuat sistem integrasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem penyaluran TPG agar akurasi dan ketepatan waktu penyaluran semakin baik.

2.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBD diarahkan untuk menyediakan layanan publik yang efisien dan

menjaga stabilitas ekonomi lokal. Di Provinsi Bengkulu, tantangan masih terlihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sebesar 4,84 persen dan tingkat kemiskinan yang mencapai 12,52 persen. Oleh karena itu, APBD disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah guna menjawab tantangan pembangunan secara tepat.

Tabel 2.17 Laporan Realisasi APBD di Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2024- 2025 (Miliar Rupiah)

i-Account	Tahun 2024			Tahun 2025			Growth
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	%
PENDAPATAN DAERAH	13.591,45	1.828,88	13,46	13.314,22	1.776,95	13,35	▼ 2,84
Pendapatan Asli Daerah	2.208,79	208,11	9,42	1.864,79	180,24	9,67	▼ 13,39
Pendapatan Transfer	11.289,84	1.620,77	14,36	11.333,38	1.596,71	14,09	▼ 1,48
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	92,82	0,00	0,00	116,05	32,63	28,12	N/A
B. BELANJA DAERAH	13.978,05	1.429,89	10,23	13.780,47	1.286,76	9,34	▼ 10,01
BELANJA OPERASI	9.940,34	1.282,	12,90	9.907,64	1.153,37	11,64	▼ 10,03
Belanja Pegawai	6.214,66	1.110,7	17,87	5.673,37	882,54	15,56	▼ 20,54
Belanja Barang dan Jasa	3.487,78	153,88	4,41	3.560,1	202,14	5,68	▲ 31,36
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	N/A
Belanja Hibah	230,44	17,41	7,56	663,41	68,39	10,31	▲ 292,74
Belanja Bantuan Sosial	7,46	0,00	0,00	10,62	0,3	2,83	N/A
BELANJA MODAL	2.181,08	22,43	1,03	1.915,99	28,6	1,49	▲ 27,49
Belanja Modal	2.181,08	22,43	1,03	1.915,99	28,6	1,49	▲ 27,49
BELANJA TIDAK TERDUGA	28,16	0,00	0,00	35,04	0,2	0,57	N/A
Belanja Tidak Terduga	28,16	0,00	0,00	35,04	0,2	0,57	N/A
BELANJA TRANSFER	1.828,47	125,46	6,86	1.921,8	104,58	5,44	▼ 16,64
Belanja Bagi Hasil	245,06	1,17	0,48	340,95	6,81	2,00	▲ 483,66
Belanja Bantuan Keuangan	1.583,41	124,3	7,85	1.580,85	97,77	6,1	▼ 21,34
SURPLUS/(DEFISIT)	(386,6)	398,98	(103,20)	(466,25)	490,19	(105,13)	▲ 22,86
PEMBIAYAAN	411,6	84,26	20,47	497,65	77,01	15,48	▼ 8,60
Penerimaan Pembiayaan	399,1	86,26	21,61	481,95	77,01	15,98	▼ 10,72
Pengeluaran Pembiayaan	12,5	2	16	15,7	0,00	0,00	▼ 100
SILPA/(SIKPA)	25	483,24	1932,97	27.592,33	567,2	2,06	▲ 17,37

Sumber: GFS (diolah)



Pada sisi pendapatan, total target Pendapatan Daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp13.314,22 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan target tahun 2024. Hingga akhir Triwulan I 2025, realisasinya telah mencapai Rp1.776,95 miliar atau 13,35 persen dari total pagu. Capaian ini relatif stabil dibandingkan dengan realisasi Triwulan I 2024 yang sebesar 13,46 persen. Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama penerimaan daerah dengan realisasi sebesar Rp1.596,71 miliar (14,09 persen), diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp180,24 miliar (9,67 persen). Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan peningkatan signifikan, dari nihil pada Triwulan I tahun sebelumnya menjadi Rp32,63 miliar pada tahun 2025.

Dari sisi belanja, pagu Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp13.780,47 miliar sedikit menurun dibandingkan pagu tahun sebelumnya. Namun, realisasi belanja hingga akhir Triwulan I 2025 baru mencapai Rp1.286,76 miliar atau 9,34 persen, lebih rendah dibandingkan realisasi Triwulan I 2024 yang mencapai 10,23 persen. Belanja Operasi mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp1.153,37 miliar (11,64 persen), sementara Belanja Modal mencapai Rp28,6 miliar (1,49 persen), dan Belanja Transfer tercatat Rp104,58 miliar (5,44 persen). Beberapa komponen seperti Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial mencatat realisasi yang sangat rendah hingga akhir Triwulan I 2025.

Sementara itu, pada sisi pembiayaan, realisasi Penerimaan Pembiayaan tercatat sebesar Rp77,01 miliar, tanpa adanya realisasi Pengeluaran Pembiayaan hingga akhir Triwulan I. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp567,2 miliar, menunjukkan ruang fiskal yang relatif besar pada awal tahun anggaran.

Secara keseluruhan, pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan pelaksanaan fiskal yang hati-hati di tengah dinamika ekonomi daerah.

2.2.1 Analisis Perkembangan Pendapatan Daerah

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp1.776,95 miliar, atau mencapai 13,35 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp13.314,22 miliar. Dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I 2024 yang sebesar Rp1.828,88 miliar atau 13,46 persen dari pagu Rp13.591,45 miliar, kinerja pendapatan daerah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,84 persen secara *year-on-year* (yoy).

Dari sisi komponen, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan signifikan, dari Rp208,11 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi Rp180,24 miliar pada Triwulan I 2025. (kontraksi 13,39 persen yoy), atau secara nominal berkurang sebesar Rp27,87 miliar. Meskipun demikian, persentase realisasi terhadap pagu justru meningkat dari 9,42 persen menjadi 9,67 persen, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target tahunan PAD 2025 yang lebih rendah dibandingkan 2024.

Pendapatan Transfer, sebagai komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, juga mengalami penurunan tipis dari Rp1.620,77 miliar menjadi Rp1.596,71 miliar, atau menyusut sebesar Rp24,06 miliar (kontraksi 1,48 persen yoy).

Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan kinerja positif, dengan realisasi sebesar Rp32,63 miliar pada Triwulan I 2025, dibandingkan tahun 2024 yang tidak memiliki realisasi. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan relatif kecil, pertumbuhan komponen ini menandai adanya potensi baru yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu pada Triwulan I 2025 mengalami perlambatan yang ditandai oleh penurunan dua komponen utama—PAD dan Pendapatan Transfer, yang secara kumulatif menyebabkan penurunan agregat meskipun terdapat kontribusi baru dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini menegaskan perlunya optimalisasi strategi ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan, serta pemantauan ketat terhadap realisasi belanja agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal yang lebih luas pada triwulan berikutnya.

Analisis Perkembangan Tax Ratio (APBD)



Berdasarkan data hingga Triwulan I Tahun 2025, Penerimaan Perpajakan Daerah Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp182 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp144 miliar. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan 26,38 persen secara *year-on-year* (yoy), menunjukkan upaya intensifikasi pemungutan pajak yang mulai membuahkan hasil.

Sebagai hasilnya, rasio pajak daerah (tax ratio)—yang mencerminkan kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDRB—meningkat dari 0,58 persen menjadi 0,68 persen, atau tumbuh sebesar 17,24 persen secara proporsional.



Tabel 2. 18 **Tax Ratio (Rupiah)**

Uraian	Realisasi s.d Triwulan I 2024	Realisasi s.d Triwulan I 2025	Growth (%)
Penerimaan Perpajakan Daerah	0,144 T	0,182 T	▲ 26,38
PDRB	24,67 T	26,53 T	▲ 7,54
Tax Ratio	0,58%	0,68%	▲ 17,24

Sumber: GFS (diolah)

Meskipun nilai absolutnya masih relatif rendah, peningkatan ini menunjukkan perbaikan kinerja fiskal daerah dari sisi penerimaan yang bersumber dari potensi ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengoptimalkan basis penerimaan daerah secara lebih efektif, yang pada gilirannya dapat memperkuat

Analisis Kemandirian Fiskal Pemda



Tabel 2. 19 **Rasio Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I 2025**

Nama Pemda	Rasio Kemandirian Fiskal	Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Bengkulu	36,59	Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Bengkulu Utara	3,36	Rendah	>25-50%	Konsultatif
Bengkulu Selatan	3,86	Sedang	>50-75%	Partisipatif
Rejang Lebong	4,75	Tinggi	>75-100%	Delegatif
Seluma	0,86			
Kaur	3,68			
Muko-Muko	4,33			
Lebong	0,00			
Kepahiang	3,79			
Bengkulu Tengah	3,53			
Kota Bengkulu	21,65			
Bengkulu (Total)	7,85			

Sumber: Dit. PA (diolah)

Rasio kemandirian fiskal merefleksikan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintahannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan ketergantungan terhadap transfer pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri suatu daerah secara fiskal.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, rata-rata rasio kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 7,85 persen, tergolong rendah sekali dalam klasifikasi kemampuan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Bengkulu masih bergantung secara dominan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

kemandirian fiskal serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Ke depan, peningkatan tax ratio dapat terus didorong melalui strategi ekstensifikasi basis pajak serta perbaikan sistem administrasi dan kepatuhan pajak daerah, guna mendukung keberlanjutan fiskal yang lebih sehat dan mandiri.

Berdasarkan klasifikasi rasio kemandirian fiskal, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu berada pada pola hubungan instruktif, yang berarti peran dana transfer dari pemerintah pusat masih dominan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Detail per wilayah adalah sebagai berikut:

- Provinsi Bengkulu memiliki rasio tertinggi sebesar 36,59 persen, masuk kategori “rendah”, dengan pola hubungan instruktif, menunjukkan ketergantungan yang mulai berkurang. Hal ini wajar karena provinsi memiliki otoritas atas jenis-jenis pajak bernilai besar dan cakupan wilayah ekonomi lebih luas.
- Di tingkat kabupaten/kota, Kota Bengkulu memiliki rasio tertinggi berikutnya sebesar 21,65





persen, namun masih berada dalam kategori “rendah sekali”. Meskipun sebagai pusat aktivitas ekonomi, sumber-sumber penerimaan belum teroptimalkan sepenuhnya.

- Kabupaten lainnya memiliki rasio sangat rendah, berkisar antara 0 persen hingga 4,75 persen: Rejang Lebong (4,75%), Muko-Muko (4,33%), Bengkulu Selatan (3,86%), Kepahiang (3,79%), dan Kaur (3,68%)—seluruhnya masih masuk dalam kategori “rendah sekali” dan pola hubungan instruktif.
- Kabupaten Lebong mencatatkan rasio 0 persen, menandakan ketergantungan penuh terhadap dana transfer pusat.

2.2.2 Analisis Perkembangan Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I 2025 mencapai Rp1.286,76 miliar atau 9,34 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp13.780,47 miliar. Capaian ini mencerminkan penurunan kinerja belanja jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana realisasi Belanja Daerah mencapai Rp1.429,89 miliar atau 10,23 persen dari pagu. Meskipun terdapat penurunan secara persentase, hal ini perlu ditelaah lebih lanjut dalam konteks perbaikan proses perencanaan dan efisiensi pelaksanaan belanja di awal tahun. Penurunan realisasi APBD dapat disebabkan karena keterlambatan penetapan APBD Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yang baru disahkan pada 20 Januari 2025.

Belanja Operasi

Belanja Operasi masih menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan realisasi mencapai Rp1.153,37 miliar atau 11,64 persen dari pagu.

Meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan I 2024 yang mencapai Rp1.282,00 miliar (12,90 persen dari pagu). Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp882,54 miliar dan tetap menjadi komponen dominan (76,49 persen dari Belanja Operasi), meskipun mengalami penurunan dari Rp1.110,70 miliar pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan dari Rp153,88 miliar menjadi Rp202,14 miliar (naik 31,36 persen), menunjukkan adanya percepatan belanja untuk kebutuhan layanan publik.

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal masih relatif rendah, yaitu sebesar Rp28,60 miliar atau 1,49 persen dari total pagu Rp1.915,99 miliar. Meskipun mengalami peningkatan efisiensi anggaran sehingga daerah perlu melakukan penyesuaian perencanaan anggaran sehingga realisasi belanja turut mengalami penundaan.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp0,20 miliar atau 0,57 persen dari pagu Rp35,04 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak menunjukkan aktivitas penyerapan anggaran pada jenis belanja ini hingga triwulan I.

Belanja Transfer

Belanja Transfer hingga Triwulan I 2025 terealisasi sebesar Rp104,58 miliar atau 5,44 persen dari pagu Rp1.921,80 miliar. Capaian ini lebih rendah dari periode yang sama tahun 2024 (Rp125,46 miliar atau 6,86 persen). Penurunan ini terutama berasal dari Belanja Bantuan Keuangan yang turun 21,41 persen secara nominal. Sementara itu, Belanja Bagi Hasil justru mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,17 miliar menjadi Rp6,81 miliar.

Analisis Belanja Daerah per Kapita



Tabel 2. 20 Kontribusi Belanja Daerah per Kapita Triwulan I, 2024 – 2025 (Rupiah)

Uraian	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2024	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Growth (%)
PDRB	24.669.440.160.000	26.530.060.000.000	▲ 7,54
Belanja Daerah	1.429.894.548.516	1.286.756.396.921	▼ 10,01
Penduduk (jiwa)	2.112.235	2.112.235	0,00
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	2.112.235	2.112.235	▲ 7,54
Belanja Per Kapita (Rp/jiwa)	676.958,08	609.191,87	▼ 10,01

Sumber: BPS, GFS (diolah)

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu tercatat

sebesar Rp26,53 triliun, meningkat 7,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp24,67 triliun. Kenaikan ini turut mendorong tahunan (year-on-year).



Namun demikian, realisasi Belanja Daerah per kapita justru mengalami penurunan. Total belanja pemerintah daerah hingga Triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp1,29 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,43 triliun. Dengan jumlah penduduk yang tetap sebesar 2.112.235 jiwa (berdasarkan data BPS terakhir), belanja daerah per kapita menurun dari Rp676.958,08 menjadi Rp609.191,87, atau terkontraksi sebesar 10,01 persen.

Penurunan belanja per kapita ini mengindikasikan adanya penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang kemungkinan terkait

dengan kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2025 atau pergeseran prioritas belanja. Hal ini penting untuk dicermati karena meskipun indikator makroekonomi seperti PDRB menunjukkan tren positif, penurunan belanja daerah per kapita dapat mempengaruhi daya dorong fiskal pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan menjadi krusial agar belanja daerah tetap dapat memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu

2.2.2 Surplus/Defisit APBD

Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah di beberapa pemerintah daerah.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Triwulan I Tahun 2025, berikut kondisi surplus atau defisit anggaran pada masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu:

Tabel 2. 21 Surplus/Defisit Seluruh Pemda Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I 2025 (Rupiah)

No.	Pemda	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Ket
1.	Provinsi Bengkulu	308.921.663.227	380.324.811.954	(71.403.148.727)	DEFISIT
2.	Bengkulu Utara	98.412.805.995	77.530.597.420	20.882.208.575	SURPLUS
3.	Bengkulu Selatan	218.037.918.711	185.360.344.019	32.677.574.692	SURPLUS
4.	Rejang Lebong	150.767.624.792	118.039.693.823	32.727.930.969	SURPLUS
5.	Seluma	177.302.452.928	85.007.294.556	92.295.158.372	SURPLUS
6.	Kaur	192.669.322.771	94.430.842.878	98.238.479.893	SURPLUS
7.	Muko-Muko	60.397.641.086	37.763.674.293	22.633.966.793	SURPLUS
8.	Lebong	70.924.866.800	31.682.746.855	39.242.119.945	SURPLUS
9.	Kepahiang	190.597.685.245	148.636.748.194	41.960.937.051	SURPLUS
10.	Bengkulu Tengah	117.639.112.367	78.092.370.372	39.546.741.995	SURPLUS
11.	Kota Bengkulu	247.462.991.774	197.281.567.330	50.181.424.444	SURPLUS

Sumber: GFS (diolah)

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami defisit sebesar Rp71,40 miliar, menandakan bahwa belanja daerah masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima pada awal tahun anggaran.

Di sisi lain, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mencatatkan surplus anggaran, yang menunjukkan belum optimalnya realisasi belanja daerah pada awal tahun.



Surplus tertinggi tercatat di Kabupaten Kaur sebesar Rp98,24 miliar, disusul oleh Kabupaten Seluma sebesar Rp92,30 miliar, dan Kota Bengkulu sebesar Rp50,18 miliar. Kabupaten lainnya juga menunjukkan tren serupa dengan surplus bervariasi antara Rp20 hingga Rp41 miliar. Kondisi surplus yang cukup besar di tingkat kabupaten/kota pada awal tahun anggaran ini dapat disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun anggaran 2025 sehingga beberapa daerah cenderung menunda realisasi belanja, khususnya pada pos belanja barang dan jasa serta belanja modal.

2.2.4 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp77,01 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp9,25 miliar atau

turun 10,72 persen dibandingkan periode yang samatahun 2024 sebesar Rp86,26 miliar. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau turunnya kapasitas penerimaan dari sumber-sumber pembiayaan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan pada Triwulan I 2025 tercatat nihil, mengalami penurunan signifikan dari Rp2,0 miliar pada tahun sebelumnya, atau turun sebesar 100 persen (yoy). Ini menunjukkan tidak adanya alokasi dana untuk penyertaan modal daerah atau pengeluaran pembiayaan lainnya pada awal tahun 2025.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto pada Triwulan I 2025 mengalami penurunan sebesar 8,60 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi defisit anggaran yang cukup besar pada Triwulan I 2025 masih dapat ditutupi oleh pembiayaan netto yang tersedia, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp567,20 miliar, meningkat 17,37 persen dibandingkan Triwulan I 2024.

2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Daerah

Tabel 2. 22 LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu Triwulan I 2024-2025 (Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi Triwulan I 2024	Realisasi Triwulan I 2025	% Growth
Pendapatan Konsolidasi	767,29	741,4	▼ 3,38%
Pendapatan Perpajakan Konsolidasian	585,69	538,65	▼ 8,03
Pendapatan Negara Bukan Pajak	181,6	202,75	▲ 11,64
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	3.176,64	3.184,68	▲ 0,25
Belanja Pegawai	1.404,7	1.681,24	▲ 19,69
Belanja barang dan jasa	725,48	338,99	▼ 53,27
Belanja Modal	125,45	66,23	▼ 47,21
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	68,39	17,41	▼ 74,54
Belanja Bantuan Sosial	4,51	11,29	▲ 150,42
Belanja Lain-Lain	0,2	0,00	▼ 100
Belanja Transfer	847,91	1.069,52	▲ 26,14
Transfer Pemerintah Daerah	104,58	125,46	▲ 19,97
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	743,33	944,06	▲ 27,00
Surplus/(Defisit)	(2.409,35)	(2.443,29)	▲ 1,41
Pembiayaan	77,01	84,26	▲ 9,41
Penerimaan Pembiayaan	77,01	86,26	▲ 12,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	2,0	▲ 100,00
SILPA/(SIKPA)	(2.332,33)	(2.359,03)	▲ 1,14

Sumber: GFS (diolah)



2.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian merupakan elemen penting dalam struktur penerimaan fiskal daerah, yang mencerminkan kapasitas fiskal regional dalam mendanai berbagai program pembangunan. Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi pendapatan konsolidasian Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp741,40 miliar. Komponen utama yang membentuk pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan dengan realisasi sebesar Rp538,65 miliar atau menyumbang 72,64 persen terhadap total pendapatan konsolidasian. Sementara itu, penerimaan dari komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp202,75 miliar atau berkontribusi sebesar 27,36 persen.

Dari sisi pertumbuhan, pendapatan konsolidasian mengalami kontraksi sebesar 3,38 persen dibandingkan Triwulan I Tahun 2023 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp767,29 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan sebesar 8,03 persen atau senilai Rp47,04 miliar. Di sisi lain, penerimaan dari PNBP justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 11,64 persen atau naik Rp21,14 miliar. Meskipun demikian, peningkatan dari PNBP belum mampu menutupi penurunan dari penerimaan perpajakan, sehingga secara keseluruhan pendapatan konsolidasian menunjukkan pertumbuhan negatif.

Analisis Tax Ratio konsolidasian

Tax ratio merupakan indikator yang menggambarkan efektivitas pemungutan pajak terhadap kapasitas ekonomi daerah, yang diukur melalui perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB).

Pada Triwulan I 2025, tax ratio pajak konsolidasian Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 0,75 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan 2,74 persen dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I 2024 yang berada pada level 0,73 persen. Peningkatan tax ratio sebesar 0,02 persen poin ini sejalan dengan pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari Rp0,18 triliun menjadi Rp0,20 triliun, di tengah peningkatan PDRB dari Rp24,67 triliun menjadi Rp26,53 triliun.

Meskipun peningkatannya relatif moderat, tren positif ini mencerminkan perbaikan kinerja pemungutan pajak daerah yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 2. 23 Analisis Tax Ratio Pajak Konsolidasian Provinsi Bengkulu Triwulan I 2024-2025 (Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah	PDRB (ADHB)	Tax Ratio
Triwulan I 2024	0,18	24,67	0,73%
Triwulan I 2025	0,20	26,53	0,75%

Sumber: GFS (diolah)

2.3.2 Belanja Konsolidasian

Analisis Komposisi Komponen Belanja Konsolidasian



Pada Triwulan I 2025, total belanja konsolidasian di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp3,18 triliun. Komposisi terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp1,68 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 19,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja barang dan jasa dan belanja modal justru mengalami kontraksi masing-masing sebesar 53,27 persen dan 47,21 persen yang sejalan dengan adanya kebijakan efisien anggaran pada tahun 2025.

Di sisi lain, belanja bantuan sosial mengalami lonjakan tertinggi, yakni meningkat 150,42 persen, dari Rp4,51 miliar menjadi Rp11,29 miliar. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung perlindungan sosial masyarakat. Adapun belanja transfer juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 26,14 persen.

Analisis Pertumbuhan (Growth) Belanja Konsolidasian



Secara agregat, realisasi belanja pemerintah daerah pada Triwulan I 2025 tumbuh 0,25 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhannya relatif rendah, komposisi belanja menunjukkan adanya pergeseran kebijakan dari belanja pembangunan ke arah belanja pegawai dan bantuan sosial. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam optimalisasi efektivitas belanja daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



"Kami sedang menerapkan efisiensi dan efektivitas anggaran di seluruh Kementerian dan lembaga. Kami meninjau secara rinci alasan, mekanisme, dan jumlah aliran kas yang diminta untuk program-program mereka."

— Menteri Keuangan pada Mandiri Investment Forum, Februari 2025





Analisis Rasio Belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB



Pada Triwulan I 2025, rasio belanja konsolidasian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 11,99 persen, menurun dibandingkan Triwulan I 2024 yang berada pada level 12,89 persen. Penurunan rasio ini terjadi meskipun nominal realisasi belanja konsolidasian tetap sama, yakni sebesar Rp3,18 triliun, karena adanya pertumbuhan PDRB (ADHB) yang cukup signifikan dari Rp24,67 triliun menjadi Rp26,53 triliun. Penurunan rasio ini mencerminkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, sebagaimana tercermin dalam peningkatan PDRB, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja pemerintah. Meskipun demikian, besarnya nilai belanja pemerintah tetap memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian daerah, baik dalam mendorong aktivitas ekonomi maupun sebagai instrumen stabilisasi fiskal. Belanja pemerintah memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor-sektor produktif. Oleh karena itu, penting untuk terus mengarahkan belanja pemerintah pada sektor-sektor strategis yang mampu memberikan dampak berganda terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

Tabel 2. 24 Analisis Rasio Belanja Konsolidasian Provinsi Bengkulu s.d triwulan I Tahun 2025 (Triliun Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja Konsolidasi	PDRB (ADHB)	Rasio Belanja
Triwulan I 2024	3,18	24,67	12,89%
Triwulan I 2025	3,18	26,53	11,99%

Sumber: GFS (diolah)

2.3.3 Surplus/Defisit Konsolidasian

Kinerja konsolidasian APBN-APBD Provinsi Bengkulu pada Triwulan I 2025 menunjukkan kondisi defisit fiskal sebesar Rp2,44 triliun, sedikit meningkat dibandingkan Triwulan I 2024 yang mencatat defisit Rp2,41 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp33,94 miliar (1,41 persen secara tahunan).

Peningkatan defisit ini terjadi di tengah penurunan pendapatan konsolidasian sebesar 3,38 persen (yoy), dari Rp767,29 miliar menjadi Rp741,40 miliar.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan perpajakan sebesar 8,03 persen, meskipun pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan sebesar 11,64 persen. Di sisi lain, belanja tetap meningkat, terutama belanja pegawai (naik 19,69 persen) dan belanja transfer (naik 26,14 persen).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap dukungan dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, terutama dalam menjaga kesinambungan belanja untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja perlu terus diperkuat guna menciptakan ruang fiskal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

2.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Pada Triwulan I 2025, pembiayaan konsolidasian Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan sebesar 9,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dari Rp77,01 miliar menjadi Rp84,26 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya penerimaan pembiayaan yang tumbuh sebesar 12,00 persen, dari Rp77,01 miliar menjadi Rp86,26 miliar.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan mulai tercatat pada Triwulan I 2025 sebesar Rp2,00 miliar, setelah sebelumnya tidak terdapat pengeluaran pada Triwulan I 2024.

Kondisi pembiayaan ini mencerminkan strategi fiskal pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan belanja prioritas di tengah tekanan defisit, terutama dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan terkendali. Keberadaan pembiayaan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah secara keseluruhan, mengingat masih tingginya kebutuhan belanja pembangunan dan pelayanan publik.

2.3.5 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

1. Kebijakan realokasi anggaran di Provinsi Bengkulu berdampak pada penundaan realisasi sejumlah pos belanja, terutama pada komponen-komponen yang menjadi target efisiensi, seperti belanja perjalanan dinas yang selama ini memiliki porsi signifikan dalam struktur belanja daerah. Meskipun langkah ini selaras dengan prinsip efisiensi anggaran, realokasi tersebut menimbulkan tantangan dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas.



- Struktur APBD Provinsi Bengkulu juga mengalami penyesuaian sebagai respons terhadap arah kebijakan Gubernur terpilih. Perubahan ini diproyeksikan mengarah pada peningkatan alokasi untuk belanja infrastruktur, yang merefleksikan fokus pembangunan pada penguatan konektivitas wilayah, perbaikan sarana publik, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek fisik strategis.

2.3.6 Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis Pelaksanaan APBD

1. Penyusunan Skala Prioritas Belanja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama DPRD perlu menyusun skala prioritas belanja secara sistematis untuk memastikan keberlanjutan program-program layanan dasar dan strategis di tengah kebijakan efisiensi. Identifikasi pos-pos belanja yang masih memungkinkan untuk direalisasikan tanpa bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran, disertai dengan revisi anggaran untuk menjaga stabilitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

2.4 Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG merupakan salah satu QuickWins Pemerintahan Presiden Prabowo dengan alokasi anggaran pada awal tahun 2025 mencapai Rp 71 T dengan target penerima sejumlah 17,9 juta orang. Jumlah penerima MBG akan terus bertambah hingga ditargetkan mencapai 82,9 juta orang pada triwulan 4 tahun 2025 dengan alokasi anggaran menjadi Rp171 T.

Program MBG memiliki tujuan, antara lain untuk memastikan akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak untuk meningkatkan Kesehatan. Program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2.4.1 Data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Pada lingkup regional Bengkulu, telah dilaksanakan sharing session antara Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dengan Perwakilan dari Badan Gizi Nasional di wilayah Bengkulu.

2. Penguatan Asistensi dan Sinergi Antarlevel Pemerintahan

Pemerintah pusat diharapkan memberikan asistensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan APBD. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri perlu memastikan bahwa struktur belanja daerah tetap efisien, berkelanjutan, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

3. Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang berbasis pada data kebutuhan wilayah dan analisis manfaat ekonomi. Penguatan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur harus menjadi prioritas, dengan didukung oleh kolaborasi antardaerah serta keterlibatan mitra strategis. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong efisiensi belanja dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan diskusi terkait perkembangan pelaksanaan MBG di Provinsi Bengkulu.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Bengkulu sejumlah 8 satuan. 7 satuan SPPG telah beroperasi secara penuh dan 1 SPPG masih dalam proses beroperasi disebabkan karena belum menerima akun *virtual account*.

Tabel 2. 25 Daftar SPPG lingkup Provinsi Bengkulu

No	Lokasi	Nama SPPG
1	Kaur	SPPG Kaur Kaur Selatan Suka Bandung
2	Seluma	SPPG Seluma Sukaraja Cahaya Negeri
3	Rejang Lebong	SPPG Rejang Lebong Curup Tengah Talang Rimbo Lama
4	Kota Bengkulu	SPPG Kota Bengkulu Singaran Pati Padang Nangka
5	Muko Muko	SPPG Muko Muko Kota Mukomuko Koto Jaya
6	Kota Bengkulu	SPPG Kota Bengkulu Ratu Agung Kebun Tebeng 1
7	Seluma	SPPG Seluma Sukaraja Cahaya Negeri
8	Kota Bengkulu	SPPG Polda Bengkulu

Sumber: BGN Regional Bengkulu (diolah)





2.4.2 Data Penerima Manfaat MBG

Jumlah penerima manfaat MBG di Bengkulu hingga saat ini berjumlah 12.222 siswa atau sekitar 4,05% dari jumlah target penerima manfaat yaitu 301.787 siswa. Hingga saat ini target utama dari MBG di wilayah Bengkulu masih didominasi oleh anak sekolah. Untuk target penerima yang berasal dari kategori ibu hamil, menyusui, serta balita masih dalam proses.

Tabel 2. 26 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa Penerima Manfaat MBG

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
PAUD/RA/TK	27	1.175
SD/MI	31	10.247
SMP/MTs	6	617
SMA/MA/SMK	2	49
SLB	1	134
Total	67	12.222

Sumber: BGN Regional Bengkulu (diolah)

2.4.3 Aspek Operasional

Untuk memenuhi kebutuhan seluruh anak sekolah dari jenjang TK hingga SMA, dibutuhkan 274 dapur. Setiap dapur memperoleh kewajiban untuk memenuhi kebutuhan MBG sejumlah 3500 porsi. Masing-masing dapur memiliki jumlah personel yaitu 47 orang yang mendapatkan tugas mulai dari

penyediaan makanan, distribusi, belanja bahan makanan, hingga membersihkan alat makan yang digunakan pada program tersebut. Dalam hal jumlah penerima MBG di lokasi bersangkutan kurang dari 3500 porsi maka jumlah personel dalam dapur akan disesuaikan secara proporsional. Pada daerah yang bersifat khusus dimungkinkan untuk berdiri dapur meskipun melayani jumlah porsi yang lebih sedikit dari standar dapur normal. Untuk wilayah Bengkulu, dapur dengan spesifikasi khusus direncanakan akan didirikan di Pulau Enggano. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh anak sekolah dari jenjang TK hingga SMA, dibutuhkan 274 dapur. Setiap dapur memperoleh kewajiban untuk memenuhi kebutuhan MBG sejumlah 3500 porsi. Masing-masing dapur memiliki jumlah personel yaitu 47 orang yang mendapatkan tugas mulai dari penyediaan makanan, distribusi, belanja bahan makanan, hingga membersihkan alat makan yang digunakan pada program tersebut. Dalam hal jumlah penerima MBG di lokasi bersangkutan kurang dari 3500 porsi maka jumlah personel dalam dapur akan disesuaikan secara proporsional. Pada daerah yang bersifat khusus dimungkinkan untuk berdiri dapur meskipun melayani jumlah porsi yang lebih sedikit dari standar dapur normal. Untuk wilayah Bengkulu, dapur dengan spesifikasi khusus direncanakan akan didirikan di Pulau Enggano.

2.4.4 Dampak Programm MBG terhadap Harga Bahan Baku

Pelaksanaan program MBG di wilayah Bengkulu akan mempengaruhi perubahan harga bahan baku makanan yang ada di pasaran. Namun mengingat persentase penerima manfaat yang masih minim, perubahan harga yang terjadi belum dapat dijadikan acuan untuk melakukan analisis lebih lanjut.

Terdapat beberapa bahan baku makanan yang digunakan dalam penyediaan MBG yang terdiri atas beras, minyak, bawang merah, bawang putih, daging, ikan dan sebagainya. Dari bahan baku tersebut dapat disajikan perubahan harga pada periode Januari s.d. Mei 2025.

Tabel 2. 27 Harga Bahan Baku Januari-Mei 2025 (Rupiah)

No	Bahan Baku	Harga Januari 2025	Harga Mei 2025	HET/HAP Sesuai Zona	Keterangan
1.	Beras Medium	13.291	13.318	13.100	Di atas HET
2.	Bawang Merah	40.040	43.024	41.500	Di atas HET
3.	Bawang Putih	42.040	42.775	40.000	Di atas HET
4.	Cabe Merah Keriting	52.278	40.739	55.000	Di bawah HAP
5.	Daging Sapi Murni	133.032	134.909	140.000	Di bawah HAP
6.	Daging Ayam Ras	37.979	32.925	40.000	Di bawah HAP
7.	Telur Ayam Ras	28.654	27.380	30.000	Di bawah HAP
8.	Minyak Goreng Curah	15.509	15.067	15.700	Di bawah HET

Sumber: panelharga.badanpangan.go.id (diolah)

Keterangan: HET Harga Eceran Tertinggi
HAP Harga Acuan Pangan tingkat Konsumen





2.4.5 Kendala Pelaksanaan Program MBG Provinsi Bengkulu

1. Terdapat keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia pada pihak yayasan, sehingga penyusunan proposal pengajuan kebutuhan dana untuk penyediaan Makanan Bergizi (MBG) dilakukan oleh SPPG Kabupaten/Kota.
2. Penyusunan proposal pengajuan dana MBG masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem yang dikembangkan oleh BGN. Akibatnya, proses reviu oleh SPPG Kabupaten/Kota maupun SPPG Koordinator membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan, karena perhitungan belum terkomputerisasi.
3. Keterlambatan pencairan dana MBG antara lain disebabkan oleh proposal pengajuan kebutuhan dana MBG yang tidak sesuai format atau tidak lengkap.
4. Ditemukan perbedaan antara jumlah siswa penerima manfaat yang tercantum dalam proposal kebutuhan MBG dengan kondisi riil di lapangan, yang disebabkan oleh siswa tidak hadir tanpa pemberitahuan, sedangkan proposal disusun untuk kebutuhan sepuluh hari ke depan.
5. Yayasan menerima pembayaran secara bruto untuk penyediaan MBG selama sepuluh hari ke depan. Namun, hingga saat ini, SPPG dan yayasan belum memperoleh informasi terkait tata cara pemungutan dan penyetoran pajak, identifikasi objek pajak, serta perhitungan pajak atas kegiatan penyediaan MBG.
6. Belum adanya digitalisasi sistem menyebabkan seluruh proses, mulai dari penyusunan proposal pengajuan kebutuhan MBG hingga penyaluran dan pelaporan dana, sulit untuk direkonsiliasi secara akurat.
7. Kanwil DJPb dan KPPN masih mengalami kesulitan dalam memperoleh data terkait penyaluran MBG dan jumlah siswa penerima manfaat, karena belum tersedia sistem yang terintegrasi antara BGN dan DJPb.
8. Pemerintah Daerah belum terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program MBG, sehingga belum tersedia kebijakan daerah yang dapat mengaitkan program MBG dengan potensi pengembangan usaha lokal.

2.4.6 Rekomendasi Pelaksanaan Program MBG Provinsi Bengkulu

1. Tata Kelola Keuangan MBG:

- a. Diperlukan digitalisasi sistem MBG untuk mendukung proses penyusunan proposal pengajuan kebutuhan dana MBG, reviu, dan persetujuan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana serta pelaporan kewajiban perpajakan.
- b. Perlu dikembangkan sistem interkoneksi data MBG antara DJPb dan BGN guna mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Kantor Pusat, Kanwil DJPb, maupun KPPN.
- c. BGN perlu menyusun petunjuk teknis bagi SPPG dan yayasan terkait kewajiban perpajakan atas penyediaan MBG.
- d. Perlu penegasan peran dan tanggung jawab SPPG, mengingat salah satu tugas utamanya adalah melakukan reviu atas proposal pengajuan dana dan pertanggungjawaban yayasan, serta memberikan persetujuan atas virtual account (VA), sehingga posisi SPPG dalam pengelolaan dana MBG sebagai bagian dari Keuangan Negara menjadi jelas.

2. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program MBG:

- a. Diperlukan kebijakan daerah yang mewajibkan yayasan untuk bermitra dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau BUMDes dalam pengadaan bahan baku MBG.
- b. Fasilitasi pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM yang berkontribusi terhadap pelaksanaan program MBG.
- c. Perlu peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas agar penyaluran MBG dapat menjangkau sekolah-sekolah di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

3. Pelaksanaan MBG di Daerah dengan Akses Sulit Dijangkau:

Untuk daerah-daerah dengan akses terbatas, pelaksanaan penyediaan MBG dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh Komite Sekolah, dengan tetap menjamin mutu dan standar gizi sesuai ketentuan BGN. Salah satu kendala pelaksanaan oleh Komite Sekolah adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya terkait dengan persyaratan sanitasi dan kelayakan lingkungan (amdal) untuk pembangunan dapur.





BAB III

Analisis Tematik



GULAI KEMBANG'ANG

Makanan ini biasanya hadir selama bulan Ramadhan, selain itu juga disajikan saat sedang merayakan hari raya Lebaran. Gulai Kembang'ang sangat terkenal di Bengkulu, makanan ini menggunakan iga sapi sebagai bahan utamanya.

Ada yang unik dari makanan ini khas Bengkulu Selatan ini karena ditambahkan daun talas pada makanan ini. Cara membuat daging iga sapi dan daun talas empuk dan mudah disantap, keduanya direbus terlebih dahulu. Kaldu dari rebusan daging iga sapi dapat dijadikan sebagai kuah sup untuk meningkatkan cita rasa gurihnya.

sumber artikel : www.kompas.com



BAB III ANALISIS TEMATIK

3.1 Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru (tiang tengah).
4. Berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk rakyat. Koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah. Keberadaan koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara kolektif dan memberdayakan potensi lokal. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat dalam memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial.

Dampak sosial ekonomi dari pengembangan koperasi di Indonesia dalam buku “Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi” oleh Sutrisno (2019), koperasi telah berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, serta meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, koperasi juga berperan dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses tersebut. Kontribusi koperasi terhadap pemberdayaan masyarakat juga tidak dapat dipandang remeh.

Menurut penelitian oleh Haryanto (2020) dalam jurnal “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi”, koperasi telah memberikan pelatihan, pendidikan, dan akses pasar bagi para anggotanya, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan daya saing ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan koperasi di Indonesia tidak hanya memiliki sejarah yang panjang, tetapi juga memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan serta kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat.

Menurut jurnal “MSDJ: Management Sustainable Development Journal” Sutrisno, A. D., & Sari, R. K. (2019), koperasi mampu berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan anggotanya yang diwujudkan melalui pelayanan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat seperti pelayanan kesehatan, sosial dan pendidikan. Koperasi juga membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena kemampuannya dalam mendorong demokrasi, meningkatkan pendapatan, mendorong inklusi sosial, melindungi lingkungan, dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan globalisasi, koperasi dihadapkan pada dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Tantangan tersebut mencakup perubahan pola konsumsi masyarakat, persaingan dengan pelaku usaha besar, serta transformasi digital yang menuntut koperasi untuk lebih adaptif dan inovatif. Sayangnya, masih banyak koperasi daerah yang belum mampu mengimbangi perkembangan ini. Permasalahan seperti manajemen yang kurang profesional, rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan akses terhadap modal dan informasi, serta kurangnya pemanfaatan teknologi menjadi kendala utama dalam pengembangan koperasi.

Koperasi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan struktural yaitu Pertama; kompleksitas karena penawaran produk yang terbatas; produk yang disediakan oleh koperasi belum memenuhi kebutuhan anggotanya, baik dari sisi kualitas maupun harga. Kedua; kompleksitas karena peran ganda anggota, pada saat yang sama, anggota memainkan peran sebagai pemilik bersama anggota lainnya, sebagai pengguna atau pemasok, sekaligus sebagai



pemodal dan pemegang hak suara. Ketiga; kompleksitas karena masalah tata kelola, sebagian besar koperasi memanfaatkan anggota untuk menjadi administrator dan karyawan secara sukarela (Messabia, Beauvoir, & Kooli, 2022).

Selain itu, koperasi di daerah juga menghadapi tantangan dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan daya saing koperasi serta memperluas jaringan usaha. Dalam konteks ini, penting untuk merancang strategi pengembangan koperasi yang tidak hanya berfokus pada penguatan internal, tetapi

juga memperhatikan dinamika eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha koperasi.

Sehubungan dengan pentingnya peran koperasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi koperasi tersebut maka perlu untuk dilakukan analisis atas peran dan strategi pengembangan koperasi di daerah yang terbagi ke dalam beberapa pokok pembahasan yakni perkembangan kondisi koperasi khususnya di Provinsi Bengkulu, dukungan pemerintah untuk pengembangan koperasi khususnya di Provinsi Bengkulu, tantangan dalam pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu, strategi pengembangan koperasi serta potensi pengembangan koperasi desa/kelurahan.

3.2 Perkembangan Kondisi Koperasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 s.d. 2023

Secara umum jumlah koperasi di Provinsi Bengkulu selama tahun 2021 s.d. tahun 2023 mengalami pertumbuhan, koperasi yang memiliki nomor induk koperasi (NIK) pada tahun 2023 sebanyak 2.033 koperasi tumbuh 0,35% yoy dibandingkan tahun 2022. Dari jumlah koperasi pada tahun 2023 tersebut, sebanyak 583 koperasi (28,67%) merupakan koperasi aktif yang ditandai dengan aktif menyelenggarakan

kegiatan rapat anggota tahunan minimal dalam 3 tahun terakhir.

Walaupun jumlah koperasi mengalami pertumbuhan pada tahun 2023, namun jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, jumlah modal, jumlah aset, volume usaha, serta jumlah SHU mengalami kontraksi/penurunan dibandingkan tahun 2022. Data selengkapnya terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Perkembangan Kondisi Koperasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Koperasi		Jumlah Anggota	Jumlah Karyawan	Jumlah Tenaga Kerja	Modal		Aset (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp. Juta)	SHU (Rp. Juta)
	Memiliki NIK	Sertifikat NIK				Sendiri (Rp. Juta)	Luar (Rp. Juta)			
2021	1.983	550	81.927	-	-	423.633,00	150.502,91	637.989,85	499.787,69	39.220,92
2022	2.026	576	76.207	592	6.719	419.258,90	154.492,09	619.081,85	499.897,70	40.909,85
2023	2.033	583	61.070	565	6.707	393.901,09	113.611,45	576.066,73	458.256,91	37.484,92
% growth	0,35%	1,22%	-19,86%	-4,56%	-0,18%	-6,06%	-26,46%	-6,95%	-8,33%	-8,37%

Sumber: Kemenkop UKM (diolah)

Permasalahan banyaknya koperasi yang tidak aktif tersebut diantaranya banyaknya anggota yang tidak membayar iuran dan banyaknya kredit macet (sumber: rri.co.id). Selain itu, koperasi yang tidak aktif disebabkan oleh berbagai faktor, kurangnya pemahaman dan kesadaran berkoperasi di kalangan anggota, pengelolaan koperasi yang tidak baik, keterbatasan modal, lemahnya daya saing, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan koperasi.

Apabila dibandingkan dengan data nasional, pada tahun 2023 Provinsi Bengkulu

hanya berkontribusi sebesar 1,56% jumlah koperasi di Indonesia. Secara nasional walaupun jumlah koperasi yang terdaftar (memiliki NIK) pada tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar 0,18% dibandingkan tahun 2022, namun jumlah koperasi aktif mengalami pertumbuhan sebesar 4,53%. Jumlah modal luar yang masuk ke koperasi pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan 9,06% yoy, berbanding lurus dengan pertumbuhan volume usaha dan pertumbuhan SHU koperasi. Data selengkapnya terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.2 Perkembangan Kondisi Koperasi Nasional

Tahun	Koperasi		Jumlah Anggota	Jumlah Karyawan	Jumlah Tenaga Kerja	Modal		Aset (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp. Juta)	SHU (Rp. Juta)
	Memiliki NIK	Sertifikat NIK				Sendiri (Rp. Juta)	Luar (Rp. Juta)			
2022	130.354	43.811	29.448.965	419.964	826.578	108.777.727,02	136.838.266,10	281.573.716,45	197.875.647,88	7.882.668,23
2023	130.119	45.794	28.984.292	254.849	660.670	104.939.120,97	149.236.744,32	275.062.669,90	197.934.603,29	7.997.875,41
% growth	-0,18%	4,53%	-1,58%	-39,32%	-20,07%	-3,53%	9,06%	-2,31%	0,03%	1,46%

Sumber: Kemenkop UKM (diolah)

3.3 Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

3.3.1 Kebijakan Pemerintah untuk Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992, Pemerintah melakukan pembinaan kepada koperasi:

- Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasalahatan koperasi, dengan upaya:
 - Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
 - Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
 - Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
 - Membudayakan koperasi dalam masyarakat.
- Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi, dengan upaya:
 - Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

- Memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
- Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Selanjutnya berdasarkan pasal 63 UU No. 2 Tahun 1992, dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, Pemerintah dapat:

- Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
- Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terkait pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Provinsi Bengkulu Terkait Pengembangan Koperasi

Sasaran	Strategi
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Dan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan daya saing Koperasi, KUKM dan IKM serta mengembangkan sarana perdagangan rakyat
Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan permodalan masyarakat pada koperasi, usaha simpan pinjam

Sumber: Kemenkop UKM (diolah)



3.3.2 Perkembangan Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan koperasi dan UKM di daerah meliputi:

1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan;
2. Pelaksanaan petugas penyuluh koperasi lapangan daerah provinsi/kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan operasional pusat layanan usaha terpadu daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Promosi produk usaha kecil dan menengah daerah di SMESCO Indonesia;
5. Pelaksanaan satuan tugas pengawas koperasi;
6. Pelaksanaan pendataan lengkap dalam rangka penyelenggaraan basis data tunggal koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah menggunakan sistem informasi data tunggal koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

Tabel 3.4 Perkembangan Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan Koperasi dan UKM Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	Satuan Kerja	Uraian Program	Pagu	Realisasi	%
2021	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu	Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi	2.246.964.000	2.149.473.613	95,66%
2022			4.622.797.000	4.520.227.027	97,78%
2023			434.408.000	433.638.414	99,82%
2024			3.155.806.000	3.017.680.237	95,62%
% Growth 2024 yoy			626,46%	595,90%	-
Total 2021 s.d. 2024			10.459.975.000	10.121.019.291	96,76%

Sumber: Sintesa (diolah)

3.3.3 Perkembangan Dukungan Belanja Transfer ke Daerah

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK), penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK diarahkan untuk:

1. Mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi usaha mikro dan usaha kecil;
2. Akselerasi digitalisasi koperasi, usaha mikro dan usaha kecil;
3. Meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil; dan
4. Menumbuhkan wirausaha pemula.

7. Pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tereapainya target pada program prioritas Kemenkop UKM.

Dukungan belanja Kementerian/Lembaga terkait pengembangan koperasi dan UKM pada Provinsi Bengkulu dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan dana dekonsentrasi (APBN), selama tahun 2021 s.d. 2024 telah dicairkan dana sebesar Rp10,1 Miliar. Tahun 2022 merupakan pencairan tertinggi sebesar Rp4,5 Miliar, sedangkan tahun 2023 merupakan realisasi terkecil sebesar Rp433 Juta. Perkembangan pagu dukungan belanja K/L tersebut menunjukkan tren berfluktuatif, tahun 2022 merupakan alokasi tertinggi turun di tahun 2023 kemudian naik kembali di tahun 2024. Data selengkapnya terkait perkembangan dukungan belanja Kementerian/Lembaga terkait pengembangan koperasi dan UKM terlihat pada tabel dibawah ini.

Perkembangan dukungan belanja transfer ke dana alokasi khusus nonfisik peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil (PK2UMK) pada Provinsi Bengkulu selama tahun 2023 s.d. 2024, telah dicairkan dana sebesar Rp11,9 Miliar. Perkembangan realisasi alokasi DAK Nonfisik PK2UMK pada tahun 2024 baik dari sisi pagu maupun sisi realisasi mengalami pertumbuhan. Pada sisi realisasi tahun 2024 sebesar Rp6,4 Miliar atau naik 15,09% dibandingkan tahun 2023. Data selengkapnya terkait perkembangan dukungan belanja transfer ke dana alokasi khusus nonfisik PK2UMK terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.5 Perkembangan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023 s.d. 2024 (Rupiah)

Tahun	DAK Non Fisik	Pagu	Realisasi	%
2023	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	5.628.433.000	5.561.793.950	98,82%
2024		6.566.820.000	6.401.007.300	97,47%
% <i>Growth</i>		16,67%	15,09%	-
Total		12.195.253.000	11.962.801.250	98,09%

Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

3.3.4 Perkembangan Dukungan Belanja APBD

Dukungan belanja APBD Pemda Provinsi Bengkulu terkait pengembangan koperasi terdapat pada empat program yakni program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pemeriksaan dan pengawasan koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, dan program pemberdayaan dan perlindungan.

Total pencairan dana program terkait pengembangan koperasi selama tahun 2021 s.d. 2024 pada Pemda Prov. Bengkulu sebesar Rp10,1 Miliar. Realisasi pencairan dana terkait pengembangan koperasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp3,4 Miliar, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp1,89 Miliar. Data selengkapnya terkait dukungan belanja APBD Pemda Provinsi Bengkulu terkait pengembangan koperasi terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Perkembangan Dukungan Belanja APBD Provinsi Bengkulu Terkait Pengembangan Koperasi Tahun 2021 s.d. 2024 (Rupiah)

Tahun	Nama Program	Nama Kegiatan	Pagu Alokasi	Realisasi	%
2021	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	49.999.800	44.092.000	88,18%
	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	48.259.900	96,52%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.352.080.000	2.320.699.000	98,67%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000	47.702.972	95,41%
Total 2021			2.502.079.800	2.460.753.872	98,35%
2022	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	200.000.000	178.590.600	89,30%
	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	231.660.000	221.800.441	95,74%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.534.331.000	2.495.517.482	98,47%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	550.000.000	538.540.254	97,92%
Total 2022			3.515.991.000	3.434.448.777	97,68%

Sumber: Kemenkop UKM (diolah)



Tahun	Nama Program	Nama Kegiatan	Pagu Alokasi	Realisasi	%
2023	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	125.000.000	124.711.980	99,77%
	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	248.000.000	156.353.000	63,05%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.981.796.000	1.973.471.260	99,58%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.000.000	121.622.632	97,30%
Total 2023			2.479.796.000	2.376.158.872	95,82%
2024	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	60.000.000	52.644.600	87,74%
	PROGRAM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	60.000.000	58.585.000	97,64%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.734.642.000	1.723.856.615	99,38%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60.000.000	59.927.800	99,88%
Total 2024			1.914.642.000	1.895.014.015	98,97%
Total 2021 s.d. 2024			10.412.508.800	10.166.375.536	97,64%
Growth 2024 yoy			-22,79%	-20,25%	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu (diolah)

3.4 Tantangan dalam Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh Dinas Koperasi dan UKM Prov. Bengkulu teridentifikasi tantangan dalam pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

3.4.1 Rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan anggota koperasi

Koperasi dihadapkan pada tantangan baru di era modern, kemampuan beradaptasi menjadi kunci penting bagi koperasi agar tetap mampu bersaing dan berkembang, adaptasi tersebut menuntut koperasi untuk melakukan inovasi dalam model bisnis koperasi, terutama dalam menghadapi persaingan dengan sektor *e-commerce*. Salah satu bentuk adaptasi tersebut ialah transformasi menuju koperasi digital yang merupakan transisi dari sistem koperasi konvensional ke platform digital.

Implementasi koperasi digital dapat meningkatkan

efisiensi, menjangkau anggota yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing di era yang didominasi oleh *e-commerce* dan institusi finansial berbasis teknologi. Selain itu, melalui kemampuan untuk memproses transaksi secara modern, koperasi digital memungkinkan anggotanya untuk mendapatkan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman.

3.4.2 Tantangan tata kelola koperasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana

Salah satu aspek tantangan dalam tata kelola koperasi ialah implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. Transparansi menuntut keterbukaan kepada semua anggota koperasi terkait kondisi keuangan koperasi. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pengelolaan usaha dan keuangan koperasi.





Kedua hal tersebut menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan yang kuat dari seluruh anggota koperasi yang mendorong eksistensi dan perkembangan koperasi.

3.4.3 Petugas pendamping koperasi di Daerah yang bertugas melaksanakan pendampingan koperasi masih kurang dan tidak lagi dibiayai oleh APBN

Permasalahan kurangnya petugas pendamping koperasi di daerah memang menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Pendamping koperasi di daerah memiliki tugas untuk menguatkan koperasi dan UMKM, memberikan bimbingan, konsultasi, dan advokasi, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Petugas pendamping koperasi juga bertugas menyusun rencana kerja pendampingan, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM. Kurangnya jumlah dan kompetensi petugas pendamping menjadi masalah utama, selain itu terjadi kekurangan pendanaan untuk melaksanakan tugas pendampingan koperasi.

3.4.4 Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM Pengelola Koperasi

Sehubungan dengan rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola koperasi, pemerintah telah mengambil langkah-

langkah untuk mengembangkan sumber daya koperasi, sebagai contoh adalah penyuluhan tentang koperasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi. Namun langkah-langkah pemerintah tersebut dirasakan masih belum cukup masif dan belum berkelanjutan.

3.4.5 Jaringan supply dan pemasaran produk yang terbatas

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi dan merupakan salah satu peluang mengembangkan usaha ialah memperluas akses pasar, baik dalam maupun luar negeri. Seperti diketahui pertumbuhan bisnis ritel dari tahun ke tahun cukup pesat. Ritel-ritel modern telah muncul dan berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, bisnis ritel modern tersebut memiliki jaringan supply dan pemasaran produk yang luas dengan harga bersaing, barang teratur, sistem keuangan modern, dan ruangan nyaman. Bisnis ritel banyak diminati, karena tidak membutuhkan jumlah modal terlalu besar dan berprospek ke depan akibat pergeseran pola belanja masyarakat yang mencari kemudahan, kecepatan, harga terjangkau dan mutu terpenuhi (Hubeis, 2012). Pertumbuhan bisnis ritel modern tersebut dapat mempengaruhi bisnis koperasi terutama pada jenis koperasi konsumen dan koperasi serba usaha.

3.5 Strategi Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

3.5.1 Penggunaan Analisis SWOT untuk Merumuskan Strategi Pengembangan Koperasi

Perumusan strategi pengembangan koperasi dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) dalam sebuah proyek tertentu atau spekulasi bisnis. Tahapan perumusan strategi pengembangan koperasi menggunakan analisis SWOT meliputi identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, lalu menyusun strategi berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal.

Tahapan Perumusan Strategi Pengembangan Koperasi Menggunakan SWOT:

1. Identifikasi Kekuatan (*Strengths*) yakni mengidentifikasi aspek-aspek internal koperasi yang menjadi keunggulan dan sumber daya unggul.

2. Identifikasi Kelemahan (*Weaknesses*) yakni mengidentifikasi aspek-aspek internal koperasi yang menjadi kekurangan dan hambatan.
3. Identifikasi Peluang (*Opportunities*) yakni mengidentifikasi aspek-aspek eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan koperasi.
4. Identifikasi Ancaman (*Threats*) yakni mengidentifikasi aspek-aspek eksternal yang dapat menghambat pengembangan koperasi.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh Dinas Koperasi dan UKM se-Provinsi Bengkulu, berikut hasil analisis SWOT pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu:

Tujuan Utama Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi lokal.
- Mendorong ketahanan pangan dan inklusi keuangan di tingkat desa.
- Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman yang merugikan, seperti rentenir.



Tabel 3. 7 Hasil Analisis SWOT Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

Analisis SWOT	Uraian
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	1. Semangat kekeluargaan dan gotong royong 2. Kearifan lokal yang beragam 3. Kualitas produk yang berkualitas 4. Anggota yang terdaftar merupakan konsumen sekaligus produsen yang potensial
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	1. Rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan anggota koperasi termasuk kurangnya inovasi dalam model bisnis koperasi 2. Tantangan tata kelola koperasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana 3. Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi 4. Kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal
Peluang (<i>Opportunities</i>)	1. Peluang sebagai penyalur pupuk bersubsidi 2. Peluang sebagai penyalur sembako bekerjasama dengan BULOG 3. Peluang kerja sama dengan Bumdes 4. Peluang program koperasi merah putih 5. Peluang kerja sama dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM. 6. Pemanfaatan teknologi seperti e-commerce, aplikasi mobile, dan layanan keuangan digital
Ancaman (<i>Threats</i>)	1. Adanya pilihan pinjaman <i>online</i> sebagai pesaing koperasi simpan pinjam 2. Semakin banyaknya gerai retail modern 3. Semakin meningkatnya transaksi melalui <i>e-commerce</i> atau toko <i>online</i> 4. Nasabah tidak mengembalikan pinjaman yang telah diberikan koperasi sehingga menggerus modal koperasi

3.5.2 Penyusunan Strategi (SWOT):

Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kombinasi keempat faktor tersebut.

1. Strategi SO (Kekuatan-Peluang) yakni menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:

- a. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak antara lain:
 - 1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terkait kemitraan pembentukan koperasi merah putih, kemitraan dengan BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan dengan BLU serta kemitraan penyaluran pupuk bersubsidi.
 - 2) Swasta terkait kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar.

- 3) Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya dengan BULOG terkait kemitraan penyaluran barang dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG.

- b. Mengakselerasi digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.

2. Strategi WO (Kelemahan-Peluang) yakni mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.

- a. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah antara lain:
 - 1) Memperkuat tata kelola koperasi termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana koperasi;
 - 2) Pengembangan koperasi digital untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.



- b. Pemerintah Pusat memberikan tambahan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan untuk koperasi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
- c. Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM.
- d. Meningkatkan permodalan koperasi melalui kewajiban menjadi anggota koperasi bagi masyarakat desa dan/atau meningkatkan iuran wajib anggota koperasi.

3. Strategi ST (Kekuatan-Ancaman) yakni menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman:

- a. Mengakselerasi digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi diantaranya pengajuan pemrosesan pinjaman secara online, pembelian/pemesanan barang/jasa koperasi sampai dengan pengiriman barang/jasa secara online dsb.
- b. Melakukan modernisasi gerai koperasi seperti konsep swalayan, dilengkapi dengan pengaturan etalase barang, sistem kasir dengan fasilitas pembayaran non tunai, ruangan berpendingin dsb.
- c. Bekerjasama dengan lembaga asuransi dan/atau lembaga penjaminan untuk memitigasi risiko kegagalan bayar nasabah pada koperasi simpan pinjam.

4. Strategi WT (Kelemahan-Ancaman) yakni mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman:

- a. Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan koperasi digital dalam rangka percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi termasuk pelatihan penguatan tata kelola koperasi dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
- b. Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM termasuk kerja sama dengan lembaga asuransi dan/atau lembaga penjaminan.

3.5.3 Penggunaan Matriks Eisenhower untuk Memprioritaskan Strategi Pengembangan Koperasi

Matriks Eisenhower merupakan cara mengatur tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan sehingga dapat secara efektif memprioritaskan pekerjaan yang paling penting. Stephen Covey, penulis buku *The 7 Habits of Highly Effective People*, mengutip kata-kata Eisenhower dan menggunakannya untuk mengembangkan alat manajemen tugas yang sekarang populer dikenal sebagai Matriks Eisenhower. Alat ini membantu untuk membagi tugas ke dalam empat kategori: tugas yang akan dikerjakan dahulu, tugas yang akan dijadwalkan untuk nanti, tugas yang akan didelegasikan, dan tugas yang akan dihapus:

1. Kuadran 1 *do* (kerjakan): menempatkan semua strategi yang mendesak dan penting, strategi yang harus dikerjakan sekarang, memiliki konsekuensi yang jelas, dan memengaruhi tujuan jangka panjang.
2. Kuadran 2 *schedule* (jadwalkan): menempatkan semua strategi yang tidak mendesak tetapi tetap penting. Karena strategi ini memengaruhi tujuan jangka panjang tetapi tidak perlu segera dilakukan.
3. Kuadran 3 *delegasikan*: menempatkan semua strategi yang mendesak tetapi tidak penting. Strategi ini harus diselesaikan sekarang, tetapi itu tidak memengaruhi tujuan jangka panjang.
4. Kuadran 4 *delete* (hapus): strategi yang tidak penting dan tidak mendesak, hanya menghalangi pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT serta pengisian kuesioner oleh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, strategi pengembangan koperasi yang diidentifikasi telah dikelompokkan ke dalam empat kuadran Matriks Eisenhower. Pengelompokan ini bertujuan untuk menetapkan prioritas strategi berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya, sehingga strategi yang penting dan mendesak dapat segera ditindaklanjuti. Hasil pengelompokan strategi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi di seluruh Indonesia.



Tabel 3. 8 Matriks Eisenhower Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

	<i>Urgent</i>	<i>Not Urgent</i>
<i>Important</i>	<i>Do:</i> - Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak antara lain: - Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terkait kemitraan pembentukan koperasi merah putih, kemitraan dengan BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan dengan BLU serta kemitraan penyaluran pupuk bersubsidi. - Swasta terkait kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar. - Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya dengan BULOG terkait kemitraan penyaluran barang dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG. - Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah antara lain: - Memperkuat tata kelola koperasi termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana koperasi; - Pengembangan koperasi digital untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi. - Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM.	<i>Schedule:</i> - Melakukan modernisasi gerai koperasi seperti konsep swalayan, dilengkapi dengan pengaturan etalase barang, sistem kasir dengan fasilitas pembayaran non tunai, ruangan berpendingin dsb. - Bekerjasama dengan lembaga asuransi dan/atau lembaga penjaminan untuk memitigasi risiko kegagalan bayar nasabah pada koperasi simpan pinjam. - Mengakselerasi digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi diantaranya pengajuan pemrosesan pinjaman secara <i>online</i>, pembelian/pemesanan barang/jasa koperasi sampai dengan pengiriman barang/jasa secara <i>online</i> dsb.
<i>Not Important</i>	<i>Delegate:</i> Pemerintah Pusat memberikan tambahan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan untuk koperasi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.	<i>Delete:</i> Meningkatkan permodalan koperasi melalui kewajiban menjadi anggota koperasi bagi masyarakat desa dan/atau meningkatkan iuran wajib anggota koperasi.

3.6 Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan

3.6.1 Digitalisasi Koperasi

Dalam rangka percepatan pengembangan usaha koperasi dengan cara digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi, berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu sebanyak 19,22% memiliki kekuatan sinyal telepon seluler sangat kuat, sebanyak 62,62% memiliki kekuatan sinyal telepon seluler kuat. Kekuatan sinyal telepon tersebut mendukung untuk program digitalisasi koperasi di Provinsi Bengkulu. Data selengkapnya terdapat pada tabel disamping.

Tabel 3. 9 Kekuatan Sinyal/Telepon Seluler Per Kab./Kota

Kab./Kota	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal
Bengkulu Selatan	17	113	28	-
Rejang Lebong	42	94	20	-
Bengkulu Utara	22	146	52	-
Kaur	41	117	31	6
Seluma	41	103	58	-
Mukomuko	37	95	20	-
Lebong	40	56	6	2
Kepahiang	20	73	24	-
Bengkulu Tengah	5	110	28	-
Kota Bengkulu	26	41	-	-
Total	291	948	267	8

Sumber: BPS (diolah)





3.6.2 Keberadaan dan Jenis Industri sebagai Potensi Pengembangan Usaha Koperasi

Setiap desa memiliki jenis industri yang beragam, hal tersebut dapat dipergunakan sebagai pengembangan usaha koperasi untuk menjual

kembali produksi industri setempat dan petensi sebagai penyedia modal usaha bagi industri setempat serta menambah modal koperasi dengan menarik industri setempat sebagai mitra. Data jenis industri per Kab./Kota selengkapnya terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 10 Data Jenis Industri Per Kab./Kota

Kab./Kota	Indu stri Kulit	Indus tri Furni ture	Industri Barang Logam bukan Mesin	Inu stri Tek stil	Indu stri Paka ian Jadi	Industri Barang Galian Bukan Logam	Ind ust ri Ka yu	Indus tri Maka nan	Indus tri Minu man	Industri Pengol ahan Tembak au	Indu stri Kert as
Bengkulu Selatan	1	84	44	1	26	19	73	56	43	-	1
Rejang Lebong	-	57	46	3	16	25	58	80	37	2	-
Bengkulu Utara	1	99	69	1	94	58	83	93	87	-	-
Kaur	-	56	28	-	25	35	46	47	32	-	-
Seluma	-	93	37	3	38	11	79	63	55	-	-
Mukomuko	-	70	47	2	39	16	22	56	71	-	-
Lebong	-	42	52	2	36	10	41	65	42	6	-
Kepahiang	1	35	45	2	25	8	57	66	40	-	-
Bengkulu Tengah	2	39	29	1	17	13	47	26	29	-	-
Kota Bengkulu	1	50	40	9	42	18	20	51	63	2	2
Total	6	625	437	24	358	213	526	603	499	10	3

Sumber: BPS (diolah)

3.6.3 Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bahwa dalam rangka mendorong uapaya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, Presiden RI menginstruksikan:

1. Percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih;
2. Koperasi desa/kelurahan merah putih tersebut melaksanakan kegiatan kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, *cold storage*/pergudangan,

2. dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan Lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan;
3. Mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih.

Sehubungan dengan instruksi presiden tersebut, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, perkembangan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sampai dengan tanggal 19 Mei 2025 telah terbentuk satu koperasi desa merah putih pada Kab. Rejang Lebong. Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan sebagai prasyarat pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih telah dilaksanakan pada 398 desa (26,3% dari total target jumlah desa). Data selengkapnya terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 11 Perkembangan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu

Kab./Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Musdes/Kel.	Unggah ke Dashboard	Terdaftar SABH (berbadan hukum)
Bengkulu Selatan	158	51	17	-
Rejang Lebong	156	53	4	1



Kab./Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Musdes/Kel.	Unggah ke Dashboard	Terdaftar SABH (berbadan hukum)
Bengkulu Utara	220	54	13	-
Kaur	195	50	23	-
Seluma	202	20	2	-
Mukomuko	151	34	-	-
Lebong	104	52	11	-
Kepahiang	117	18	6	-
Bengkulu Tengah	143	39	1	-
Kota Bengkulu	67	27	-	-
Total	1513	398	77	1

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu (diolah)

Isu strategis terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Kapasitas dan kompetensi SDM calon pengelola koperasi desa/kelurahan merah putih (sumber: metrotvnews.com);
2. Pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan merah

putih tidak melibatkan pengelola koperasi yang sudah ada (sumber: jurnalbengkulu.com);

3. Potensi konflik kepentingan dengan BUMDes yang sudah ada, terkait persaingan usaha dan penyertaan modal (sumber: kbr.id);
4. Ketentuan teknis sumber pembiayaan modal awal koperasi desa/kelurahan merah putih sebesar Rp5 Miliar belum jelas (sumber: kbr.id).

3.7 Isu Strategis dan Rekomendasi

3.7.1 Isu Strategis

1. Kondisi koperasi di Provinsi Bengkulu yang memiliki NIK pada tahun 2023 sebanyak 2.033 koperasi tumbuh 0,35% yoy dibandingkan tahun 2022. Sebanyak 583 koperasi (28,67%) merupakan koperasi aktif, sisanya merupakan koperasi non aktif. Walaupun jumlah koperasi mengalami pertumbuhan, namun jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, jumlah modal, jumlah aset, volume usaha, serta jumlah SHU mengalami kontraksi/penurunan dibandingkan tahun 2022.
2. Dukungan belanja terkait pengembangan koperasi baik yang bersumber dari APBN maupun bersumber dari APBD menunjukkan tren berfluktuatif dan cenderung menurun.
3. Terdapat beberapa tantangan pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu antara lain rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan anggota koperasi, tantangan tata kelola koperasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, petugas pendamping koperasi di daerah yang bertugas melaksanakan pendampingan koperasi masih kurang dan tidak

lagi dibiayai oleh APBN, rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi, serta Jaringan supply dan pemasaran produk yang terbatas.

4. Terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Provinsi Bengkulu antara lain kapasitas dan kompetensi SDM calon pengelola koperasi desa/kelurahan merah putih, pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih tidak melibatkan pengelola koperasi yang sudah ada, potensi konflik kepentingan dengan BUMDes yang sudah ada, terkait persaingan usaha dan penyertaan modal serta ketentuan teknis sumber pembiayaan modal awal koperasi desa/kelurahan merah putih belum jelas.

3.7.2 Rekomendasi Strategi Pengembangan Koperasi

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan analisis matriks Eisenhower sebelumnya, telah teridentifikasi strategi pengembangan koperasi yang penting dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti:

1. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak antara lain:





- a. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terkait kemitraan pembentukan koperasi desa merah putih, kemitraan dengan BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan dengan BLU serta kemitraan penyaluran pupuk bersubsidi.
 - b. Swasta terkait kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar.
 - c. Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya dengan BULOG terkait kemitraan penyaluran barang dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG.
2. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah antara lain:
 - a. Memperkuat tata kelola koperasi termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana koperasi;
 - b. Pengembangan koperasi digital untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.
 3. Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM.
4. Terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih:
 - a. Pemerintah pusat agar menerbitkan juknis persyaratan rekrutmen pengelola koperasi desa/kelurahan merah putih yang berkompeten agar dapat dikelola secara profesional berdasarkan prinsip pengelolaan koperasi yang sehat.
 - b. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kota/Kab. diharapkan dapat mengawal pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih agar terlaksana dengan melibatkan semua pihak yang terkait.
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov./Kota/Kab. dan Pemerintah Desa agar mengatur pembagian tugas antara koperasi desa/kelurahan merah putih dengan BUMDes yang sudah ada agar dapat berkolaborasi saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - d. Pemerintah pusat agar menerbitkan ketentuan teknis terkait modal awal koperasi desa/kelurahan merah putih, agar koperasi yang telah terbentuk dapat segera berjalan.

Kemitraan Koperasi untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu sudah mengusulkan 6 koperasi dari total 2.721 Koperasi di Bengkulu untuk membantu suplai bahan pangan makan bergizi gratis. Keenam koperasi tersebut antara lain Koperasi Produsen Puskud Provinsi Bengkulu di sektor usaha garam dan katering, Koperasi Jasa Rafflesia Muda Berjaya di sektor usaha beras, Koperasi Produsen Aikal Mandiri Bengkulu di sektor usaha ayam, Koperasi Serba Usaha di sektor usaha beras, perikanan, ayam potong, telur hortikultura, dan cabe, Koperasi Produsen Mulya Usaha di sektor usaha beras, telur, sayur, ayam, daging, hortikultura, tahu tempe dan ikan. Koperasi Giri Mulya Mandiri di sektor usaha susu.

Sumber:

<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7721210/pemprov-bengkulu-usulkan-6-koperasi-untuk-program-makan-bergizi-gratis>



BAB IV

Kesimpulan & Rekomendasi





LONTONG TUNJANG

Lontong Tunjang adalah hidangan berkuah yang terdiri dari lontong, potongan daging tunjang (kikil sapi), dan sayuran. Kuahnya yang kental dan kaya rempah, dipadukan dengan tekstur lontong yang lembut dan kenyal, serta daging tunjang yang empuk dan lezat, menciptakan harmoni rasa yang tak terlupakan.

Keunikan Lontong Tunjang terletak pada penggunaan daging tunjang atau kikil sapi sebagai bahan utama. Tunjang adalah bagian kaki sapi yang memiliki tekstur kenyal dan kaya akan kolagen. Proses memasak tunjang yang lama dan tepat menghasilkan daging yang empuk dan lezat, sehingga sangat cocok dipadukan dengan lontong dan kuah yang kaya rempah.

sumber artikel : www.rri.co.id/bengkulu/kuliner



BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab I sampai bab III, berikut hal-hal yang dapat disimpulkan dan dijadikan catatan penting dalam Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2025:

Perkembangan Ekonomi Regional

1. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I tahun 2025 sebesar 4,84 persen (y-o-y) menunjukkan kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,64 persen (y-o-y). Apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen (yoy), pertumbuhan ekonomi Bengkulu tumbuh 0,03 persen lebih lambat. Provinsi Bengkulu menempati posisi ke 4 dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera, dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 2,11 persen (terendah se-Sumatera). Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini ialah kontraksi pada sektor konstruksi akibat perlambatan pelaksanaan beberapa proyek pemerintah karena adanya efisiensi anggaran serta pada sektor pertambangan akibat tingginya biaya transportasi melalui Pelabuhan Pulau Baai, selain itu turunnya permintaan batu bara di pasar internasional juga memengaruhi kontraksi sektor pertambangan.
2. Tingkat kemiskinan tahun 2024 masih tinggi sebesar 12,52 persen (nomor dua tertinggi di Sumatera), selain itu ketimpangan pendapatan (rasio gini) semakin naik menjadi 0,343, meskipun terjadi penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,11 persen. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Masih terdapat tantangan dalam pengembangan infrastruktur yang dapat menghambat distribusi barang dan jasa di Provinsi Bengkulu. Salah satu kendala utama ialah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, yang mengurangi kapasitas kapal yang dapat bersandar dan memperlambat arus logistik. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya distribusi, keterlambatan pengiriman barang, berkurangnya daya saing daerah dalam perdagangan, serta penurunan ekspor melalui Bengkulu.

Perkembangan Fiskal Regional

1. Isu Strategis Pendapatan Negara

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas Triwulan I 2025 mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu sebesar 34,93 persen y-o-y. Penurunan disebabkan pertama, kebijakan pemusatan atas Wajib Pacak Cabang sesuai PMK Nomor: 136/PMK.03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Kedua, kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, dan penurunan angsuran PPh Pasal 25 Masa hingga Maret 2025 disebabkan karena belum disampaikannya SPT Tahunan oleh sebagian besar Wajib Pajak.
- b. Hingga akhir Triwulan I 2025, penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi yang sangat signifikan, total realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp24,39 juta atau hanya 1,70 persen dari target tahunan sebesar Rp1,44 miliar, dengan penurunan sebesar 98,59 persen (yoy) dari capaian Triwulan I 2024 yang mencapai Rp1,73 miliar. Bea Keluar tidak mencatatkan realisasi sama sekali pada Triwulan I 2025, atau mengalami kontraksi 100 persen (yoy). Hal ini terjadi karena tertundanya rencana ekspor cangkang kernel sawit, salah satu komoditas ekspor utama Bengkulu, akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai.

2. Isu Strategis Belanja Pemerintah Pusat

- a. Pada triwulan I 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp810,73 miliar, atau sebesar 16,82 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi kontraksi sebesar 29,29 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi pada komponen Belanja Barang dan Belanja Modal.



- b. Belanja Barang mengalami kontraksi paling signifikan, yakni sebesar 64,63 persen (yoy). Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi belanja yang diinstruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Belanja Modal juga menunjukkan kontraksi sebesar 54,78 persen, yang sebagian besar disebabkan oleh proses pengadaan barang/jasa yang masih ditahan oleh satuan kerja. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas identifikasi belanja yang dapat dioptimalkan ulang guna mendukung efisiensi anggaran.

3. Isu Strategis Transfer ke Daerah

- a. Pada triwulan I 2025, realisasi Belanja Transfer ke Daerah di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp2.538,50 miliar atau 25,28 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp10.040,42 miliar. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8,48 persen y-o-y.
- b. Sebagian besar komponen transfer ke daerah mengalami pertumbuhan positif, terutama pada DAK Non Fisik yang mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 48,80 persen (yoy). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kecepatan dan efektivitas dalam penyaluran dana. Selain itu, DAU dan DBH juga menunjukkan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 5,11 persen dan 22,05 persen.
- c. Dana Desa mengalami kontraksi sebesar 13,06 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain perlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran, di mana hingga Maret 2025, baru 723 desa yang menerima penyaluran, jauh menurun dibandingkan 1.340 desa pada Maret 2024 (kontraksi 46,04 persen).
- d. Hingga akhir triwulan I 2025, belum terdapat penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal.

4. Isu Strategis APBD

- a. Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp1.776,95 miliar, atau mencapai 13,35 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp13.314,22 miliar. Dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I 2024 yang sebesar Rp1.828,88 miliar atau 13,46 persen dari pagu Rp13.591,45 miliar, kinerja pendapatan daerah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,84 persen secara year-on-year (yoy).
- b. Rasio pajak daerah (tax ratio) yang mencerminkan kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDRB meningkat dari 0,58 persen menjadi 0,68

0,68 persen, atau tumbuh sebesar 17,24 persen secara proporsional.

- c. Hingga Triwulan I Tahun 2025, rata-rata rasio kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 7,85 persen, tergolong rendah sekali dalam klasifikasi kemampuan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Bengkulu masih bergantung secara dominan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- d. Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Bengkulu hingga Triwulan I 2025 mencapai Rp1.286,76 miliar atau 9,34 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp13.780,47 miliar. Capaian ini mencerminkan penurunan kinerja belanja jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana realisasi Belanja Daerah mencapai Rp1.429,89 miliar atau 10,23 persen dari pagu.

Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

- a. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Bengkulu sejumlah 8 satuan. 7 satuan SPPG telah beroperasi secara penuh dan 1 SPPG masih dalam proses beroperasi disebabkan karena belum menerima *akun virtual account*.
- b. Jumlah penerima manfaat MBG di Bengkulu hingga saat ini berjumlah 12.222 siswa atau sekitar 4,05% dari jumlah target penerima manfaat yaitu 301.787 siswa. Hingga saat ini target utama dari MBG di wilayah Bengkulu masih didominasi oleh anak sekolah. Untuk target penerima yang berasal dari kategori ibu hamil, menyusui, serta balita masih dalam proses.
- c. Kendala Pelaksanaan Program MBG Provinsi Bengkulu:
- 1) Terdapat keterbatasan pemahaman dan sumber daya manusia pada pihak yayasan, sehingga penyusunan proposal pengajuan kebutuhan dana untuk penyediaan Makanan Bergizi (MBG) dilakukan oleh SPPG Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyusunan proposal pengajuan dana MBG masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem yang dikembangkan oleh BGN. Akibatnya, proses review oleh SPPG Kabupaten/Kota maupun SPPG Koordinator membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan, karena perhitungan belum terkomputerisasi.
 - 3) Keterlambatan pencairan dana MBG antara lain disebabkan oleh proposal pengajuan kebutuhan dana MBG yang tidak sesuai format atau tidak lengkap.





kebutuhan dana MBG yang tidak sesuai format atau tidak lengkap.

- 4) Ditemukan perbedaan antara jumlah siswa penerima manfaat yang tercantum dalam proposal kebutuhan MBG dengan kondisi riil di lapangan, yang disebabkan oleh siswa tidak hadir tanpa pemberitahuan, sedangkan proposal disusun untuk kebutuhan sepuluh hari ke depan.

Analisis atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah

1. Kondisi koperasi di Provinsi Bengkulu yang memiliki NIK pada tahun 2023 sebanyak 2.033 koperasi tumbuh 0,35% yoy dibandingkan tahun 2022. Sebanyak 583 koperasi (28,67%) merupakan koperasi aktif, sisanya merupakan koperasi non aktif. Walaupun jumlah koperasi mengalami pertumbuhan, namun jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, jumlah modal, jumlah aset, volume usaha, serta jumlah SHU mengalami kontraksi/penurunan dibandingkan tahun 2022.
2. Dukungan belanja terkait pengembangan koperasi baik yang bersumber dari APBN maupun bersumber dari APBD menunjukkan tren berfluktuatif dan cenderung menurun.
3. Terdapat beberapa tantangan pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu antara lain rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan anggota koperasi, tantangan tata kelola koperasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, petugas pendamping koperasi di daerah yang bertugas melaksanakan pendampingan koperasi masih kurang dan tidak lagi dibiayai oleh APBN, rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi, serta Jaringan supply dan pemasaran produk yang terbatas.
4. Terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih di Provinsi Bengkulu antara lain kapasitas dan kompetensi SDM calon pengelola koperasi desa/kelurahan merah putih, pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih tidak melibatkan pengelola koperasi yang sudah ada, potensi konflik kepentingan dengan BUMDes yang sudah ada, terkait persaingan usaha dan penyertaan modal serta ketentuan teknis sumber pembiayaan modal awal koperasi desa/kelurahan merah putih belum jelas.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada bab I sampai bab III, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2025:

Pemerintah Daerah

- a. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong sektor industri pengolahan hasil panen dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diolah menjadi bahan baku sektor perindustrian. Selanjutnya, hasil dari sektor perindustrian menjadi barang utama sektor perdagangan, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat, pengangguran berkurang, inflasi terkendali, serta pengurangan jumlah penduduk miskin.
- b. Percepatan realisasi belanja pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.
- c. Pemda harus mampu melihat peluang atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan pasokan bahan baku, Pemda harus menjadi fasilitator kerja sama pelaksana MBG di daerah (SPPG dan mitra MBG) dengan mendorong BUMDes dan Koperasi desa/kelurahan menjadi mitra strategis SPPG.
- d. Percepatan fungsionalisasi kembali Pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan. Perlu dipertimbangkan untuk membuat/membangun pelabuhan baru karena Pelabuhan Pulau Baai selalu mengalami pendangkalan.
- e. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi berbasis desa, dalam bentuk pemberian dan fasilitasi modal usaha melalui kredit program pemerintah seperti program KUR, Program Umi dsb untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
- f. Keterbatasan fiskal Pemerintah Daerah di Bengkulu yang sebagian besar masih mengandalkan TKD dari sisi penerimaan merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya, dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah di Bengkulu antara lain:





- 1) Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah: Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta retribusi pelayanan publik.
 - 2) Inovasi Sumber Pendapatan: Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memanfaatkan potensi ekonomi lokal, seperti pariwisata dan sektor industri kreatif, dan
 - 3) Digitalisasi Sistem Pajak Daerah: Menerapkan e-tax dan e-retribusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- g. Pemerintah Daerah Prov./Kab./Kota bersama DPRD perlu menyusun skala prioritas belanja daerah untuk memastikan keberlanjutan program-program layanan dasar dan strategis daerah di tengah kebijakan efisiensi. Identifikasi pos-pos belanja yang masih memungkinkan untuk direalisasikan tanpa bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
- h. Dukungan pemerintah daerah dalam program MBG:
- 1) Diperlukan kebijakan daerah yang mewajibkan yayasan untuk bermitra dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan/atau BUMDes dalam pengadaan bahan baku MBG.
 - 2) Fasilitasi pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM yang berkontribusi terhadap pelaksanaan program MBG.
Perlu peningkatan infrastruktur dan
 - 3) aksesibilitas agar penyaluran MBG dapat menjangkau sekolah-sekolah di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
- i. Pemerintah Daerah agar memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM.
- j. Rekomendasi terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih:
- 1) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kota/Kab. diharapkan dapat mengawal pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih agar terlaksana dengan melibatkan semua pihak yang terkait.
 - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov./Kota/Kab. dan Pemerintah Desa agar mengatur pembagian tugas antara koperasi desa/kelurahan merah putih dengan BUMDes yang sudah ada agar dapat berkolaborasi saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Pusat

- a. Mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.
- b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kanwil DJP Bengkulu-Lampung dapat meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada Wajib Pajak untuk menguatkan komunikasi dan edukasi tentang pentingnya penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu untuk menjaga kesinambungan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
- c. Rekomendasi pelaksanaan program MBG:
 - 1) Diperlukan digitalisasi sistem MBG untuk mendukung proses penyusunan proposal pengajuan kebutuhan dana MBG, reviu, dan persetujuan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana serta pelaporan kewajiban perpajakan.
 - 2) Perlu dikembangkan sistem interkoneksi data MBG antara DJPb dan BGN guna mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Kantor Pusat, Kanwil DJPb, maupun KPPN.
BGN perlu menyusun petunjuk teknis bagi
 - 3) SPPG dan yayasan terkait kewajiban perpajakan atas penyediaan MBG.
 - 4) Perlu penegasan peran dan tanggung jawab SPPG, mengingat salah satu tugas utamanya adalah melakukan reviu atas proposal pengajuan dana dan pertanggungjawaban yayasan, serta memberikan persetujuan atas virtual account (VA), sehingga posisi SPPG dalam pengelolaan dana MBG sebagai bagian dari Keuangan Negara menjadi jelas.
- d. Rekomendasi strategi pengembangan koperasi:
 - 1) Menetapkan kewajiban kolaborasi dan kemitraan strategis koperasi dengan berbagai pihak antara lain:
 - a) Keterlibatan koperasi di daerah dengan kemitraan pembentukan koperasi desa merah putih, kemitraan dengan BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan dengan BLU serta kemitraan penyaluran pupuk bersubsidi.
 - b) Swasta terkait kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar.
 - c) Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya dengan BULOG terkait kemitraan penyaluran barang dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG.





2. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah antara lain:
 - a) Memperkuat tata kelola koperasi termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana koperasi;
 - b) Pengembangan koperasi digital untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.
3. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah antara lain:
 - a) Pemerintah pusat agar menerbitkan juknis persyaratan rekrutmen pengelola koperasi desa/kelurahan merah putih yang berkompeten agar dapat dikelola secara profesional berdasarkan prinsip pengelolaan koperasi yang sehat.
 - b) Pemerintah pusat agar menerbitkan ketentuan teknis terkait modal awal koperasi desa/kelurahan merah putih, agar koperasi yang telah terbentuk dapat segera berjalan.

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

- a. Kanwil DJPb Bengkulu dan KPPN akan mendorong pemda Prov./Kab./Kota agar segera melakukan percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran transfer ke daerah sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Kanwil DJPb Bengkulu dan KPPN akan mendorong satuan kerja instansi vertikal di Provinsi Bengkulu untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target penyerapan anggaran per triwulan dapat tercapai.
- c. Aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas belanja di Provinsi Bengkulu antara lain melalui forum FKPN, forum TPID, Forum Alco, Forum BRIEF Bank Indonesia, serta Monev pelaksanaan anggaran dsb yang diselenggarakan secara rutin.



Kolaborasi Kemenkeu Satu dengan Dinas Dinas Koperasi dan UKM Dalam Diklat Pengembangan Bisnis Koperasi

KPP Pratama Bengkulu Satu dan KPP Pratama Bengkulu Dua ambil bagian dalam acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengembangan Bisnis Koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu bertempat di Aula UPTD Balai Latihan Koperasi UKM Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu. Kegiatan ini diadakan dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi, dan diikuti oleh seluruh pengurus atau anggota Koperasi se-Provinsi Bengkulu.

Kegiatan yang dimulai sejak tanggal 13 September 2021 s.d. 17 September 2021 ini dilangsungkan secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Acara diawali dengan pengenalan dan pemaparan materi mengenai Perpajakan Koperasi. Materi Perpajakan disampaikan oleh Asisten Penyuluh Pajak, Ricky Sukma Wijaya dan Fasya Muhammad Ramadhan yaitu tentang kewajiban perpajakan koperasi, diantaranya kewajiban mendaftar, menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak. Disampaikan pula jenis-jenis pajak yang dikenakan atas koperasi, yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN, PPh Final, dan PPh Pasal 25, serta objek pajak, besarnya tarif yang dikenakan, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajaknya.



Sumber:

<https://pajak.go.id/index.php/id/berita/kolaborasi-pajak-bengkulu-dan-dinas-kukm-sosialisasikan-perpajakan-koperasi>



Daftar Pustaka

Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi OMSPANTKD, <https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd>.

Aplikasi SIKD, <https://sikd.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi SIKP, <https://sikp.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi SIKP-UMi, <https://sikp.umi.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi Sintesa. <http://sintesa.kemenkeu.go.id/v3>.

Aplikasi SIKRI (Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia) diakses pada 22 November 2025.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 29/05/17/Th. XXIV, 5 Mei 2025 – PDRB Provinsi Bengkulu Triwulan I 2025.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 19/04/17/Th. XXVII, 8 April 2025 – IHK Provinsi Bengkulu Triwulan I 2025.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 24/05/17/Th. XXVII, 2 Mei 2025 – Inflasi Provinsi Bengkulu Triwulan I 2025.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 72/12/17/Th. XVI, 2 Desember 2024 – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 06/01/17/Th. XII, 15 Januari 2025 – Tingkat Kemiskinan, Kemiskinan Provinsi Bengkulu September 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 07/01/17/Th. XII, 15 Januari 2025 – Tingkat Ketimpangan/Rasio Gini Provinsi Bengkulu September 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 30/05/17/Th. XIX, 5 Mei 2025 – Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bengkulu Februari 2025.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 20/04/17/Th. XIX, 8 April 2025 – Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Bengkulu Maret 2025.

Buku Statistik Potensi Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2024, BPS Provinsi Bengkulu.

Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Laporan ALCo Regional Bengkulu Periode Realisasi s.d. 31 Maret 2025.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK).



Daftar Pustaka

Digitalisasi Koperasi: Mengatasi Tantangan dengan Aplikasi berbasis Solusi, <https://www.telkomsel.com/enterprise/insight/blog/solusi-koperasi-digital>

Kebijakan Pengembangan Koperasi di Indonesia, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1218662/kebijakan-pengembangan-koperasi-di-indonesia>

Koperasi di Kaur Tidak Aktif ini Penyebabnya, <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/1221508/276-koperasi-di-kaur-tidak-aktif-ini-penyebabnya>

Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Timbulkan Banyak Masalah, <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpX3j-koperasi-desa-merah-putih-berpotensi-timbulkan-banyak-masalah>

Matriks Eisenhower: Cara Memprioritaskan daftar tugas, <https://asana.com/id/resources/eisenhower-matrix>

Paradoks Koperasi Mati Segan HidupTak Mau, 2022, Edon Ramdani, Adi Murtono, Universitas Pamulang, e-ISSN 2580-5118.

Perkembangan Koperasi di Indonesia, Dampak Sosial Ekonomi dan Kontribusi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, <https://sejarah.fkip.uns.ac.id/2024/02/28/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dampak-sosial-ekonomi-dan-kontribusi-terhadap-pemberdayaan-masyarakat/>

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Koperasi, <https://kukm.babelprov.go.id/content/pentingnya-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-koperasi>

Pembentukan Koperasi Merah Putih, Langkah Strategis untuk Ekonomi Kerakyatan, <https://jurnalbengkulu.com/pembentukan-koperasi-merah-putih-langkah-strategis-untuk-ekonomi-kerakyatan>

Risiko Kopdes Merah Putih Cawe-Cawe Bisnis Klinik dan Apotek, <https://kbr.id/berita/nasional/risiko-kopdes-merah-putih-cawe-cawe-bisnis-klinik-dan-apotek>

Teknik Analisis SWOT dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan, 2023, Deradjat Mahadi Sasoko, Imam mahrudi, Universitas Jayabaya, ISSN-1412-9000.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.





Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu